



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Laporan Kinerja



Tahun 2017

Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tahun keempat Periode II RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 serta sesuai dengan dokumen APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017.

Dalam Laporan Kinerja ini kami berupaya melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan (RKPD 2018) dan sejauhmana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Daerah dan segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan Kinerja yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara terus-menerus telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai rekomendasi yang disampaikan Kementerian PAN dan RB atas evaluasi laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 yang lalu.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan Menpan dan RB atas evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2017, telah dilakukan beberapa perbaikan antara lain :



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini telah melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD agar setiap sasaran strategis terdapat indikator kinerja utama yang berkualitas *outcome*.
2. Telah menselaraskan IKU yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi dengan IKU tingkat Perangkat Daerah.
3. Telah mengupayakan peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, antara lain menjelaskan capaian IKU.

Selanjutnya, pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah *design* satu sistem aplikasi untuk pengumpulan data kinerja yang terintegrasi dengan seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang launching pada bulan April 2015. Aplikasi dimaksud juga merupakan upaya monitoring pencapaian PK secara berkala dengan menggunakan sistem monitoring yang terintegrasi yang turut direkomendasikan oleh Menpan dan RB.

Sebagai informasi bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerima beberapa penghargaan antara lain :

1. Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017;
2. Piagam Penghargaan Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) atas hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dari Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI pada tanggal 12 Juni 2017;
3. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dengan Predikat "B";
4. Penghargaan Peduli Konsumen dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang diterima oleh Gubernur Kalimantan Barat bertepatan dengan peringatan Hari Konsumen Nasional 2017 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 3 Mei 2017;
5. Gubernur Kalimantan Barat meraih penghargaan tingkat nasional, yakni penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2017 karena berhasil memajukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada tanggal 25 Mei 2017;



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

6. Gubernur Kalimantan Barat, meraih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2017 dari Koran Sindo untuk Kategori Infrastruktur dan Pembangunan, Penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 1 Agustus 2017;
7. Wakil Gubernur Kalimantan Barat menerima Penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2017 di Istana Merdeka.

Akhirnya semoga informasi kinerja di dalam Laporan Kinerja ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat yang secara internal diharapkan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Drs. DODI RIYADMADJI, MM



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALBAR	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi dan Tupoksi.....	6
3. Sumber Daya Aparatur.....	8
4. Sumber Daya Keuangan	9
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RPJMD PROVINSI KALBAR	12
1. Visi	13
2. Misi	13
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU.....	14
B. PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	101
BAB IV PENUTUP	105

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Pernyataan Telah di Reviu oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Pendahuluan

Penilaian dan Pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tingkat pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemprov Kalbar

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Pemerintah



Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun e-Kinerja (<http://ekinerja.kalbarprov.go.id>)



Gambar 1. Sistem Aplikasi e-Kinerja Prov. Kalbar

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.



3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.
4. Pengelolaan Kinerja
Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
5. Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

1.1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim

1.1.1 Letak Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak,

Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa & Kalteng
- Timur : Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

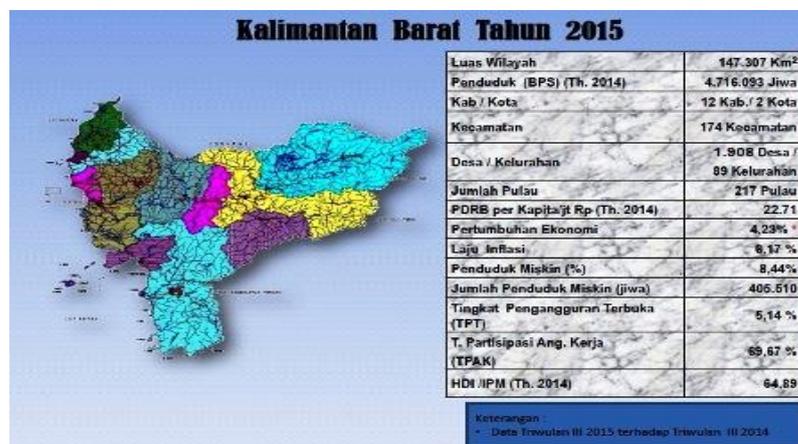
Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu; Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.

1.1.2 Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur.

Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah pertama Irian Jaya (421.891 km²), kedua Kalimantan Timur (202.440 km²) dan ketiga Kalimantan Tengah (152.600 km²).

Dilihat dari luas menurut Kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35.809 km² atau 24,39 persen) kemudian diikuti Kapuas Hulu (29.842 km² atau 20,33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya.



1.1.3 Topografi

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove.



Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Kabupaten/Kota, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

1.1.4 Sungai dan Danau

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah: Sungai Melawi, (dapat dilayari 471 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Kendawangan (128 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Sekadau (117 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Landak (178 km).

Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

1.1.5 Gunung-gunung

Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Serawai, Kab. Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding G. Semeru (Jatim, 3.676 meter) atau G. Kerinci (Jambi, 3.805 meter).

Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat, ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter, sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter .



1.1.6 Pulau-pulau

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau, Sumatera.

Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kab. Mempawah. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kab. Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

1.1.7 Penggunaan Tanah

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %.

Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah beberapa kali menyesuaikan SOPD-nya dengan menetapkan **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan **Perda Nomor 8 Tahun 2016** tersebut adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT :

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Dibawah Sekretaris Daerah terdapat 3 (tiga) orang asisten, yaitu:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membawahi 3 (tiga) Biro yaitu Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan Biro Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi 3 (tiga) Biro yaitu Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dan Biro Pengelolaan Aset; dan
- c. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) membawahi 3 (tiga) Biro yaitu Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



2. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

DINAS DAERAH PROVINSI :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
19. Dinas Perkebunan
20. Dinas Kehutanan
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Satuan Polisi Pamong Praja

BADAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Badan Penghubung
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. RSUD Dr. Soedarso
3. Rumah Sakit Jiwa Provinsi
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong

3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah per 31 Desember 2017 sebanyak 11.263 orang.

Dengan luas 1,13 kali luas pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat sekarang terbagi menjadi 14 Pemerintahan Kabupaten/Kota, yaitu : Kabupaten Sambas dengan luas 6.394,70 km² (4,36%), Kabupaten Bengkayang luas 5.397,30 km² (3,68%), Kabupaten Landak luas 9.909,10 km² (6,75%), Kabupaten Pontianak luas 1.276,90 km² (0,87%), Kabupaten Kubu Raya luas 6.985,20 km² (4,75%), Kabupaten Sanggau luas 12.857,70 km² (8,76%), Kabupaten Ketapang luas 31.240,74 km² (21,28%), Kabupaten Kayong Utara luas 4.568,26 km² (3,11%), Kabupaten Sintang luas 21.635,00 km² (14,74%), Kabupaten Kapuas Hulu luas 29.842,00 km² (20,33%), Kabupaten Sekadau luas 5.444,30 km² (3,71%), Kabupaten Melawi luas 10.644,00 km² (7,25%), Kota Pontianak luas 107,80 km² (0,07%), dan Kota Singkawang luas 504,00 km² (0,34%).

Adapun Sumber Daya Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat

NO	PEM PROV/KAB/KOTA	JUMLAH PNS/CPNS		
		2015	2016	2017
1.	PEM PROV KALIMANTAN BARAT	6236	6078	11263
2.	KOTA PONTIANAK	6875	6593	5407
3.	KOTA SINGKAWANG	4345	4194	3565
4.	KAB. BENGKAYANG	4726	4611	4273
5.	KAB. KUBU RAYA	6157	6032	5641
6.	KAB. MEMPAWAH	4811	4634	4116
7.	KAB. SAMBAS	7487	7283	6571
8.	KAB. LANDAK	5134	5004	4479
9.	KAB. SANGGAU	6279	6017	5438
10.	KAB. SEKADAU	3367	3277	3012
11.	KAB. SINTANG	6599	6387	6038
12.	KAB. MELAWI	3897	3783	3597
13.	KAB. KAPUAS HULU	5883	5703	5275
14.	KAB. KETAPANG	7174	6965	6721
15.	KAB. KAYONG UTARA	2487	2459	2229
JUMLAH		81.457	79.020	77.625

4. Sumber Daya Keuangan





Lampiran I : Peraturan Daerah Kalimantan Barat
Nomor : 8 Tahun 2017
Tanggal : 3 Oktober 2017

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017					
No	Uraian	Jumlah(Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	5.095.395.280.000,00	5.324.755.788.000,00	229.360.508.000,00	4,50
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.674.190.144.000,00	1.757.921.479.000,00	83.731.335.000,00	5,00
1.1.1	Pajak Daerah	1.445.912.639.000,00	1.509.612.639.000,00	63.700.000.000,00	4,41
1.1.2	Retribusi Daerah	35.942.515.000,00	40.532.326.000,00	4.589.811.000,00	12,77
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	70.822.377.000,00	71.544.377.000,00	722.000.000,00	1,02
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	121.512.613.000,00	136.232.137.000,00	14.719.524.000,00	12,11
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.413.705.136.000,00	3.542.709.557.000,00	129.004.421.000,00	3,78
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	229.979.584.000,00	229.979.584.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.667.449.642.000,00	1.720.698.207.000,00	53.248.565.000,00	3,19
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.516.275.910.000,00	1.592.031.766.000,00	75.755.856.000,00	5,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000,00	24.124.752.000,00	16.624.752.000,00	221,66
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	2.231.362.000,00	2.231.362.000,00	100,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	14.393.390.000,00	14.393.390.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.095.395.280.000,00	5.324.755.788.000,00	229.360.508.000,00	4,50
2	BELANJA DAERAH	5.065.395.280.000,00	5.407.654.501.695,06	342.259.221.695,06	6,76
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.701.044.997.342,00	2.772.246.725.982,30	71.201.728.640,30	2,64
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.142.627.756.157,00	1.098.858.636.297,30	(43.769.119.859,70)	(3,83)
2.1.4	BELANJA HIBAH	854.992.300.000,00	971.475.008.500,00	116.482.708.500,00	13,62
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	695.683.647.300,00	695.683.647.300,00	0,00	0,00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ,	2.021.293.885,00	2.021.293.885,00	0,00	0,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	3.488.140.000,00	(1.511.860.000,00)	(30,24)
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.364.350.282.658,00	2.635.407.775.712,76	271.057.493.054,76	11,46
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	133.245.836.972,00	134.247.615.472,00	1.001.778.500,00	0,75
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.292.472.347.786,00	1.461.169.871.652,76	168.697.523.866,76	13,05
2.2.3	BELANJA MODAL	938.632.097.900,00	1.039.990.288.588,00	101.358.190.688,00	10,80
	JUMLAH BELANJA	5.065.395.280.000,00	5.407.654.501.695,06	342.259.221.695,06	6,76
	SURPLUS(DEFISIT)	30.000.000.000,00	(82.898.713.695,06)	(112.898.713.695,06)	(376,33)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	85.000.000.000,00	172.898.713.695,06	87.898.713.695,06	103,41
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.000.000.000,00	172.898.713.695,06	87.898.713.695,06	103,41
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.000.000.000,00	172.898.713.695,06	87.898.713.695,06	103,41
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	115.000.000.000,00	90.000.000.000,00	(25.000.000.000,00)	(21,74)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	0,00	(25.000.000.000,00)	(100,00)
3.2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	115.000.000.000,00	90.000.000.000,00	(25.000.000.000,00)	(21,74)
	PEMBIAYAAN NETTO	(30.000.000.000,00)	82.898.713.695,06	112.898.713.695,06	(376,33)
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Pontianak,



B. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, permasalahan utama pembangunan daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya infrastruktur kebutuhan dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
2. Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industry terutama akibat terbatasnya energi;
3. Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan Negara dan daerah tertinggal masih sangat terbatas;
4. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada dibawah rata-rata nasional;
5. Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
6. Belum optimalnya investasi swasta dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah karena belum terbangunnya infrastruktur bertaraf international sebagai prasyarat untuk masuknya investasi;
7. Degradasi lingkungan dan deforestasi sumber daya hutan terus terjadi sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pertambangan emas tanpa izin, serta kebakaran hutan dan lahan;
8. Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
9. Daya dukung Kota Pontianak dalam menanggung beban sebagai pusat pelayanan, pemerintahan dan perekonomian semakin berkurang yang ditandai dengan semakin padatnya lalu lintas kota;
10. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
11. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
12. Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kehutanan masyarakat; dan
13. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu penyebab panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang berdampak pada keterbatasan infrastruktur di daerah serta lambannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD 2017 antara lain :

1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang inklusif (menyeluruh) dan berkeadilan. Kebijakan ekonomi makro Kalimantan Barat sebagaimana sasaran Nasional tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (*pro growth, pro job, dan pro poor*).
2. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan. Mengarahkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, adalah dengan mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, tidak semata-mata ambil untung jangka pendek tetapi lebih kepada tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya terhadap potensi lahan, hutan dan hasil tambang.
3. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran, meningkatkan investasi, serta mendorong kegiatan hilirisasi khususnya produk Unggulan Nasional (CPO dan Bauksit) dan diversifikasi produk ekspor.

Prospek Perekonomian Daerah Kalimantan Barat tahun 2018 adalah Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan untuk tumbuh dalam kisaran angka 5,26-5,94 persen (*year on year*), sementara inflasi Kalbar pada 2018 diperkirakan akan bergerak pada level yang masih terkendali. Demikian juga ekonomi global negara maju saat ini menuju pada tahap pemulihan ekonomi (*recovery*) termasuk negara berkembang seperti Tiongkok.

Tingginya kinerja ekspor, sektor informasi dan komunikasi di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat serta perekonomian masyarakat yang terus membaik yang ditandai dengan meningkatnya indeks tendensi konsumen menjadi salah satu faktor utama pendorong bagi peningkatan perekonomian daerah Kalbar pada tahun 2018. Dengan momentum pertumbuhan yang cukup baik ini, diharapkan prospek beberapa sektor usaha seperti makanan dan minuman, perhotelan, restoran, pertambangan dan perkebunan diprediksi lebih cerah di tahun 2019. Oleh karena itu target perekonomian Kalimantan Barat diproyeksi tumbuh sebesar 5,34-5,49 persen pada 2019 angka ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Beranjak dari potensi dan kondisi wilayah baik dari aspek geografi, demografi, sosial-ekonomi, dan lingkungan serta isu aktual yang berkembang seperti perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, maka untuk menyatukan komitmen para pihak pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat perlu ditentukan arah, kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dan amanat konstitusional Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memasuki tahun keempat periode kedua masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2008 – 2013 yang terpilih kembali untuk memimpin Kalimantan Barat periode 2013 – 2018.

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan periode lima tahunan kedua dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan didalam RPJMD ini. RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 telah dilakukan perubahan pada tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencana teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indeks program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun.

Selanjutnya masing-masing komponen RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :



1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

Motto Pembangunan

Motto pembangunan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat adalah PERSATUAN DAN DEMOKRASI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN BARAT. Persatuan adalah keyakinan bahwa rakyat Kalbar terdiri dari elemen-elemen masyarakat yang bhineka atau beranekaragam, yang sudah bersatu sebagai elemen dan disatukan dalam satu ikatan yang sama dan tunggal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Persatuan rakyat Kalimantan Barat dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang absolut, namun persatuan tersebut diimplementasikan secara sehat, dinamis, dan konstruktif atas dasar persamaan hak dan kewajiban semua rakyat. Jadi, motto ini bermakna bahwa dengan semangat persatuan yang dilandasi oleh sistem demokrasi yang sehat, dinamis dan konstruktif akan dicapai kesejahteraan bagi rakyat Kalimantan Barat. Pada akhirnya, daerah dan rakyat yang sejahtera juga akan membawa persatuan dan kesejahteraan bagi Negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, berikut misi RPJMD 2013-2018 :

- a. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
- c. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
- d. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan Hak Asasi Manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.
- e. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan dan

pengembangan pariwisata di Wilayah Pedalaman, Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.

- f. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
- g. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- h. Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
- i. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.
- j. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya sekaligus mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kerakyatan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

3.1 Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:





Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI		TUJUAN		INDIKATOR	
1	Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan	1	Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
				2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
				3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		2	Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan	1	Angka Usia Harapan Hidup
				2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
				3	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
				4	Prevalensi Balita Gizi Buruk
				5	Prevalensi HIV pada Usia 15-24 Tahun
		3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan	1	Angka Putus Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA
				2	Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan	1	Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan	1	Angka Rata – Rata Lama Sekolah
				2	Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C
3	Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam	1	Melestarikan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1	Luas Penurunan Kerusakan Hutan
				2	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)
4	Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi	1	Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1	Jumlah Populasi Ternak
				2	Peningkatan produksi tanaman perkebunan
				3	Peningkatan produksi perikanan (ton) hasil kelautan dan perikanan
				4	Angka Produksi Tanaman Pangan
				5	Angka Produksi Tanaman Hortikultura
5	Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai	1	Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah	1	Peningkatan Nilai Investasi
		2	Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri	1	Rasio Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja
				2	Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi
6	Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan	1	Meningkatkan daya saing daerah	1	Nilai Ekspor
				2	Nilai Transaksi Perdagangan
				3	Neraca Perdagangan
				4	Angka Inflasi



	koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya	2	Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1 2	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi Berkualitas
7	Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata di Wilayah Pedalaman, Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan	1 2 3 4 5 6	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (baik+sedang) Rumah tangga Pengguna Air Bersih Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi Persentase Perumahan Sehat Persentase Rumah yang Layak Huni Persentase Rumah Tanga yang menggunakan Listrik (RUPTL PLN 2012-2012)

3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN			SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR	
1 Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
	2	Indeks Pertumbuhan Gender (IPG)			2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesenjangan Gender
2 Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	1	Angka Usia Harapan Hidup			1	Angka Usia Harapan Hidup
	2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup			2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
	3	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup			3	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
	4	Prevalensi Balita Gizi Buruk			4	Prevalensi Balita Gizi Buruk
3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan	5	Prevalensi HIV pada Usia 15-24 Tahun	4	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	5	Prevalensi HIV pada Usia 15-24 Tahun
	1	Angka Putus Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA			1	Angka Putus Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C			5	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017

4	Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan	1 2	Angka Rata – Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C			2 3	Angka Rata – Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C
5	Melestarikan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1	Luas Penurunan Kerusakan Hutan	6	Berkurangnya Kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000/tahun	1	Luas Penurunan Kerusakan Hutan
		2	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	7	Menurunnya Laju Kerusakan Lingkungan	2	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)
6	Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1	Jumlah Populasi Ternak	8	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	1	Jumlah Populasi Ternak
		2	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	9	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar	2	Peningkatan produksi tanaman perkebunan
		3	Peningkatan produksi perikanan (ton)hasil kelautan dan perikanan			3	Peningkatan produksi perikanan (ton)hasil kelautan dan perikanan
		4	Pangan			5	Angka Produksi Tanaman Hortikultura
5	Angka Produksi Tanaman Hortikultura						
7	Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah	1	Peningkatan Nilai Investasi	12	Peraturan yang mendukung iklim investasi	1	Peningkatan Nilai Investasi
8	Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri	1	Rasio Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	13	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	1	Rasio Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja
		2	Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi			2	Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi
9	Meningkatkan daya saing daerah	1	Nilai Ekspor	14	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	1	Nilai Ekspor
		2	Neraca Perdagangan			2	Neraca Perdagangan
		3	Angka Inflasi			3	Angka Inflasi
10	Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1	Persentase Koperasi Aktif	15	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM	1	Persentase Koperasi Aktif
		2	Persentase Koperasi Berkualitas			2	Persentase Koperasi Berkualitas
11	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi	1	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (baik+sedang)	16	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	1	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (baik+sedang)
		2	Rumah tangga Pengguna Air Bersih				
		3	Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi				



kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan	4	Persentase Perumahan Sehat	17	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	1	Rumah tangga Pengguna Air Bersih
	5					Persentase Rumah yang Layak Huni
	6	Persentase Rumah Tanga yang menggunakan Listrik (RUPTL PLN 2012-2012)			3	Persentase Rumah Tanga yang menggunakan Listrik (RUPTL PLN 2012-2012)
			18	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni serta Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan	1	Persentase Perumahan Sehat
						2

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2017, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.010 orang
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) 3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,5 60,5
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4) Angka usia harapan hidup 5) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 6) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 7) Prevalensi balita gizi buruk 8) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	69 240 22,2 <5% 0,5%
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	9) Angka Putus Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA	 0,53 0,72 0,96
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	10) Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 11) Angka rata-rata lama sekolah 12) AngkaPartisipasiMurni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C	 114,19% 97,56% 73,40% 7,35 tahun 99,5% 72,05% 56,2%
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	13) Luas penurunan kerusakan Hutan	1000 Ha



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	14) Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	5.780
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular strategis	15) Jumlah Populasi Ternak	47.450.951 ekor
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar	16) Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan	1.659.000 ton
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	17) Peningkatan Produksi Perikanan (ton) hasil kelautan dan perikanan	251.750,84 ton
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	18) Jumlah Produksi Pertanian	
		• Tanaman Pangan	
		a) Padi	1.570.400 ton
		b) Jagung	114.900 ton
		c) Kedelai	2.250 ton
		d) Kacang Tanah	1.030 ton
		e) Kacang Hijau	1.200 ton
		f) Ubi Kayu	167.000 ton
		g) Ubi Jalar	11.100 ton
		• Tanaman Hortikultura	
		a) Buah-Buahan	225.600 ton
		b) Sayur-Sayuran	54.100 ton
		c) Biofarmaka	10.350 ton
		d) Tanaman Hias	466.600 kg/tangkai/pohon
19) Nilai Tukar Petani	102,87		
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	20) Peningkatan Nilai Investasi	18,61 T
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	21) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,03
		22) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	350 KK
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	23) Nilai ekspor	2.075 juta US \$
		24) Neraca Perdagangan	400 US \$
		25) Angka Inflasi	4,75
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM	26) Persentase Koperasi Aktif	75 %
		27) Persentase Koperasi Berkualitas	20 %
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	28) Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	83,08%
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	29) Rumah tangga pengguna air bersih	54,65 %
		30) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,32 %
		31) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	82,4 %
18.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni serta Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan	32) Persentase Perumahan Sehat	39,77 %
		33) Persentase Rumah yang layak huni	85 %



Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang merupakan komitmen kinerja antara Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Pengukuran target kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.010 orang	2.065 orang	204%
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kestaraan Gender	2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,5	n/a	n/a
		3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,5	n/a	n/a
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4) Angka usia harapan hidup	69	n/a	n/a
		5) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	240	240	100%
		6) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	22,2	22,2	100%
		7) Prevalensi balita gizi buruk	<5%	6,5%	70%
		8) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	0,5	0,22	156%
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	9) Angka Putus Sekolah			
		a. SD/MI	0,53	0,19	164 %
		b. SMP/MTs	0,72	0,36	150 %
		c. SMA/MA	0,96	0,31	167,7%



**Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	10) Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		a. SD/MI/Paket A	114,19%	112,67%	101,35%
		b. SMP/MTs/Paket B	97,56%	97,15%	100,42%
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	73,40%	72,33%	101,48%
		11) Angka rata-rata lama sekolah	7,35 tahun	7,35 tahun	100%
		12) Angka Partisipasi Murni (APM)			
		a. SD/MI/Paket A	99,5%	99,66%	100,16%
		b. SMP/MTs/Paket B	72,05%	75,04%	104,15%
		56,2%	57,88%	102,99%	
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	13) Luas penurunan kerusakan Hutan	1000 Ha	1.160 Ha	116%
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	14) Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	5.780	766	186,75%
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	15) Jumlah Populasi Ternak	47.450.951 ekor	65.165.304 ekor	137%
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar	16) Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan	693.514 ton	1.464.246 ton	211%
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	17) Peningkatan Produksi Perikanan (ton) hasil kelautan dan perikanan	251.750,84 ton	240.294,37 ton	95,44%
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	18) Jumlah Produksi Pertanian			
		• Tanaman Pangan			
		a) Padi	1.570.400 ton	1.501.548 ton	95,62%
		b) Jagung	114.900 ton	138.497 ton	120,54%
		c) Kedelai	2.250 ton	837 ton	37,20%
		d) Kacang Tanah	1.030 ton	644 ton	62,52%
		e) Kacang Hijau	1.200 ton	1.375 ton	114,58%
		f) Ubi Kayu	167.000 ton	137.190 ton	82,15%
		g) Ubi Jalar	11.100 ton	10.380 ton	93,51%
		• Tanaman Hortikultura			
		a) Buah-Buahan	225.600 ton	263.070 ton	116,61%
		b) Sayur-Sayuran	54.100 ton	58.187 ton	107,55%
		c) Biofarmaka	10.350 ton	12.547 ton	121,23%
		d) Tanaman Hias	466.600 kg/tangkai/pohon	530.230 kg/tangkai/pohon	113,64%
19) Nilai Tukar Petani	102,87	97,89	95,16%		
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	20) Peningkatan Nilai Investasi	18,61 T	12,21 T	107,25%
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	21) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,03	0,96	93,20%
		22) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	350 KK	170 KK	48,75%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	23) Nilai ekspor	2.075 juta US \$	827,3 juta US \$	39,86%
		24) Neraca Perdagangan	400 US \$	558,23 US \$	139,55%
		25) Angka Inflasi	4,75	3,86	118,74%
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM	26) Persentase Koperasi Aktif	75 %	68,54 %	91,38 %
		27) Persentase Koperasi Berkualitas	20 %	17,46 %	87,3 %
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	28) Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	83,08%	83,54%	100,55%
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	29) Rumah tangga pengguna air bersih	54,65 %	54,60%	99,9%
		30) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,32 %	47,34%	100,04%
		31) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	82,4 %	82,21 %	99,76%
18.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni serta Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan	32) Persentase Perumahan Sehat	39,77 %	44,31%	113,12%
		33) Persentase Rumah yang layak huni	85 %	89,59%	105,4%

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 disajikan sebagai berikut:





1. Sasaran Strategis 1 Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.010 orang	2.065 orang	204 %

Indikator Sasaran Pembangunan urusan sosial di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 digambarkan melalui Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Capaian kondisi pada tahun 2017 adalah sebesar 2.065 jiwa PMKS yang telah menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Angka tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018.

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SasaranStrategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Terlayanidan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-Pemberdayaan Sosial -Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial -Perlindungan dan jaminan Sosial - Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Unit Pelayanan dan rehabilitasi Sosial)	2.907.294.640	2.886.775.270	99,29	204 %	104,71

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,29% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 204%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdayanya sebesar 104,71.

- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran strategis terlayani dan diberdayakan masyarakat miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pencapaian kinerjanya didukung oleh program Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Unit Rehabilitasi Sosial). Yang telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian kinerja sebesar 204 % melebihi target yang ditentukan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan target 2018

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017		
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.467 orang	2.065 orang	1.010 orang	204

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada pencapaian sasaran strategis terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) realisasi pada tahun 2017 mencapai 2.065 dengan tingkat kemajuan 204 %, hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi pada kegiatan pemulangan, pendampingan korban tindak kekerasan pekerja migrant internal sebanyak 1.185 orang.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Pemenuhan hak para penyandang disabilitas masih dirasa kurang belum menyentuh ke seluruh penjuru Provinsi. Terutama bagi para penyandang disabilitas yang berada di daerah pelosok.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat umum serta instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan penambahan alokasi anggaran serta kerjasama dengan pemerintah kab/kota untuk memenuhi hak para penyandang disabilitas



2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,5	n/a	n/a
		2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,5	n/a	n/a
Capaian Kinerja Sasaran 2					n/a

Dengan adanya metodologi penghitungan yang baru, interpretasi angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak lagi di perbandingkan dengan angka IPM. Angka IPG berdiri sendiri. Semakin besar angka IPG, dan mendekati nilai 100 (seratus) maka capaian Pembangunan Gender semakin baik. Nilai 100 memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara. Sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. IPG metode baru merupakan perbandingan rasio capaian IPM perempuan terhadap rasio capaian IPM Laki-laki.

Sebagai indeks komposit, IPG dan IDG memiliki komponen-komponen pembentuk yang menentukan yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, sumbangan pendapatan yang disajikan menurut jenis kelamin.

Untuk realisasi capaian kinerja IPG dan IDG Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 belum tersedia dikarenakan buku Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2017 akan dirilis setelah KPPPA melaksanakan Rakor, diperkirakan pada bulan Maret 2018 sehingga data IPG dan IDG akan di release pada triwulan II Tahun 2018.

• Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	Pengarusutamaan Gender	550.000.000	517.699.000	94,13	n/a	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,13% dan realisasi capaian kinerja belum tersedia maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat terukur.

• Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengarusutamaan Gender. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014, 2015 dan target 2018

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja 2013-2015 dan target 2018 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,61	n/a	n/a	68	n/a
		2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,44	n/a	n/a	61	n/a

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender di Kalimantan Barat dengan target yang ditetapkan pada 2017 adalah sebesar 66,2 pada tahun 2015 naik dengan cukup signifikan yang rata-rata pada kisaran angka 85% lebih. Dengan pencapaian terendahnya yaitu pada Kabupaten Melawi sebesar 79,80% dan Kota Pontianak yang tertinggi sebesar 93,08%. Adapun Jumlah Fokal Point Gender yang sebenarnya diharapkan naik dengan signifikan sesuai dengan perubahan struktur organisasi, hal ini justru tidak terlihat. Dari target yang ditetapkan sebesar 69 hanya terealisasi menjadi 70. Ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam usaha peningkatannya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Kesenjangan berbasis gender menjadi salah satu tantangan yang harus dijadikan fokus bagi agenda pembangunan di berbagai bidang. Hal ini karena tanpa upaya serius untuk menjawab persoalan ini, pencapaian tujuan dan target pembangunan bisa jadi akan terganggu atau menjadi lebih lambat karena ada kelompok yang lebih tidak punya akses dan manfaat terhadap Pembangunan
- Isu-isu gender juga tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah saja karena kontribusi dari berbagai pihak juga sangat penting

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Pemerintah perlu membangun sinergi yang kontinu dan efektif dengan berbagai pihak non negara untuk memastikan upaya-upaya pengurangan kesenjangan gender dalam pembangunan.
- Pengembangan strategi-strategi yang tepat untuk menjawab persoalan gender dengan mengembangkan model dan mendokumentasikan *best practices* upaya-upaya mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang.





3. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Angka usia harapan hidup	69	n/a	n/a
		2) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	240	240	100%
		3) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	22,2	22,2	100%
		4) Prevalensi balita gizi buruk	<5%	6,5%	70%
		5) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	0,5%	0.22%	156%
Capaian Kinerja Sasaran 3					n/a

Usia Harapan Hidup/*Life Expectancy*

Usia Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai usia x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia Harapan Hidup saat ini adalah rata-rata hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah, harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat serta turut berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data Usia Harapan Hidup Kalimantan Barat pada tahun 2017 masih belum tersedia dan belum di release oleh Badan Pusat Statistik.

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Informasi mengenai tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman, bebas resiko tinggi (Making Pregnancy Safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran yang semuanya bertujuan untuk mengurangi kasus kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Adapun penyebab kematian ibu melahirkan yang terjadi di Kalimantan Barat Tahun 2017 dominan disebabkan karena kasus-kasus perdarahan sebanyak 33 kasus (34,02%), hipertensi dalam kehamilan sebanyak 24 kasus (24,74%), infeksi sebanyak 4 kasus



(4,12%), gangguan sistem peredaran darah sebanyak 16 kasus (16,49%), gangguan metabolik sebanyak 1 kasus (1,03%) dan lain-lain sebanyak 19 kasus (19,59%).

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria dan empat terlalu (terlalu muda < 20 tahun, terlalu tua > 35 tahun, terlalu dekat jaraknya ≤ 2 tahun dan terlalu banyak anaknya lebih dari 3 tahun).

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif banyak namun belum tersebar merata keseluruhan wilayah Kalimantan Barat, kompetensi SDM masih ada yang belum memadai, Sarana prasarana masih belum semuanya memenuhi standar. Demikian juga PONEK dan RS PONEK belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB.

Cakupan Peserta KB yang tinggi merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi peluang untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang bersifat tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat segera bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dapat dibedakan menjadi dua factor yaitu faktor **endogen** atau yang umum disebut dengan kematian neonatal (kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang dapat diperoleh dari orangtuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan). Faktor kedua adalah **Eksogen** atau kematian post natal (kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar.

Penyebab kematian pada kelompok perinatal umumnya disebabkan oleh *Intra Uterie Fetal Death* (IUFD) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Hal ini menunjukkan kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan kedepan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan serta menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi.

Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pneumonia dan diare. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dengan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang

berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang mengarah dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil misalnya program pemberian pil besi (tablet Fe) dan suntikan anti tetanus. Sedangkan Angka Kematian Post Natal dan Angka Kematian Anak serta Kematian Balita dapat digunakan untuk pengembangan program imunisasi serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan terkait gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah usia 5 tahun.

Prevalensi Gizi buruk pada Balita

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya adalah bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, wanita usia subur kurang Energi Kronik (KEK). Status gizi merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk menilai status indikator derajat kesehatan masyarakat. Gizi buruk adalah suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Anak balita sehat atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umurnya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda klinis disebut marasmus atau kwashiorkor. Anak kurang gizi pada tingkat ringan dan atau sedang tidak selalu diikuti dengan gejala sakit.

Gambar 3.1



Tahun 2017 dari 14 kabupaten/kota terdapat kasus gizi buruk sebanyak 320 kasus dan kasus gizi buruk terbanyak berada di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebanyak 82 kasus, diikuti oleh Kabupaten Ketapang sebanyak 55 kasus dan Kabupaten sanggau 40 kasus. Dari semua kasus balita gizi buruk yang ada, seluruhnya mendapat perawatan sesuai prosedur tatalaksanaan gizi buruk.

Masalah gizi buruk kronis (*stunting*) yang dihadapi masyarakat saat ini semakin besar. Salah satu upaya penanganan untuk *stunting* yang telah dilakukan adalah pemantauan

gizi pada daerah-daerah dengan jumlah stunting tinggi melalui pemetaan kembali daerah yang sudah baik, belum baik, dan mana yang butuh perhatian khusus. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir. Namun stunting baru terlihat setelah anak berusia dua tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan menurunkan produktivitas. Stunting beresiko terjadi pada ibu hamil (bumil) yang mengalami anemia atau berkurangnya jumlah kandungan hemoglobin di dalam darah, Karena stunting dipengaruhi sejak dalam kandungan, maka Dinas Kesehatan saat ini fokus pada seribu hari pertama kehidupan (HPK).

Capaian Indikator Prevalensi Kasus HIV pada Usia 15-24 tahun

Prevalensi kasus HIV pada usia 15-24 tahun di tahun 2017 ini ditargetkan 0,22% dan realisasi capaiannya 0,22%. Sehingga untuk capaian kinerjanya mencapai 100%. Hal ini sejalan dengan Persentase penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV & AIDS yang mencapai 93,8% yang tentunya kedepan diharapkan mereka dapat meminimalisir resiko penularan terhadap orang lain. Prevalensi kasus pada usia 15-24 tahun sudah tercapai jika dibandingkan dengan target nasional 0,5% karena realisasi capaian dibawah target Nasional yakni 0,22% ini berarti kasus HIV pada usia tersebut di Kalimantan Barat masih relative kecil.

Usia 15-24 tahun merupakan usia remaja yang menjadi harapan bangsa kedepan, namun dalam kenyataannya paling banyak tertular HIV oleh karenanya pemerintah provinsi melalui kerja sama lintas sektoral dan lintas program sudah menggalang dan melakukan upaya pencegahan seperti memperbanyak penyuluhan atau sosialisasi, promosi dengan penyebaran leaflet, buklet dan poster baik melalui unit-unit pelayanan kesehatan, outlate-outlate yang dibentuk, media masa, elektronik, televisi dan jejaring sosial kemasyarakatan lainnya. Adanya kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya dalam upaya menekan terjadinya infeksi baru, jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Tahun 2017 ini di 14 Kabupaten Kota yang ada di Kalbar, sebagian besar remaja usia 15-24 tahun sudah mengetahui tentang HIV, cara penularannya, cara pencegahannya dan kegiatan/perilaku apa saja yang tidak menyebabkan/mengurangi resiko penularan, karena di tahun-tahun sebelumnya masih banyak paradigma/pemahaman yang keliru dari masyarakat luas dengan menganggap penularan HIV itu begitu mudah, sehingga dengan serta merta terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

Sebagai salah satu jenis penyakit IMS yang ditemukan di Provinsi Kalimantan Barat, HIV merupakan kasus IMS yang saat ini paling banyak mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat luas karena dampaknya yang bersifat kronis dan sampai saat ini belum ada obat yang bisa mematikan virusnya secara tuntas, dan pada kenyataannya sangat mempengaruhi keberlangsungan tatanan kehidupan kemasyarakatan dan saat ini Kalimantan Barat sudah membongkar gunung es yang kita ketahui bersama sebagai fenomena penularan HIV dan AIDS. Dewasa ini HIV dan AIDS telah menjadi epidemik yang menginfeksi ribuan penduduk Kalimantan Barat baik Pria, Wanita dan Anak-anak.

Penyebaran penyakit HIV/AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan, tetapi mempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, etnis, budaya, agama dan hukum, bahkan



dampak secara nyata cepat atau lambat menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Hal ini mengancam upaya daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Upaya Kesehatan Masyarakat • Pencegahan dan pengendalian penyakit	771.053.500,00	673.236.545,00	87,31	n/a	n/a
			576.943.000,00	523.878.356,00	90,8		
			56.985.000,00	48.247.700	84,7		
RATA-RATA					97,6	n/a	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,6 % dan realisasi capaian kinerja sasaran tersebut belum dapat diukur dikarenakan realisasi kinerja usia harapan hidup masih belum release oleh BPS Prov. Kalbar, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sementara belum dapat terukur.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menekan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB), Gizi Buruk dan mengurangi risiko menderita penyakit kronis/tidak menular dengan menekankan pemberian asupan makanan yang cukup mulai bayi berada di dalam kandungan ibu sampai bayi berusia 2 tahun (270 hari kehamilan dan 730 hari pertama setelah lahir). 1.000 HPK merupakan periode kritis pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh sehingga memerlukan asupan gizi yang baik. Akibat dari kekurangan asupan gizi pada periode ini memberikan dampak jangka panjang seperti stunting (tinggi badan anak di bawah dua tahun) dimana capaian prevalensi stunting tahun 2016 mencapai 34,9 persen, penurunan kemampuan kognitif (kecerdasan) dan risiko menderita penyakit kronis/tidak menular.

Pada penguatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui program Nusantara Sehat (NS) berbasis tim yang menempatkan tim tenaga kesehatan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Perubahan paradigma kesehatan merupakan salah satu program Indonesia Sehat selain penguatan pelayanan kesehatan (yankes) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berupaya menekan peningkatan penyakit tidak menular. Perubahan paradigma kesehatan dimaksud adalah perubahan pola dari kuratif dan rehabilitatif ke arah promotif dan preventif. Dalam hal ini, pada tahun 2017 telah dilaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017. Telah dilaksanakan penancangan GERMAS di tingkat provinsi maupun di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan target 2018

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
3.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	1) Angka usia harapan hidup	69,87	69,90	n/a	69,3	n/a
		2) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	240	240	240	220	91,6
		3) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	31	22,2	22,2	21	94,59
		4) Prevalensi balita gizi buruk	7,2%	6,7%	6,5%	6,5%	100
		5) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	0,23	0,21	0,22	0,21	95,45

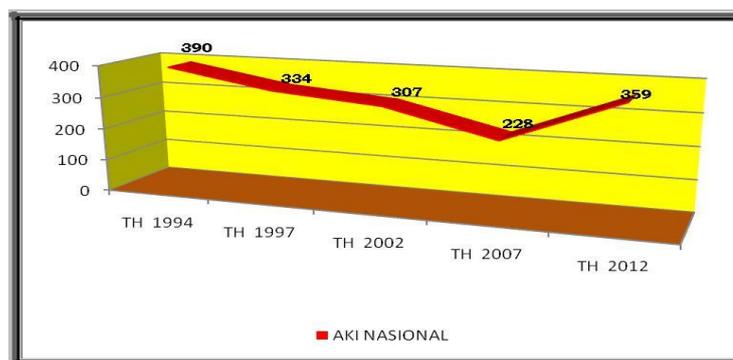
Indikator kinerja sasaran pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial bidang kesehatan terdiri dari usia harapan hidup, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, dan prevalensi balita gizi buruk.

Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata – rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2016 mencapai 69,90 meningkat 0,03 tahun bila dibandingkan kondisi tahun 2015 sebesar 69,87 Sementara itu, angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil riskesdas 2013 menunjukkan angka 240 kasus.

Indikator Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil SDKI 2012 menunjukkan angka 31 yang berarti per 1000 kelahiran hidup terdapat 31 kasus kematian bayi. Sedangkan pada tahun 2016 menurut data SUPAS 2015 terdapat 22 kasus kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

Sedangkan prevalensi balita gizi buruk menunjukkan penurunan. Angka Prevalensi Gizi Buruk pada tahun 2013 berdasarkan RISKESDAS menunjukkan angka 9,5%. Sedangkan hasil PSG pada tahun 2015 angka prevalensi balita gizi buruk mengalami perbaikan menjadi 7,2%. Pada tahun 2016 berdasarkan hasil PSG 2016, angka prevalensi balita gizi buruk lebih baik dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar 6,7%.

Gambar 3.2
Angka Kematian Ibu (AKI) Nasional Tahun 1994-2012



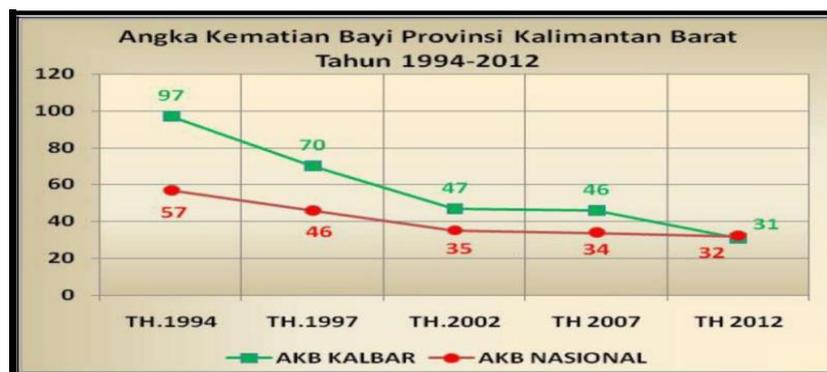
Sumber: SDKI 1994, 1997, 2002, 2007 dan 2012

Mengacu hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Angka kematian Ibu periode dua dasawarsa seperti terlihat pada Gambar 2.3 di atas, dimana Angka Kematian Ibu menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun, namun terjadi peningkatan kembali pada periode tahun 2007-2012.

Di lihat dari hasil Sensus penduduk Tahun 2010, Angka Kematian Ibu di Kalimantan Barat sebesar 240 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan nasional sebesar 259 per 100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini berarti bahwa Angka Kematian Ibu di Kalimantan Barat telah menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan dalam dua dasawarsa terakhir. Pada Tahun 2012 Angka Kematian Ibu di Kalimantan Barat berada di bawah angka nasional baik dibandingkan dengan hasil SDKI maupun hasil Sensus Penduduk.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kalimantan Barat Tahun 2012 berdasarkan laporan pendahuluan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 adalah 31 per 1.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) nasional adalah 32 per 1.000 Kelahiran Hidup. Hal ini menunjukkan penurunan yang signifikan di Kalimantan Barat dimana Angka Kematian Bayi (AKB) lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) nasional. Berturut-turut di Kalimantan Barat mulai tahun 1994 sebesar 97 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 70 per 1.000 Kelahiran Hidup ditahun 1997, turun lagi menjadi 47 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2002 dan kembali turun menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup ditahun 2007. Turun kembali menjadi 31 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan laporan pendahuluan SDKI 2012.

Gambar 3.3



Sumber : SDKI 1994; 1997; 2002-2003, 2007, Kalbar dalam Angka Th. 2008, SDKI 2012

Namun demikian, jika merujuk pada data profil kesehatan kabupaten/kota, terlihat bahwa kasus kematian bayi yang dilaporkan pada tahun 2016 adalah sebesar 653 kasus dengan 90.379 Kelahiran Hidup. Dengan demikian jika dihitung angka kematian bayinya adalah 7 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Prevalensi balita gizi buruk menunjukkan penurunan. Prevalensi Gizi Buruk pada tahun 2013 berdasarkan RISKESDAS menunjukkan angka 9,5 persen, sedangkan berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk mengalami perbaikan menjadi 7,2 persen. Pada tahun 2017 prevalensi balita gizi buruk lebih baik dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar 6,5 persen meskipun jika dibandingkan dengan target masih belum tercapai yaitu kurang dari 5 persen.

Gambar 3.4
Kasus Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2017



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Prov Kalbar

Untuk penanganan stunting dilakukan tidak hanya dengan memberikan makanan tambahan. Tapi juga dilakukan dengan faktor eksternal, misalnya perbaikan sanitasi, dan fasilitas air bersih.

Tabel 3.11
Distribusi Kasus HIV dan AIDS per Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

NO	Kabupaten/Kota	HIV (+)	AIDS
1.	Kota Pontianak	2.985	1647
2.	Kabupaten Mempawah	398	166
3.	Kota Singkawang	1747	791
4.	Kabupaten Sambas	250	189
5.	Kabupaten Bengkayang	71	51
6.	Kabupaten Landak	74	47
7.	Kabupaten Sanggau	271	106
8.	Kabupaten Sintang	433	292
9.	Kabupaten Kapuas Hulu	22	36
10.	Kabupaten Ketapang	199	153
11.	Kabupaten Sekadau	32	10
12.	Kabupaten Melawi	14	14
13.	Kabupaten Kayong Utara	3	1
14.	Kabupaten Kubu Raya	10	3
Jumlah		6.509	3.506



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Kesehatan memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat khususnya di Kalimantan Barat. Namun masyarakat kurang memahami pentingnya kesehatan karena kurangnya sosialisasi tentang kesehatan bagi masyarakat, sehingga masih berorientasi pada pengobatan (kuratif) dari pada pencegahan (preventif) belum meratanya akses pelayanan kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan khususnya pada masyarakat di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan. Selain itu belum tersedianya pemetaan upaya kesehatan ibu dan anak tingkat dasar sampai dengan rujukan, status gizi masyarakat termasuk ibu hamil dan balita, pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk sumber daya promosi kesehatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terampil.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menekan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB), Gizi Buruk dan mengurangi risiko menderita penyakit kronis/tidak menular dengan menekankan pemberian asupan makanan yang cukup mulai bayi berada di dalam kandungan ibu sampai bayi berusia 2 tahun (270 hari kehamilan dan 730 hari pertama setelah lahir). 1.000 HPK merupakan periode kritis pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh sehingga memerlukan asupan gizi yang baik. Akibat dari kekurangan asupan gizi pada periode ini memberikan dampak jangka panjang seperti stunting (tinggi badan anak di bawah dua tahun) dimana capaian prevalensi stunting tahun 2016 mencapai 34,9 persen, penurunan kemampuan kognitif (kecerdasan) dan risiko menderita penyakit kronis/tidak menular.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, AKI per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan angka 240 sedangkan AKB per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan angka 31, yang berarti per 1.000 kelahiran hidup terdapat 31 kasus kematian bayi. Sedangkan pada tahun 2016 menurut data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 terdapat 22 kasus kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.



4. **Sasaran Strategis 4** Terselenggaranya Manajemen Pendidikan yang Efektif dan Efisien

a. **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017**

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	1) Angka Putus Sekolah			
		a. SD/MI	0,53	0,19	164 %
		b. SMP/MTs	0,72	0,36	150 %
		d. SMA/MA	0,96	0,31	167,7%
Capaian Kinerja Sasaran 3					160,5%

Angka putus sekolah menunjukkan keadaan proporsi kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah tahun 2017 pada semua jenjang menunjukkan perkembangan yang positif jika dibandingkan kondisi tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan target indikator sasaran pembangunan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, Angka putus sekolah seluruh jenjang telah melampaui target yang ditetapkan. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2017 sebesar 0,19 persen turun sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,38 persen. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 0,53 persen. Angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2017 juga menunjukkan kondisi perkembangan positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,36 persen, menurun 0,27 poin dari tahun 2016 (0,63 persen). Angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 0,72 persen. Angka putus sekolah SMA/MA tahun 2017 sebesar 0,31 persen turun 0,70 poin dari kondisi tahun 2016 sebesar 1,01 persen. Kondisi ini sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 Prov. Kalbar, sebesar 0,96 persen.

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	Program Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan	160.634.000	156.483.800	97,42	160,5%	63,08

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,42 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 160,5 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 63,08 %.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan secara optimal dalam memberikan informasi mengenai suatu kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi



Kalimantan Barat guna mengetahui kendala-kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan program tersebut untuk segera diambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

yaitu

- Program Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yaitu kegiatan Monitoring pelaksanaan uji kompetensi guru
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yaitu Kegiatan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru,

d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja 2015-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
4.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	1) Angka Putus Sekolah					
		a. SD/MI	0,55	0,38	0,19	0,50	76,92%
		b. SMP/MTs	0,75	0,63	0,36	0,68	130,77%
		c. SMA/MA	0,96	1,01	0,31	0,92	135,29%

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Beberapa kasus memang terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Namun banyak faktor lain yang menjadi penjas putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau. Saat ini, kita juga dihadapkan pada fenomena meningkatnya putus sekolah pada anak karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak-anak. Kajian yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk menjawab akar persoalan dari angka putus sekolah ini.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Peran strategis yang dipegang oleh pemerintah propinsi adalah mengkoordinasikan program dan capaian kinerja antar kabupaten/ kota, termasuk untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah pada aspek pendidikan.
- Persoalan putus sekolah merupakan persoalan yang kompleks, karena bukan hanya terkait dengan urusan pendidikan saja. Karena itu, diperlukan kajian dan pengembangan strategi yang efektif untuk menjawab akar persoalan putus sekolah. Peran pemerintah bukanlah faktor tunggal namun menentukan karena



menjadi katalisator dan fasilitator atas peran berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

- Upaya pengembangan berbagai skema dukungan pendanaan pendidikan, seperti Pemberian bantuan pendidikan tepat sasaran, baik Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs maupun Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) pada jenjang SMA/MA serta SMK yang memberikan dampak bertambahnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni;

5. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	1) Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		a. SD/MI/Paket A	114,19%	112,67%	101,18%
		b. SMP/MTs/Paket B	97,56%	97,15%	99,58%
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	73,40%	72,33%	98,54%
		2) Angka rata-rata lama sekolah	7,35 tahun	7,35 tahun	100%
		3) Angka Partisipasi Murni (APM)			
		a. SD/MI/Paket A	99,5%	99,66%	100,16%
		b. SMP/MTs/Paket B	72,05%	75,04%	104,15%
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	56,2%	57,88%	102,99%
Capaian Kinerja Sasaran 5					100,94%

Berdasarkan tabel di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan diartikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD,SLTP,SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

APK SD/MI/Paket A mengalami peningkatan pada tahun 2017 berupa penurunan positif dari target 114,19 persen menjadi 112,67 persen. Penurunan ini berindikasi positif dimana semakin banyak siswa sekolah dasar yang bersekolah dengan rentang usia yang ditetapkan, yaitu (7-12 tahun). Artinya, semakin sedikit siswa yang masuk Sekolah Dasar dengan dibawah usia (7-12) tahun atau semakin sedikit siswa usia di atas 7-12 tahun yang masih duduk di Sekolah Dasar (tidak naik kelas).

Indikator pendidikan lainnya yang mempengaruhi tingkat capaian pendidikan adalah angka partisipasi murni (APM). Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga indikator daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai APM



menunjukkan semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2017 mencapai 99,66 persen lebih tinggi 0,21 persen dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 99,50 persen.

Selanjutnya, terjadi juga peningkatan terhadap APM SMP/ MTs dengan realisasi 75,04 yang melebihi target 72,05 sehingga capaian kinerjanya 104,15 persen. Selain itu, penurunan yang positif juga terjadi pada APK, yaitu 97,15 persen, dan realisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,56% sehingga capaian kinerja sebesar 99,58 persen. Peningkatan APM dan APK tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya SMP/MTs yang memiliki perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan menerapkan kurikulum 2013.

Tahun 2017, realisasi APM SMA/SMK/MA yang ditetapkan sebesar 56,20 persen, dengan realisasi baru mencapai 57,88 persen yang berarti capaian kinerjanya sebesar 102,99 persen. Akan tetapi capaian realisasi tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan APM, penurunan yang positif terjadi pada APK SMA/SMK/MA, yaitu 72,33 persen, target yang ditetapkan yaitu sebesar 73,40 sehingga capaian kinerja sebesar 98,54 persen. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	8.770.958.600	8.038.223.450	91,65	100,94	6,58
		Program Pendidikan Menengah	201.766.251.000	195.834.327.500	97,06		
		Rata-Rata			94,36		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,36% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,94%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 6,58.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Meningkatnya APK dan APM di SD/MI/Paket A karena adanya program pemerintah dalam mengentaskan buta aksara melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat dan pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan ruang perpustakaan untuk Sekolah Dasar. Peningkatan APM dan APK tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya SMP/MTs yang memiliki perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan menerapkan kurikulum 2013.



b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018

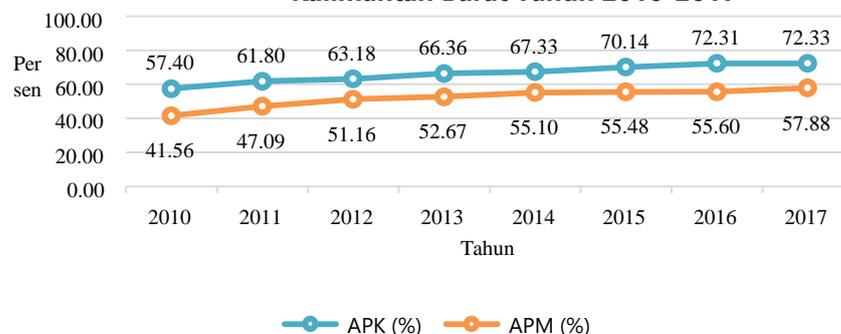
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	1) Angka Partisipasi Kasar (APK)					
		a. SD/MI/Paket A	116,76	114,74	112,67	113	0,99
		b. SMP/MTs/Paket B	94,24	96,25	97,15	98	0,99
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	70,14	72,31	72,33	74,95	0,97
		2) Angka rata-rata lama sekolah	7,24	7,28	7,35	7,48	0,98
		2) Angka Partisipasi Murni (APM)					
		a. SD/MI/Paket A	99,18	99,26	99,66	99,65	1
		b. SMP/MTs/Paket B	71,79	71,88	75,04	72,40	1,04
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	55,48	55,60	57,88	57,50	1,01

Berdasarkan tabel di atas, apabila dilihat dari capaian kinerja dalam tiga tahun terakhir, maka terlihat bahwa terjadi peningkatan yang baik terkait capaian Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI/Paket A, yaitu pada tahun 2015 sebesar 99,18 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 99,26 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 99,66 persen. Bahkan capaian tahun 2017 sudah melampaui target akhir RPJMD tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 96,60 persen. Hal yang sama juga terjadi pada capaian APM tingkat SMP/SMPT/MTs/Paket B, yaitu pada Tahun 2015 mencapai 70,79 persen dan meningkat hingga mencapai 71,88 persen pada Tahun 2016 dan kemudian mencapai 75,04 persen pada tahun 2017. Sementara itu target akhir RPJMD 2018 adalah sebesar 72,40 persen yang artinya telah dilampaui pada tahun 2017.

Rata-rata indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicapai selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan yang positif, bahkan terdapat sejumlah capaian IKU yang telah melampaui target Tahun 2018, baik untuk tingkat SD/MI/SDLB/Paket A maupun pada Tingkat SMP/MTS/SMPLB.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Kasar dan Murni SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (data diolah)

Capaian realisasi kinerja tahun 2017 jika dibandingkan dengan target nasional juga menunjukkan prestasi yang positif, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan target Nasional Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	Target Nasional
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	1) Angka Partisipasi Kasar (APK)		
		a. SD/MI/Paket A	112,67%	67,87
		b. SMP/MTs/Paket B	97,15%	81,89
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	72,33%	82,15
		2) Angka rata-rata lama sekolah	7,35 tahun	-
		3) Angka Partisipasi Murni (APM)		
		a. SD/MI/Paket A	99,66%	82,88
		b. SMP/MTs/Paket B	75,04%	73,07
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	57,88%	69,49

Meningkatnya APM SMA/SMK/MA Paket C pada tahun 2017 sebesar 2,28 persen dibandingkan dengan tahun 2016 dari yang semula 55,60 persen meningkat menjadi 57,88 persen ternyata masih belum memenuhi target nasional yang ditetapkan sebesar 69,49 persen. Begitu pula halnya APK SMA/SMK/MA Paket C yang meningkat dari tahun 2016 sebesar 72,31 persen menjadi 72,33 persen pada tahun 2017, namun masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 82,15 persen.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Terbatasnya kewenangan Provinsi sesuai PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan Provinsi sangat terbatas dalam pembiayaan maupun Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, Laboratorium, disini dijelaskan Provinsi tidak dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan diatas, namun dengan adanya perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kewenangan Pendidikan Menengah ada di Provinsi dan pelaksanaannya efektif pada tahun 2017.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, Laboratorium, terutama bagi daerah yang belum mempunyai sekolah disertai penambahan jumlah guru yang layak mengajar dan bersertifikasi dan penempatan guru yang merata diseluruh wilayah Kalimantan Barat. Kemudian dengan telah diteruskannya kewenangan pendidikan menengah, maka kedepan perlu dilakukan pendataan ulang kondisi sekolah saat ini dan memperhitungkan daya serap sekolah untuk menerima lulusan SMP agar dapat melanjutkan pendidikan di jenjang SMA/SMK. Untuk beberapa capaian yang masih dibawah standar nasional, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota akan terus bersinergi dalam pelaksanaan program yang menjadi prioritas berikut pendanaannya.



6. Sasaran Strategis 6 Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	1) Luas penurunan kerusakan Hutan	1.000 Ha	1.160 Ha	116%

Indikator urusan kehutanan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat digambar melalui indikator Luas penurunan kerusakan hutan. Capaian tahun 2017 menunjukkan indikator luas penurunan kerusakan hutan seluas 1.160 ha atau melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 1.000 ha.

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	Program Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kerusakan Hutan	368.370.000	331.336.663	89,95	116%	30,88
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	131.630.000	114.725.900	87,16		
		Program Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	615.198.000	481.353.183	78,24		
RATA-RATA					85,12%	116%	30,88

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85,12% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 116%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 30,88.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berkurangnya luas kerusakan hutan didukung 3 program yaitu:

- ✓ Program Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kerusakan Hutan yang berdampak pada meningkatnya tertib peredaran hasil hutan, pengamanan hutan di Provinsi Kalimantan Barat dan meningkatnya pengendalian kerusakan hutan
- ✓ Program Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi Lainnya yang mengakibatkan meningkatnya pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya
- ✓ Program Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat Kalimantan Barat terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta terdistribusikannya bahan informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan sehingga terjadi penurunan jumlah hotspot setiap tahunnya.



b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	1) Luas penurunan kerusakan Hutan	580	490	1.160	1.000	136,73

Penurunan luas kerusakan hutan tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif, terjadi penurunan jumlah titik api penyebab kebakaran hutan dan luas kebakaran hutan jika dibanding tahun sebelumnya. Titik api penyebab kejadian kebakaran hutan turun sebesar 62,62 persen, dari jumlah titik api 1.022 titik di tahun 2016 menjadi 641 titik tahun 2017. Luas kebakaran hutan juga menunjukkan perkembangan positif, terjadi penurunan luas kebakaran hutan sebesar 24,67 persen, dari luas kebakaran 1.841,85 ha tahun 2016 menjadi 454,2 ha tahun 2017.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Luasnya jangkauan wilayah kerja (span of control) dan terbatasnya sumber daya manusia yang berkualifikasi, serta ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
2. Upaya meningkatkan produktifitas kawasan hutan kritis masih belum sebanding dengan laju degradasi sumberdaya hutan yang terjadi.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM kehutanan serta SDM masyarakat sekitar hutan terkait dengan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
2. Mengoptimalkan dukungan sumber daya aparatur dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kehutanan;
3. Untuk meningkatkan produktifitas lahan kritis telah ditempuh melalui rehabilitasi lahan kritis dengan melakukan penanaman kembali, pengembangan lokasi tanaman unggulan lokal, pembangunan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat, serta kegiatan perhutanan sosial melalui pembangunan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. Selain itu untuk mengurangi laju degradasi hutan dan lahan telah dilakukan aksi penanaman serentak melalui penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan pencanangan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun;



7. Sasaran Strategis 7 Menurunnya laju kerusakan lingkungan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	5.780	766	186,75%

Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2017 dari target sebesar 5.780 titik dan realisasinya sebesar 766 titik dengan capaian kinerja sebesar 186,75 %. Penurunan jumlah hotspot tersebut diakibatkan adanya meningkatnya pengendalian dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pemantauan titik panas (hotspot) serta dilaksanakannya Groundcheck kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut telah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap lintas batas, mewujudkan komitmen bersama dalam aksi daerah dalam penurunan titik panas sebesar 10% setiap tahun, menyediakan data, informasi, menetapkan daerah dan peta rawan kebakaran sebagai bahan untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran, menunjang kegiatan pencegahan dan lahan sehingga tidak berkembang menjadi suatu kebakaran tidak terkendali atau bahkan menjadi suatu bencana, peningkatan penegakan hukum dalam penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan sehingga terjadi penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	100.000.000	96.092.000	96,09	186,75%	95,63
		b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	50.000.000	49.531.000	99,06		
		c. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	615.198.000	481.353.183	78,24		
RATA-RATA					91,12%	186,75%	95,63

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,12% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 186,75%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 95,63.



• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang menunjang pada sasaran ini yaitu Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Kegiatan pemantauan titik panas (hotspot) yang dilakukan melalui satelit TERRA/AQUA (LAPAN), NPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) melalui situs Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian terlaksananya pemadaman secara dini (initial attack) terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan jarak pendek. hutan dan lahan jarak pendek. Menurunnya frekwensi kejadian kebakaran hutan dan lahan melalui upaya pemadaman api guna meminimalisir intensitas kebakaran hutan dan akumulasi asap di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Data hotspot hasil pemantauan berupa koordinat kemudian diolah dan di overlay dengan peta administrasi Kalimantan Barat dan didapatkan titik hotspot untuk setiap kecamatan. Berdasarkan data jumlah sebaran hotspot tersebut dibuatkan daftar rekapitulasi lokasi sebaran, jumlah hotspot di setiap Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2017 jumlah hotspot yang terdata sebanyak 766 titik panas (*hotspot*) untuk wilayah Kalimantan Barat.

b. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018**

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	7.854	1525	766	5665	186

Terjadi penurunan jumlah titik api penyebab kebakaran hutan dan luas kebakaran hutan jika dibanding tahun sebelumnya. Titik api penyebab kejadian kebakaran hutan turun sebesar 62,62 persen, dari jumlah titik api 1.525 titik di tahun 2016 menjadi 766 titik tahun 2017.

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- ✓ Rendahnya pengelolaan hutan lindung dan kawasan konservasi lainnya
- ✓ Rendahnya kesadaran masyarakat Kalimantan Barat terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- ✓ Lamanya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- ✓ Deteksi sebaran titik api masih rendah

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi insitu dan eksitu pada unit manajemendi Kabupaten Sambas, Mempawah, Bengkayang, Sekadau dan Kubu Raya.
- ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat Kalimantan Barat terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta terdistribusikannya bahan informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (leaflet, booklet, spanduk dan banner)
- ✓ Meningkatkan informasi dini dan antisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
- ✓ Terdeteksinya sebaran titik api di lapangan dalam upaya antisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan pada 14 Kabupaten/Kota berdasarkan data dari pengindraan jarak jauh melalui satelite NOAA yang disampaikan melalui posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat
- ✓ Melakukan pemadaman secara dini (initial attack) terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan jarak pendek

8. Sasaran Strategis 8 Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular strategis

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sasaran Strategis 8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	Jumlah Populasi Ternak	47.450.951 ekor	65.165.304 ekor	137%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Populasi Ternak:

Jumlah populasi ternak menunjukkan tren meningkat hampir semua jenis ternak kecuali Babi dan Ayam Ras Pedaging. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- Populasi sapi potong terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 4,98%. Pertumbuhan tertinggi dari tahun 2013 ke tahun 2014 yang mencapai 7,97% yaitu dari 140.204 ekor bertambah 11.172 ekor menjadi 151.376 ekor.
- Populasi Sapi perah dari tahun 2013-2017 terus menurun dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 15,74%. Penurunan tertinggi dari tahun 2013 ke tahun 2014 dengan penurunan sebesar 71,01% yaitu sebesar 120 ekor.
- Populasi kambing pada tahun 2013-2017 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,71%. Sempat mengalami penurunan yang sangat besar dari tahun 2013 ke tahun 2014 dengan penurunan sebesar 11,54% atau menurunnya



populasi dari 167.471 ekor menjadi 158.152 ekor atau menurun sebanyak 19.318 ekor. Di tahun berikut, populasi kambing kembali meningkat, dengan peningkatan tertinggi dari tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu sebesar 16,73%, yaitu penambahan populasi sebanyak 26.202 ekor.

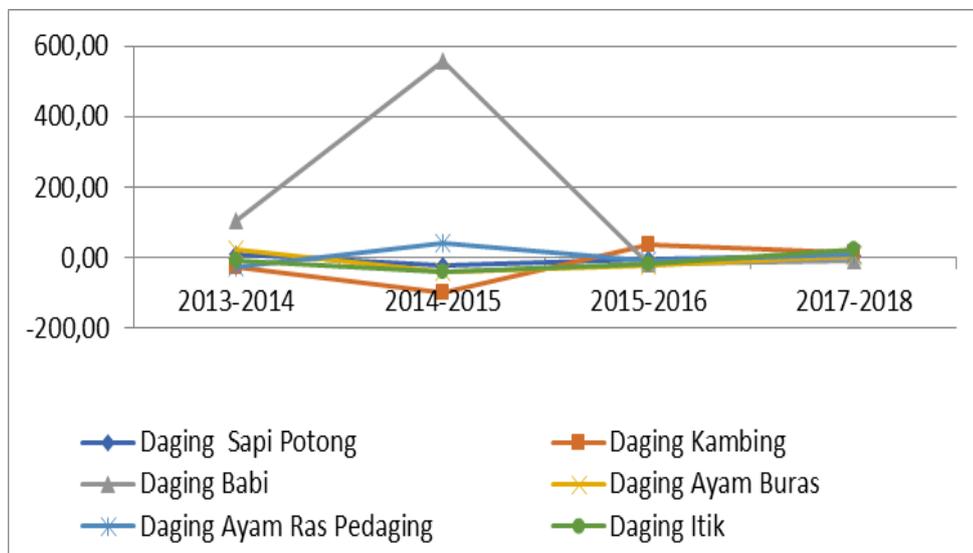
- Pada periode 2013-2017, populasi domba menurun dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 4,98%. Penurunan tertinggi di tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 51,98%, yaitu menurunnya populasi sebanyak 118 ekor dari 227 ekor domba yang ada. Di tahun-tahun berikutnya, mengalami peningkatan populasi yang tidak signifikan, utamanya disebabkan kelahiran dari Domba yang ada. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016-2017, yang bertambah sebanyak 25 ekor, meningkatkan penambahan 20,66% populasi domba.
- Pertumbuhan populasi babi rata-rata per tahun adalah sebesar 7,66%. Pertumbuhan tertinggi di tahun 2013-2014 yaitu sebesar 29,06% atau penambahan 20.178 ekor babi dari populasi tahun sebelumnya sebanyak 413.508 ekor. Babi yang merupakan ternak yang bersifat multipara yakni ternak babi sekali melahirkan bisa sampai 13 ekor berpotensi mendorong populasi secara alami melalui kelahiran.
- Populasi ayam buras pada tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,57%. Pada tahun 2013-2014, ternak ayam buras mengalami penurunan populasi yang sangat tinggi sebesar 40,04%, dan kemudian di tahun berikutnya (2014-2015) kembali meningkatkan dengan pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 45,55%. Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan populasi relatif sama di setiap tahunnya.
- Pada tahun 2013-2017, populasi ayam ras petelur meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,97%. Peningkatan tertinggi di tahun 2013-2014 dengan pertumbuhan 36,66%, dan menurun di tahun 2014-2015 sebesar 25,35%. Penurunan kembali terjadi di tahun 2015-2016 dengan penurunan sebesar 6,97% dan meningkat kembali di tahun 2016-2017 dengan peningkatan populasi sebesar 7,52%.
- Pertumbuhan rata-rata tertinggi populasi ternak pada tahun 2013-2017 adalah ternak ayam ras pedaging, yaitu sebesar 55,72%, dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2013-2014 yaitu sebesar 167,36% atau penambahan populasi sebanyak 20.996.667 ekor. Pertumbuhan terendah di tahun 2016-2017 dengan penambahan populasi sebanyak 1.629.765 ekor dari 53.309.630 ekor (peningkatan 3,06%).
- Itik yang bukan merupakan jenis ternak utama dikembangkan di Kalimantan Barat mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 1,57%. Penurunan tertinggi di tahun 2015-2016 yaitu sebesar 6,12% dan meningkat di tahun 2016-2017 dengan peningkatan populasi sebesar 5,81%.

Capaian Kinerja Produksi Ternak:

1. Capaian kinerja untuk produksi daging sapi potong pada tahun ini mencapai 72,45% dari target 7.833 ton dan realisasi 5.675 ton.
2. Capaian peningkatan produksi daging kerbau menunjukkan realisasi yang tinggi, yaitu mencapai 119,64%, dari 55 ton yang ditargetkan, atau dengan realisasi produksi mencapai 66 ton.

3. Realisasi produksi daging kambing mencapai 135% dari target 297 ton dan realisasi 401 ton.
4. Pencapaian realisa produksi daging babi tahun 2017 hanya mencapai 53,88%. Dari target 30.020 ton daging sapi yang diproduksi, realisasi hanya sebesar 16.176 ton.
5. Pencapaian produksi daging ayam buras sangat rendah yaitu sebesar 41,57%. Dari target 9.379 ton, realisasi produksi hanya mencapai 3.899 ton.
6. Pencapaian produksi daging ayam ras pedaging sangat tinggi yaitu mencapai 135,26%. Dari target 33.294 ton, realisasi produksi mencapai 45.034 ton.
7. Realisasi produksi daging ayam petelur pada tahun 2017 hanya sebear 68,96%. Dari target 3.769 ton, tercapai hanya sebear 2.599 ton.
8. Produksi daging itik ditargetkan sebeasr 518 ton hanya terealisasi sebanyak 272 ton atau pencapaian sebear 52,53%.
9. Untuk produksi daging itik manila juga menunjukkan rendahnya realisasi yang hanya mencapai 27,23% dari target 25 ton, realisasi hanya sebanyak 7 ton.

Gambar 3.6 Pertumbuhan Produksi Daging ternak tahun 2013-2017



Capaian Kinerja Pendapatan dan Kesejahteraan Peternak:

Dari target Jumlah Pendapatan Peternak dari Sub Sektor Peternakan tahun 2017 sebesar Rp20.000.000,- realisasi mencapai Rp21.336.270,- atau tingkat capaian sebesar 106,68%. Tingginya realisasi Jumlah Pendapatan Peternak dari Sub Sektor Peternakan di tahun 2017 lebih didorong oleh peningkatan harga produk peternakan tahun 2017 dibandingkan peningkatan produksi peternakan di Kalimantan Barat. Peternak cukup mendapatkan margin usaha ternak yang signifikan dengan kondisi makro di daerah maupun di tingkat nasional.

Gambar 3.7 Pertumbuhan pendapatan peternak

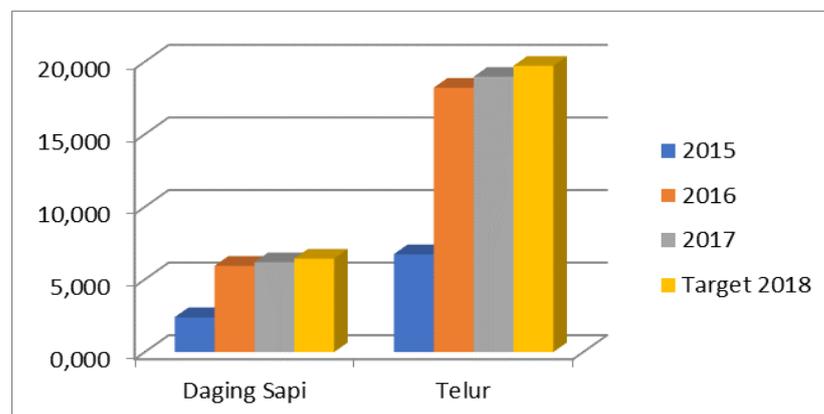


Capaian Kinerja Konsumsi Produk Peternakan:

Dengan target konsumsi di tahun 2018, maka realisasi pencapaian target tahun 2018 relatif dapat dicapai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Konsumsi daging sapi tahun 2017 ditargetkan sebesar 5,667 gram/kapita/hari. Dengan realisasi konsumsi daging sapi sebesar 6,188 gram/kapita/hari, maka capaian kinerja untuk konsumsi daging sapi sebesar 109,19%. Peningkatan konsumsi daging sapi didorong dengan meningkatnya pengolahan hasil daging sapi yang membantu keterjangkauan masyarakat untuk mengonsumsi pangan asal hewan (PAH). Beragamnya produk olahan daging sapi menjadi solusi untuk meningkatkan konsumsi daging sapi di masyarakat.
- 2) Konsumsi telur tahun 2017 ditargetkan sebesar 3,262 gram/kapita/hari. Dengan realisasi konsumsi telur sebesar 18,963 gram/kapita/hari, maka capaian kinerja untuk konsumsi daging sapi sebesar 581,32%. Tingginya konsumsi telur merupakan dampak semakin tingginya harga pangan Asal Hewan seperti daging sapi, sehingga pemilihan sumber protein yang berasal dari hewan yang murah, mudah dijangkau dan tersedia dimanapun dan kapanpun, menyebabkan telur menjadi sumber protein alternatif yang paling utama.

Gambar 3.8 Realisasi Konsumsi daging sapi dan telur tahun 2015-2017 dibandingkan target tahun 2018.





Capaian Kinerja Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis:

Kondisi pengendalian penyakit hewan Menular Strategis di Kalimantan Barat pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Penyakit Avian Influenza bebas kasus sesuai dengan target pembebasan di tahun 2017 atau pencapaian sebesar 100%.
- Penyakit Brucellosis bebas kasus sesuai dengan target pembebasan di tahun 2017 atau pencapaian sebesar 100%.
- Penyakit Hog Cholera bebas kasus sesuai dengan target pembebasan di tahun 2017 atau pencapaian sebesar 100%.
- Penyakit parasiter bebas kasus sesuai dengan target pembebasan di tahun 2017 atau pencapaian sebesar 100%.

Penyakit Rabies terkendali sesuai dengan target pengendalian di tahun 2017 atau pencapaian sebesar 100%. Hanya penyebaran di tahun 2016 pada 1 kabupaten/kabupaten yaitu kabupaten/kabupaten ketapang dengan 17 kasus, dan di tahun 2017 lokasi penyebaran penyakit di 9 kabupaten yaitu: Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Kubu Raya dan Kayong Utara, dengan jumlah kasus gigitan 34 kasus. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2017, penyebarannya dapat dikendalikan.

• Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.26 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	6.269.787.250	5.871.490.866	93,65	131%	51,07
		Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (TP APBN-Satker 139128)	10.110.347.000	7.221.842.942	71,43		
Rata-Rata			16.380.134.250	13.093.333.808	79,93	131%	51,07

Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 79,93% dan realisasi capaian kinerja sebesar 131%, maka diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 51,07. Hal ini dikarenakan peningkatan harga produk peternakan tahun 2017.

• Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Capaian kinerja untuk populasi ternak sapi potong pada tahun ini mencapai 101,91% dari target 166.990 ekor dan realisasi 170.174 ekor. Realisasi ini lebih tinggi dibanding dengan target dikarenakan adanya kegiatan yang berupa pembinaan kepada petani dan dukungan dana dari pemerintah berupa bantuan ternak.



2. Capaian peningkatan populasi ternak sapi perah mencapai 81,13% dari target 54 ekor dan realisasi 52 ekor. Realisasi ini lebih rendah dibanding target disebabkan komoditas sapi perah belum menjadi komoditas utama di Kalimantan Barat.
3. Populasi Kerbau pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 3.549 ekor, dengan realisasi 2.852 ekor atau pencapaian 80,36%. Penurunan populasi tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang.
4. Capaian peningkatan populasi ternak kambing mencapai 100,78% dari target 181.416 ekor dan realisasi 182.833 ekor. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana pada kegiatan Pengembangan ternak didaerah pedesaan/ perbatasan/ pesisir/kepulauan dan Peningkatan Ekonomi Kambing perdesaan berbasis kerakyatan berupa pengadaan kambing
5. Capaian peningkatan populasi ternak Domba mencapai 317,39% dari target target 46 ekor dengan realisasi 146 ekor. Tingginya realisasi dari target yang ditetapkan lebih didukung oleh kelahiran dari ternak yang ada, bukan dari pemasukan domba dari luar daerah.
6. Capaian peningkatan populasi ternak Babi tahun ini sebesar 87,49%. Dari target 617.807 ekor, realisasi hanya mencapai 540.524 ekor. Ternak babi merupakan ternak yang lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat karena budaya dan untuk tujuan konsumsi, sehingga menyebabkan perdagangan dan pemotongan tak tercatat masih sangat tinggi.
7. Pencapaian populasi ayam buras pada tahun 2017 sebesar 120,98% dari target 5.120.170 ekor dan realisasi mencapai 6.194.202 ekor. Tingginya realisasi populasi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pemasukan ternak dari luar daerah dan tingginya minat masyarakat untuk mengembangkannya.
8. Capaian peningkatan populasi ternak ayam ras petelur tahun 2017 mencapai 59,28% dari target 4.740.899 ekor dan realisasi 2.526.367 ekor. Rendahnya realisasi populasi ternak ayam ras petelur disebabkan karena beberapa pelaku usaha mengurangi populasi ayam afkir secara besar-besaran. Tindakan tersebut juga dilakukan untuk menstabilkan harga telur.
9. Capaian peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging tahun 2017 ini mencapai 152,09% dengan realisasi 54.939.395 ekor dari target 36.121.772 ekor. Tingginya realisasi populasi ini karena penambahan perusahaan *breeding* di Kalimantan Barat dan adanya dukungan dana dari pemerintah kepada kelompok ayam ras pedaging berupa pengadaan ayam broiler pada kegiatan Pengembangan ternak didaerah pedesaan/Perbatasan/ Pesisir/kepulauan.
10. Realisasi itik pada tahun 2017 mencapai 61,95%, dari target 931.372 populasi itik hanya mencapai 576.960 ekor. Pemasukan ternak dari luar daerah tidak terlalu tinggi, pada tahun 2017 dukungan pengadaan melalui kegiatan Pengembangan ternak didaerah pedesaan/Perbatasan/ Pesisir/kepulauan.
11. Realisasi populasi ternak Itik Manila mencapai 69,45%. Dari target 45.785 ekor, realisasi populasi hanya 31.799 ekor. Itik manila bukan menjadi komoditas utama, jumlah yang ada di masyarakat merupakan populasi yang tersedia di tahun 2016. Tidak terdapat penambahan karena kelahiran dan pemasukan ternak dari luar Kalimantan Barat.



b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017 Dan Target Jangka Menengah

Tabel 3.27 Perbandingan Kinerja Tahun 2015-2017 dan Target 2018 Sasaran Strategis 8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	Jumlah Populasi Ternak	54.395.853 ekor	62.949.154 ekor	65.165.340 ekor	49.201.951 ekor	132,37

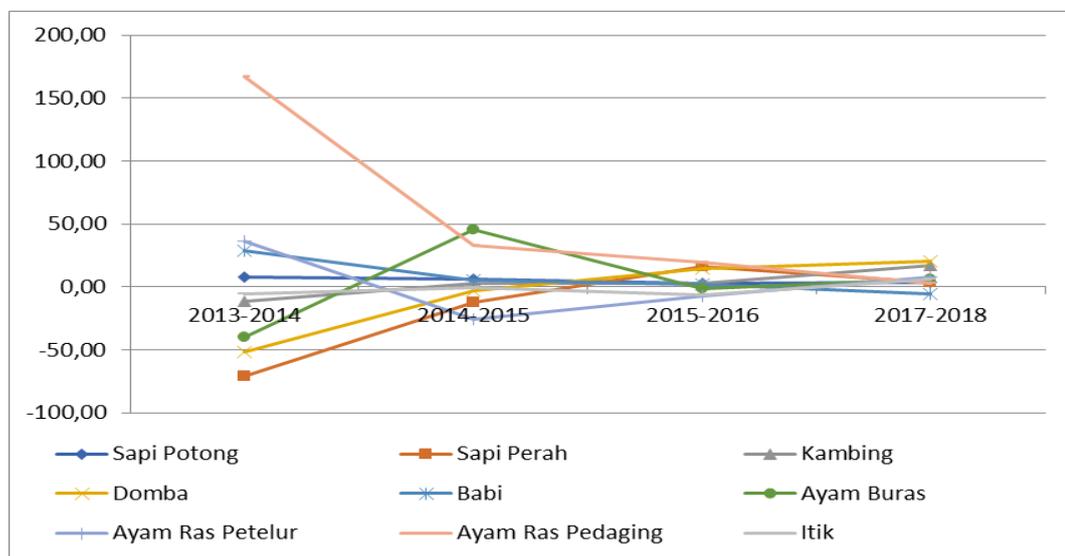
Jumlah populasi ternak menunjukkan tren meningkat hampir semua jenis ternak kecuali Babi dan Ayam Ras Pedaging.

Tabel 3.28 Pertumbuhan Populasi ternak tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak	peningkatan/penurunan (ekor)				Pertumbuhan/Penurunan (%)				
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Rata-Rata
1	Sapi Potong	11.172	8.642	4.095	6.061	7,97	5,71	2,56	3,69	4,98
2	Sapi Perah	-120	-6	7	2	-71,01	-12,24	16,28	4,00	-15,74
3	Kambing	-19.318	4.215	4.263	26.202	-11,54	2,85	2,80	16,73	2,71
4	Domba	-118	-3	15	25	-51,98	-2,75	14,15	20,66	-4,98
5	Babi	120.178	26.880	10.148	-30.190	29,06	5,04	1,81	-5,29	7,66
6	Ayam Buras	-2.714.092	1.851.539	-63.181	341.286	-40,04	45,55	-1,07	5,83	2,57
7	Ayam Ras Petelur	907.616	-857.520	-176.105	176.686	36,66	-25,35	-6,97	7,52	2,97
8	Ayam Ras Pedaging	20.996.667	10.957.383	8.809.589	1.629.765	167,36	32,67	19,80	3,06	55,72
9	Itik	-35.085	-1.568	-35.530	31.662	-5,68	-0,27	-6,12	5,81	-1,57

Untuk melihat perbandingan pertumbuhan ternak di Kalimantan Barat, dapat dilihat dari grafik pada Gambar berikut:

Gambar 3.9 Pertumbuhan Populasi ternak tahun 2013-2017





Dengan pola pertumbuhan/penurunan pencapaian target indikator di tahun 2015-2017 maka estimasi pencapaian target sasaran menunjukkan peluang tercapainya target yang ditetapkan.

1) Target Populasi ternak tahun 2018 dan peluang pencapaian target sebagai berikut:

- Populasi ternak sapi potong dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 3,13%, maka potensi penambahan populasi ternak sapi tahun 2018 sebanyak 175.494 ekor. Dengan target 171.165 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak sapi potong mencapai 102,53%.
- Populasi ternak sapi perah dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 10,14%, maka potensi penambahan populasi ternak sapi tahun 2018 sebanyak 57 ekor. Dengan target 55 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak sapi perah mencapai 104,13%.
- Populasi ternak kambing dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 9,76%, maka potensi penambahan populasi ternak tahun 2018 sebanyak 200.683 ekor. Dengan target 195.929 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak kambing mencapai 102,43%.
- Populasi ternak Domba dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 17,41%, maka potensi penambahan populasi ternak sebanyak 171 ekor. Dengan target 47 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak domba mencapai 364,71%.
- Populasi ternak Babi dengan tren rata-rata penurunan 2015-2017 sebesar 1,74%, maka populasi ternak babi sebanyak 531.120 ekor dan dengan target 648.697 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak babi mencapai 81,87 %. Jika pertumbuhan babi di tahun 2018 dapat dijaga pada level 20,01%, maka target populasi ternak babi dapat tercapai.
- Populasi ternak ayam buras dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 2,38%, maka populasi ternak sebanyak 6.31.720 ekor, dan dengan target 5.529.784 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak ayam buras mencapai 114,68 %.
- Populasi ternak ayam ras petelur dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 0,27%, maka populasi ternak sebanyak ekor dan dengan target 2.533.280 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak ayam ras petelur mencapai 55,04 %. Untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka pertumbuhan ayam ras petelur diupayakan minimal sebesar 82,20%.
- Populasi ternak ayam ras pedaging dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 11,43%, maka populasi ternak pada tahun 2018 sebanyak 61.217.314 ekor dan dengan target 37.024.816 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging mencapai 165,34%.
- Populasi ternak itik dengan tren rata-rata penurunan 2015-2017 sebesar 0,16%, maka populasi ternak pada tahun 2018 hanya sebesar 576.064 ekor dan dengan target 1.024.870 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak itik mencapai 56,21%. Target 2018 dapat dicapai jika pertumbuhan populasi itik dipertahankan sebesar 77,63%.

Untuk melihat peluang atau kesenjangan target dengan potensi realisasi populasi ternak tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.10 Potensi pencapaian target populasi ternak tahun 2018

Jenis Ternak	Peningkatan/ Pengurangan (Ekor)		Pertumbuhan/Penurunan (%)			Estimasi 2018 (ekor)	Target 2018 (Ekor)	Estimasi Capaian (%)
	2015-2016	2016-2017	2015-2016	2016-2017	Rata-Rata			
Sapi Potong	4.095	6.061	2,56	3,69	3,13	175.494	171.165	102,53
Sapi Perah	7	2	16,28	4,00	10,14	57	55	104,13
Kambing	4.263	26.202	2,80	16,73	9,76	200.683	195.929	102,43
Domba	15	25	14,15	20,66	17,41	171	47	364,71
Babi	10.148	-30.190	1,81	-5,29	-1,74	531.120	648.697	81,87
Ayam Buras	-63.181	341.286	-1,07	5,83	2,38	6.341.720	5.529.784	114,68
Ayam Ras Petelur	-176.105	176.686	-6,97	7,52	0,27	2.533.280	4.602.950	55,04
Ayam Ras Pedaging	8.809.589	1.629.765	19,80	3,06	11,43	61.217.314	37.024.816	165,34
Itik	-35.530	31.662	-6,12	5,81	-0,16	576.064	1.024.870	56,21

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini yakni :

1. Rendahnya kapasitas produksi peternak dan pola pengembangan ternak yang masih tradisional. Kegiatan produksi belum berorientasi agribisnis dan dikembangkan hanya sebagai usaha sampingan dengan kegiatan produksi pertanian lainnya seperti tanaman pangan dan perkebunan.
2. Kurangnya keterampilan melakukan aktivitas peternakan, sehingga sulit mendorong peningkatan populasi dan produksi. Untuk sapi dan kerbau, sebagian besar peternak masih mengembangkan ternak dengan pola ekstensif dan semi intensif. Pola ternak tersebut, menghambat percepatan peningkatan populasi dan produksi melalui UPSUS SIWAB.
3. Keterbatasan SDM Teknis seperti Inseminator dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) untuk memantau kebuntingan dan kelahiran ternak, dimana melalui UPSUS SIWAB cukup membantu meningkatkan populasi dan produksi ternak, khususnya ruminansia (sapi/kerbau) melalui proses inseminasi.
4. Sebaran peternak yang sangat besar, mempersulit jangkauan pelayanan dan pendampingan usaha peternakan masyarakat. Sedangkan SDM yang tersedia di kabupaten/kota sangat terbatas.
5. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana, serta infrastruktur untuk meningkatkan akses pelayanan dan pendampingan peningkatan populasi dan produksi ternak oleh masyarakat.



Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang ada yakni:

1. Mendorong meningkatkannya kapasitas kelembagaan kelompok ternak yang ada dan telah berkembang melalui pendampingan teknis, peningkatan wawasan dan keterampilan peternak. Mendorong peternak untuk meningkatkan akses permodalan dan akses informasi pasar sebagai tregger usaha ternak oleh masyarakat.
2. Meningkatkan target Introduksi Inseminasi Buatan pada UPSUS SIWAB diharapkan signifikan meningkatkan kebuntingan dan kelahiran pada ternak yang dikembangkan secara ekstensif dan semi intensif.
3. Mendorong pengembangan kawasan peternakan yang mengintegrasikan potensi lahan HPT, dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur pertanian dan konsentrasi populasi ternak dan peternak. Pemetaan kawasan peternakan juga memperhitungkan kebutuhan dukungan SDM Teknis seperti penyuluh peternakan, inseminator, petugas PKB dan ATR.

9. Sasaran Strategis 9 Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 9

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	693.514 ton	1.464.246 ton	211%

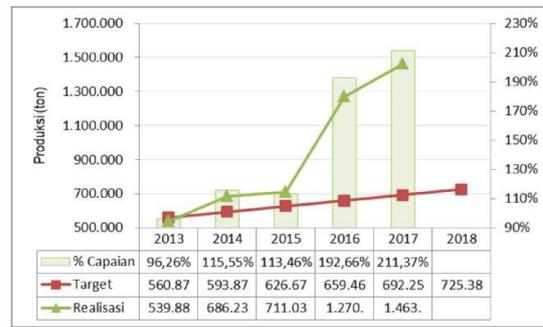
Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja jumlah produksi perkebunan tahun 2017 adalah sebesar 211% dan memenuhi target kinerja daerah. Secara keseluruhan capaian produksi dan produktivitas tanaman perkebunan besar sangat tinggi, begitu juga capaian per komoditas hampir semuanya masuk dalam kategori sangat tinggi, kecuali produksi dan produktivitas kakao masuk dalam kategori tinggi. Prestasi ini didukung oleh beberapa faktor yaitu semakin besarnya komposisi luas tanaman menghasilkan yang masuk dalam usia puncak produksi, peningkatan perawatan kebun, perbaikan penanganan panen dan pasca panen dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Realisasi produktivitas tanaman perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 secara keseluruhan melebihi target yang ditetapkan. Prestasi ini didukung oleh adanya penambahan alat-alat pengolahan pada beberapa sentra produksi, penambahan luas areal produktif (tanaman menghasilkan) terutama kelapa sawit dan karet rakyat, peningkatan perawatan kebun, perbaikan penanganan panen dan pasca panen, meningkatnya pemahaman sebagian petani dalam memelihara kebun dan meningkatnya penggunaan benih unggul oleh petani.

Akan tetapi produktivitas perkebunan masih berada di bawah standar produktivitas rata-rata nasional, yaitu sebesar 54,50% masuk dalam kategori rendah. Dari lima komoditi tersebut di atas capaian paling tinggi adalah produktivitas kelapa sebesar 72,60% masuk dalam kategori sedang.



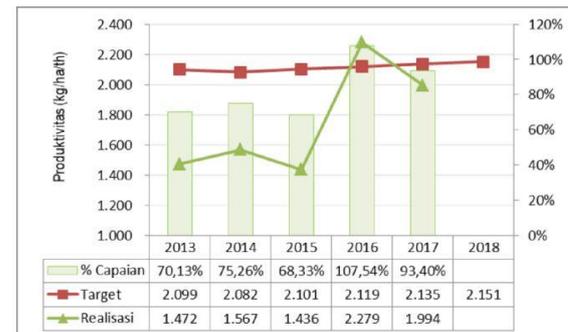
Gambar 3.11. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Produksi Perkebunan Besar Karet



Gambar 3.12 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Produksi Perkebunan Besar Kelapa Sawit



Gambar 3.13. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Produktivitas Perkebunan Besar Karet



Gambar 3.14. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Produktivitas Perkebunan Besar Kelapa Sawit

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar	1. Program dukungan peningkatan investasi perkebunan	803.476.000	686.196.170	85,40	211%	122,87
		2. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Produksi dan Produktivitas Serta Mutu Hasil Perkebunan (APBD)	15.925.102.000	14.469.102.000	90,86		
Rata-Rata					88,13%	211%	122,87

Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 85,40% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 211%, maka dapat diperoleh tingkatan efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 21,41%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

Perkembangan produksi perkebunan rakyat selama periode 2013-2017 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 total produksi perkebunan rakyat adalah sebesar 828.387 ton meningkat sebesar 36,92 persen menjadi 1.134.218 ton. Apabila dilihat dari target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 maka nilai produksi perkebunan rakyat tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 965.486 ton



• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perkebunan Besar” dengan indikator kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, diwujudkan melalui Program Dukungan Peningkatan Investasi Perkebunan dan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Produksi dan Produktivitas Serta Mutu Hasil Perkebunan (APBD) dengan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan kelas usaha perkebunan, berkurangnya kasus konflik perkebunan serta mendorong peningkatan *Community Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian/keberpihakan pelaku usaha dengan masyarakat sekitar.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 dan Target Jangka Menengah

Tabel 3.32 Perbandingan Kinerja Tahun 2015-2017 dengan target 2018 Sasaran Strategis 9

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	712.497	1.271.497	1.464.246	726.696	46,81

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2017 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya selalu mengalami kenaikan dan memenuhi target kinerja daerah dengan tingkat kemajuan 46,81%. Perkembangan produksi perkebunan besar selama periode 2013-2017 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 total produksi perkebunan besar adalah sebesar 1.271.497 ton meningkat menjadi 1.464.246 ton. Apabila dilihat dari target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 maka nilai produksi perkebunan besar tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 693.514 ton.

Sedangkan perkembangan produksi perkebunan rakyat selama periode 2013-2017 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 total produksi perkebunan rakyat adalah sebesar 828.387 ton meningkat sebesar 36,92 persen menjadi 1.134.218 ton. Apabila dilihat dari target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 maka nilai produksi perkebunan rakyat tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 965.486 ton.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini yaitu sebagai berikut:

1. Lahan marjinal dengan tingkat kesuburan yang rendah yang dominan di Kalbar dan agroklimat utamanya frekuensi curah hujan maupun kelembaban yang tinggi berpengaruh negative pada produksi komoditi tertentu
2. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), kekeringan dan banjir, kebakaran menyebabkan stagnasi pertumbuhan atau kematian individu atau populasi tanaman masih belum teratasi



3. Terbatasnya tenaga teknis serta personil yang kompeten untuk pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, pengawas benih, pengamat OPT, maupun pelayanan data statistik. Pada sisi lain petani juga terbatas dalam mengakses teknologi dan mengembangkan potensi sumberdayanya
4. Kinerja perkebunan besar yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagian masih rendah dimana realisasi penanaman masih rendah, pemenuhan kewajiban dan kepatuhan masih rendah, serta gangguan usaha dan konflik masih cukup tinggi
5. Keterbatasan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, kios saprodi) di sentra produksi perkebunan menghambat pengembangan produktivitas kebun

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kemitraan usaha di sentra-sentra perkebunan dengan menghadirkan mitra usaha yang potensial, handal dan terpercaya
2. Membangun UPH baru di sentra produksi perkebunan yang potensial, konsolidasi UPH yang belum operasional dan membenahi kelengkapan bahan dan peralatan panen di sentra-sentra perkebunan serta membangun standar mutu yang sama antar wilayah sentra sesuai permintaan pasar, sekaligus menyelenggarakan informasi harga pasar
3. Melakukan konsolidasi percepatan program pengembangan tanaman, peremajaan, maupun rehabilitasi, berkoordinasi dengan pihak terkait di pusat dan di kabupaten/kota
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan program/kegiatan perkebunan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan, serta memfasilitasi perpustakaan desa melalui penyebaran bulletin perkebunan maupun buku teknis perkebunan
5. Mengajukan penambahan tenaga teknis dan fungsional, serta meningkatkan kapasitas tenaga yang ada melalui pelatihan, bimtek maupun magang, serta bekerjasama dengan Badan Penyuluhan untuk mendayagunakan tenaga penyuluh dan balai penyuluhan
6. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengembangkan infrastruktur pada sentra produksi perkebunan dan akses pendanaan bagi perkebunan rakyat
7. Melakukan revitalisasi peran Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3 Provinsi/Kabupaten) dalam penyelesaian konflik perkebunan serta pengawasan kinerja perusahaan perkebunan sesuai kewenangan masing-masing di tingkat pusat/provinsi/kabupaten, serta melakukan evaluasi dan penindakan bagi perusahaan perkebunan besar yang melalaikan kewajibannya
8. Berperan aktif dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan mendorong peningkatan Community Social Responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian / keberpihakan pelaku usaha dengan masyarakat sekitar
9. Mengoptimalkan kinerja pencapaian sasaran program aksi pengembangan komoditi perkebunan unggulan sehingga memberikan kontribusi yang nyata dalam memacu peningkatan luas areal, produksi dan produktifitas usaha perkebunan



10. Sasaran Strategis 10 Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 10

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	Peningkatan Produksi Perikanan (ton) hasil kelautan dan perikanan	251.750,84 ton	240.294,37 ton	95,44

Sub Sektor Perikanan merupakan salah satu potensi dari Provinsi Kalimantan Barat. Selama empat tahun terakhir sektor perikanan sudah memberikan kontribusi baik. Pada tahun 2017, jumlah produksi perikanan didominasi dari perikanan tangkap sebesar 146.459,98 ton. Realisasi jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 mencapai 146.459,98 ton, atau sebesar 105 % dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 180.107,84 ton. Nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 masih belum mencapai target hal ini disebabkan oleh faktor sebagai berikut :

- ✓ Banyaknya kapal nelayan yang tidak melaut disebabkan adanya Permen KP no. Permen 71/Permen-KP/2016 tentang tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan API di WPP-NRI, yang mana alat tangkap trawl mini atau lampara dasar yang kebanyakan di pergunakan oleh nelayan pesisir pantai Kalimantan Barat tidak dapat beroperasi sedangkan penukaran alat penangkapan ikan pengganti yang ramah lingkungan belum terealisasi secara optimal;
- ✓ Adanya perubahan cuaca terutama tingginya gelombang yang mengakibatkan kapal tidak melaut terutama pada bulan oktober hingga desember.

Volume produksi Perikanan Budidaya (**ton**), dengan capaian sebesar 77.927,15 ton atau 91 % dari target sebesar 85.971 ton. Pada tahun 2017 capaian jumlah produksi perikanan budidaya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Adanya gagal panen bagi pembudidaya disebabkan adanya hama penyakit ikan adanya perubahan kondisi air akibat cuaca yang tidak menentu (extrim) sehingga menyebabkan kondisi air tidak stabil sehingga banyak ikan yang mati bagi pembudidaya ikan yang menggunakan aliran sungai.
- ✓ Masih kurangnya tenaga penyuluh perikanan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat juga menyebabkan belum berkembangnya potensi budidaya perikanan padahal potensinya sangat besar khususnya untuk budidaya laut;
- ✓ Kesadaran masyarakat untuk melakukan budidaya masih sangat kurang;
- ✓ Ketersediaan lahan yang layak budidaya masih kurang;
- ✓ Informasi pasar untuk masyarakat masih kurang.



Tabel 3.34
Realisasi Produksi Perikanan Selama Tahun 2013 – 2017

Tahun	Perikanan Tangkap (Ton)			Budidaya	Perikanan Tangkap(Rp Juta)			Budidaya
	Laut	Umum	Jumlah		Laut	Umum	Jumlah	
1	2	3		4	5	6		7
2013	120.080,00	43.454,00	163.534,00	30.871,53	2.051.869,21	870.956,83	2.922.826,04	810.852,88
2014	165.622,00	27.297,00	192.919,00	38.439,58	2.954.437,64	576.887,57	3.531.325,21	1.229.705,75
2015	128.455,20	29.884,90	158.340,10	43.722,71	2.242.096,94	558.786,79	2.800.883,73	1.296.707,31
2016	113.523,00	41.863,50	155.386,50	65.551,13	1.879.829,18	688.411,49	2.568.240,67	1.944.084,19
2017*	125.022,76	37.344,46	162.367,22	77.927,15	2.337.925,60	705.810,31	3.043.735,91	2.293.606,13
Rata2 %	130.540,59	35.968,77	166.509,36	51.302,42	2.293.231,71	680.170,60	2.973.402,31	1.514.991,25
Pertumb %	3,49	0,39	0,66	26,77	7,02	-2,79	2,58	31,25

2017* data sementara

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.35 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	Program pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil	1.911.519.500,00	1.653.454.640,00	86,5	95,44%	n/a
		Program Pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap	2.893.963.900,00	2.512.903.215,00	86,83		
		Program Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Perikanan budidaya	3.424.614.200,00	3.185.938.436,00	93,03		
		Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	6.669.146.250,00	6.028.242.300,00	90,39		
		Program Pengembangan dan peningkatan mutu dan nilai tambah serta optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.340.604.500,00	1.145.455.967,00	85,44		
		Program Pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap	275.261.500,00	274.990.000,00	99,9		
		Program Pengembangan dan peningkatan pengujian mutu hasil perikanan dan fungsi laboratorium pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMPH)	990.405.000,00	970.806.297,00	98,02		
		Program pengembangan dan peningkatan produksi perikanan budidaya dan fungsi Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	454.482.550,00	394.266.000,00	86,75		
		Rata-Rata	17.959.997.400,00	16.166.056.855,00	90,01		

Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,01% dan realisasi capaian kinerja sebesar 95,44%, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini belum dapat terukur karena capaian kinerja masih dibawah 100%.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja pemerintah daerah adalah Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) dan Program



Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut telah mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi baru pada sektor usaha kelautan dan perikanan beserta usaha pendukungnya, peningkatan penyerapan tenaga kerja baru pada sektor perikanan dan peningkatan konsumsi makan masyarakat Kalimantan Barat serta dapat memberikan konsekuensi kepada pertumbuhan jumlah produksi perikanan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2015, 2016 dan 2017 dan target jangka menengah

Tabel 3.36 Perbandingan Kinerja Tahun 2015-2017 dan Target 2018 Sasaran Strategis 10

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2018
			2015	2016	2017	
10	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	Peningkatan Produksi Perikanan (ton) hasil kelautan dan perikanan	202.062,81 ton	220.937,63 ton	240.294,37 ton	276.477,96 ton

Berdasarkan tabel di atas Produksi perikanan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dari tahun ke tahun terjadi peningkatan Pada tahun 2015 sebesar 202.062,81 Ton naik di tahun 2016 sebesar 9.34 % dan di tahun 2017 naik sebesar 8,76 % jadi total pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya sebesar 9,05 %. Jika Kita bandingkan dengan target tahun 2018 maka capaian produksi perikanan sudah mencapai 86,91 %.

Untuk Volume Produksi perikanan tangkap sementara untuk tiga tahun terakhir belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 190.506,96. Namun ini data sementara dan masih terus divalidasi hal ini disebabkan pendataan statistik pada tahun ini di pusatkan pada One Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mana pendataan masih dalam tahap permulaan sehingga sebagian masih belum valid.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini yakni :

- ✓ Masih adanya konflik pengelolaan pada kawasan pengembangan usaha perikanan dengan sektor lain.
- ✓ *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) Fishing masih marak di perairan laut Kalbar
- ✓ Adanya penurunan kualitas perairan akibat pencemaran bahan-bahan berbahaya pada kawasan pengembangan usaha perikanan budidaya sehingga berpengaruh terhadap produktifitas hasil usaha pembudidaya ikan Kalbar
- ✓ *Illegal trading* produk hasil perikanan masih ditemukan di wilayah Kalbar
- ✓ Masih ditemukannya penggunaan bahan berbahaya pada komoditas hasil perikanan.
- ✓ BBM (Solar) bersubsidi untuk nelayan belum tepat sasaran
- ✓ Harga pakan ikan pabrikan masih mahal untuk pembudidaya ikan
- ✓ Kebutuhan benih ikan unggul untuk usaha perikanan budidaya sebagian masih dipasok dari luar daerah



- ✓ Adanya ancaman wabah hama dan penyakit ikan
- ✓ Sarana produksi usaha perikanan (budidaya, tangkap, pengolahan dan pemasaran) sebagian besar masih tergantung pasokan dari luar daerah
- ✓ Usaha perikanan masyarakat Kalimantan Barat sebagian besar masih skala usaha kecil
- ✓ Masih adanya introduksi komoditas ikan segar dan olahan dari luar daerah masuk ke Kalbar
- ✓ Kualitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan Kalbar sebagian besar masih rendah
- ✓ Diversifikasi produk ikan olahan asal Kalbar belum optimal

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang ada yakni:

- ✓ Pembinaan teknis kepada kelompok usaha perikanan (Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Pembudidayaan Ikan, Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelompok Masyarakat dan Pengawas) perlu dilakukan secara lebih intensif agar kelompok pelaku usaha perikanan Kalimantan Barat secara bertahap dapat tumbuh dan berkembang skala usahanya menjadi besar dan menguntungkan dengan melibatkan peran serta petugas teknis dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota dan penyuluh perikanan se- Kalbar.
- ✓ Dalam upaya meningkatkan skala usaha dan permodalan bagi kelompok usaha perikanan, dinas perlu memberdayakan secara optimal Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan penyuluh perikanan untuk pendampingan kelompok usaha perikanan mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan/perbankan, dimana sebagian besar kelompok usaha perikanan Kalbar pada saat ini masih kesulitan mendapat modal usaha dari lembaga keuangan/Bank.
- ✓ Peningkatan kapasitas dan produktifitas balai-balai benih ikan yang ada di Kabupaten/Kota se-Kalbar dalam menyediakan calon induk ikan dan benih ikan unggul bagi masyarakat pelaku budidaya ikan Kalbar
- ✓ Perlu mengintensifkan kegiatan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan dari berbagai aktifitas illegal dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar sumberdaya ikan Kalimantan Barat tetap lestari dan berkelanjutan .
- ✓ Perlu terus melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan serta habitatnya.
- ✓ Dalam rangka mengakselerasi peningkatan produksi hasil perikanan, program minapolitan dan industrialisasi perikanan perlu terus digalakkan dan dikampanyekan melalui berbagai kegiatan dinas secara progresif dengan melibatkan kabupaten / kota se Kalimantan Barat.
- ✓ Perlu meningkatkan validitas dalam pengelolaan data dan statistik kelautan dan perikanan dengan meningkatkan skill petugas pengumpul data statistik kelautan dan perikanan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten / kota se- Kalbar.
- ✓ Dukungan pemerintah melalui regulasi dan swasta terhadap pengembangan usaha.
- ✓ Penerapan CBIB dan CPIB serta sertifikasi tambak.
- ✓ Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan.
- ✓ Penguatan Kelembagaan nelayan, pembudidaya agar semakin berkualitas dan berkembang.



- ✓ Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggung jawab.
- ✓ Pencegahan degradasi atau kerusakan lingkungan semakin intensif.
- ✓ Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
- ✓ Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan.

11. Sasaran Strategis 11 Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 11

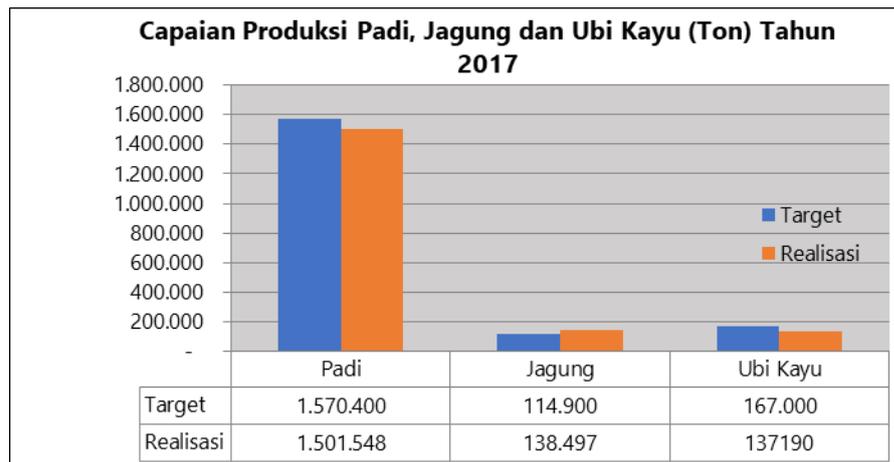
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1) Jumlah Produksi Pertanian			
		• Tanaman Pangan			
		a) Padi	1.570.400 ton	1.501.548 ton	95,62%
		b) Jagung	114.900 ton	138.497 ton	120,54%
		c) Kedelai	2.250 ton	837 ton	37,20%
		d) Kacang Tanah	1.030 ton	644 ton	62,52%
		e) Kacang Hijau	1.200 ton	1.375 ton	114,58%
		f) Ubi Kayu	167.000 ton	137.190 ton	82,15%
		g) Ubi Jalar	11.100 ton	10.380 ton	93,51%
		• Tanaman Hortikultura			
		a) Buah-Buahan	225.600 ton	263.070 ton	116,61%
		b) Sayur-Sayuran	54.100 ton	58.187 ton	107,55%
		c) Biofarmaka	10.350 ton	12.547 ton	121,23%
		d) Tanaman Hias	466.600 kg/tangkai/pohon	530.230 kg/tangkai/pohon	113,64%
		2) Nilai Tukar Petani		102,87	97,89
CAPAIAN KINERJA					96,66%

Capaian Produksi Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja produksi komoditi tanaman pangan rata-rata mencapai 95,86%. Capaian kinerja produksi lebih dari 100% yaitu komoditi Jagung dan Kacang hijau. Sedangkan capaian kinerja produksi yang mendapat nilai kurang dari 75% yaitu komoditi kedelai dan Kacang Tanah

a. Capaian produksi padi, jagung, dan ubi kayu

Untuk memudahkan membaca data disajikan diagram batang, angka produksi padi, jagung, dan ubi kayu disajikan dalam satu diagram karena perbedaan nilai (kisaran) angka produksi tidak terlalu besar, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



- Tingkat capaian produksi padi dengan target 1.570.400 Ton GKG, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2017 terealisasi sebesar 1.501.548 ton GKG atau 95,62% dari target. Target produksi padi hampir tercapai 100%. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terkait produksi padi, OPD mampu mengefisienkan sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya anggaran, sumberdaya aparatur dan non aparatur di lapangan, sumberdaya lahan sebagai faktor utama tercapainya luas tanam dan luas panen sesuai dengan strategi pencapaian produksi padi. Pencapaian luas tanam dan luas panen yang melebihi target menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya yang tersedia. Untuk masa yang akan datang, masih sangat terbuka peluang untuk dapat meningkatkan kinerja produksi padi.
 - Tingkat capaian produksi jagung dengan target 114.900 ton pipilan kering, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2017 terealisasi sebesar 138.497 ton pipilan kering, atau 120,54%. Produksi jagung melebihi target yang ditentukan, hal ini dapat ditafsirkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terkait produksi jagung, OPD mampu mengefisienkan sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya anggaran, sumberdaya aparatur dan non aparatur di lapangan, sumberdaya lahan sebagai faktor utama tercapainya luas tanam dan luas panen sesuai dengan strategi pencapaian produksi jagung. Pencapaian luas tanam, luas panen dan produktivitas yang melebihi target menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya yang tersedia.
 - Tingkat capaian produksi ubi kayu dengan target 167.000 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2017 terealisasi sebesar 137.190 ton atau 82,15%. Tidak tercapainya target produksi ubi kayu disebabkan tidak ada dukungan dan intervensi kegiatan terkait pengembangan komoditi ini. Sebagian besar pertanaman merupakan swadaya petani. Capaian sebesar 82,15% menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak mencapai target.
- b. Capaian produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan, ubi jalar
Demikian pula komoditi kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar disajikan dalam satu diagram karena perbedaan nilai (kisaran) angka produksi tidak terlalu besar, sebagaimana disajikan pada gambar 3 berikut:

Gambar 3.15 Capaian Produksi Kedelai, Kacang tanah, Kacang Hijau dan Ubi Jalar Tahun 2017 (Ton)

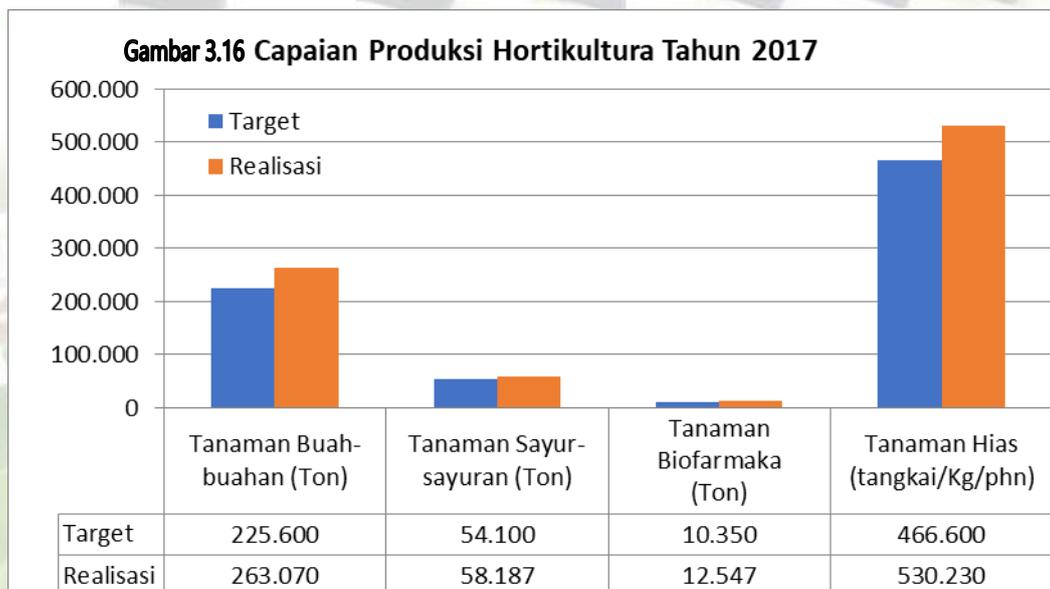


- Tingkat capaian produksi kedelai dengan target 2.250 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2017 terealisasi sebesar 837 ton atau 37,20%. Capaian produksi yang masih jauh dari target yang ditetapkan disebabkan secara spesifik dan karakter tanaman ini cukup sulit dalam pengelolaan di wilayah beriklim tropik seperti Kalimantan Barat. Disamping itu kebijakan terkait kedelai dari mulai pengalokasian sangat terlambat sehingga pertanaman kedelai di lapangan tidak dapat terlaksana tepat waktu.
- Tingkat capaian produksi kacang tanah dengan target 1.030 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2017 terealisasi sebesar 644 ton atau 62,52% dari target. Tidak tercapainya target produksi kacang tanah disebabkan dukungan dan intervensi secara anggaran untuk kegiatan terkait pengembangan komoditi ini sangat minim sekali, secara teknis di lapangan, penyediaan sarana produksi seperti benih sangat terbatas, areal pengembangan hanya spot-spot tertentu dan belum dikembangkan secara luas. Sebagian besar pertanaman merupakan swadaya petani.
- Tingkat capaian produksi kacang hijau dengan target 1.200 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2017 terealisasi sebesar 1.375 ton atau 114,58%. Produksi kacang hijau melebihi target yang ditentukan, hal ini dapat ditafsirkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terkait produksi kacang hijau, OPD mampu mengefisienkan sumberdaya yang tersedia meskipun dukungan anggaran sangat kecil, namun secara kebijakan seperti membaiknya harga kacang hijau mampu menggerakkan petani untuk pengembangan kacang hijau secara swadaya. Lahan sebagai faktor utama tercapainya luas tanam dan luas panen dapat dimanfaatkan secara efisien meskipun dukungan anggaran masih terbatas. Peningkatan luas tanam sebesar 22,91% dan luas panen kacang hijau sebesar 22,70% menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam efisiensi penggunaan sumberdaya lahan, namun perlu dukungan teknologi budidaya agar mampu meningkatkan produktivitas kacang hijau yang baru mencapai 7,59 ku/ha atau sebesar 93,47% dari target yang ditetapkan.
- Tingkat capaian produksi ubi jalar dengan target 11.100 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2017 terealisasi sebesar 10.380 ton atau 93,51%. Tidak tercapainya target produksi ubi jalar disebabkan tidak ada dukungan dan intervensi kegiatan terkait pengembangan komoditi ini. Sebagian besar pertanaman merupakan swadaya petani. Capaian sebesar 93,51% menunjukkan kinerja maksimal meskipun belum mencapai target.

Capaian Produksi Hortikultura

Capaian kinerja produksi tanaman hortikultura tahun 2017 berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (angka sementara) telah melebihi target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, untuk tanaman buah-buahan, sayuran dan biofarmaka bila dibandingkan dengan target maka rata-rata hanya mencapai 115,09%. Capaian produksi yang paling tinggi yaitu komoditi tanaman biofarmaka (121,23%). Sedangkan untuk komoditi tanaman hias, capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 112,64% dari target. Capaian kinerja hortikultura melebihi target yang ditetapkan, karena adanya penyesuaian target pada dokumen perencanaan strategis, namun jika dievaluasi dan dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, produksi hortikultura cenderung menurun (sebagaimana nanti dijelaskan pada bagian lain laporan ini).

Pada gambar berikut disajikan data capaian produksi hortikultura tahun 2017.



- Tingkat capaian produksi buah-buahan dengan target 225.600 ton, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2017 terealisasi sebesar 263.070 ton atau 116,71% dari target.
- Tingkat capaian produksi sayur-sayuran dengan target 54.100 ton, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2017 terealisasi sebesar 58.187 ton atau sebesar 107,55%. Capaian melebihi target disebabkan adanya program dan kegiatan khusus terutama tanaman cabe dan bawang melalui UPSUS BABE yang mampu meningkatkan luas tanam dan panen tanaman sayur-sayuran.
- Tingkat capaian produksi Tanaman Biofarmaka dengan target 10.350 Ton, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2017 terealisasi sebesar 12.547 Ton atau sekitar 121,23%.
- Tingkat capaian produksi Tanaman Hias dengan target 466.600 tangkai/kg/phn, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2017 terealisasi sebanyak 520.230 tangkai/kg/phn atau 113,64%.



Secara umum capaian produksi hortikultura rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian produksi hortikultura dipengaruhi oleh luas lahan dan jumlah pohon yang menghasilkan/panen, dimana produksi tanaman hortikultura sangat tergantung pada musim serta teknik budidaya. Pada tabel berikut disajikan realisasi luas panen komoditi hortikultura pada tahun 2017.

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator *proxy* untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dan menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. **Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.**

NTP berfluktuasi setiap bulannya. Penurunan NTP umumnya terjadi pada saat panen tanaman pangan, tanaman hortikultura (tanaman bahan makanan) maupun tanaman perkebunan rakyat, tetapi naik kembali pada waktu sesudahnya. Meskipun demikian fluktuasi harga komoditas konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta penambahan barang modal (BPPBM) juga mempengaruhi tinggi rendahnya NTP.

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga, dilihat sebagaimana tabel berikut:

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.38 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada berkelanjutan	50.931.387.700	47.801.348.440	99,35	96,66%	n/a
		Program Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman hortikultura berkelanjutan	10.596.112.200	10.292.779.450	97,14		
		Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran, ekspor produk hasil pertanian	3.144.721.200	3.018.343.000	95,98		
		Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	43.284.853.000	41.796.883.290	96,65		
		Rata-Rata			95,32		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,32% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 96,66%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.



- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian kinerja produksi tanaman pangan didukung oleh beberapa kegiatan baik secara fisik maupun non fisik diantaranya Pemantapan Sentra Padi dan Jagung (Food Estate); Promosi teknologi budidaya; Pengembangan kawasan (ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar); Peningkatan sarana dan prasarana pertanian (sarana budidaya); Perluasan arel tanam dan pengelolaan lahan; Pengelolaan air di tingkat usaha tani; Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan pengelolaan Alsintan; Mekanisasi pertanian; Pengembangan alsintan center; serta beberapa kegiatan pelatihan yang menunjang peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (petani dan petugas) baik kemampuan petani dalam segi budidaya pra-panen maupun pascapanen serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Peningkatan produksi padi diantaranya dilaksanakan melalui kegiatan food estate berupa demplot mendukung Hari Pangan Sedunia (HPS) di Kubu Raya seluas 10 ha dengan bantuan sarana produksi antara lain benih padi hibrida, insektisida, fungisida, herbisida, NPK, decomposer, pupuk organik cair dan seet treatment padi. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan pelatihan budidaya padi dengan teknologi Hazton di 14 kab/kota yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani dalam budidaya padi. Promosi teknologi budidaya dilaksanakan dalam bentuk demplot percontohan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, kacang hijau, ubi jalar dan kacang tanah sebanyak 3 musim tanam; demplot lahan tanpa bakar di Sambas, Bengkayang, dan Mempawah dengan paket bantuan berupa asam humat, pupuk organik cair dan pembenah tanah. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian (sarana budidaya) dilaksanakan melalui pengadaan dan penyaluran bantuan sebanyak 114 paket bahan kimia serta 139 paket pupuk penunjang produksi tanaman pangan di 14 kab/kota.

Berdasarkan Angka Ramalan II 2017, capaian kinerja tanaman pangan secara rata-rata baik produksi, luas panen maupun produktivitas masih di bawah target yang ditetapkan, masing-masing berturut-turut mencapai 95,86% (produksi), 89,46% (luas panen) dan 98,59% (produktivitas). Secara umum faktor teknis yang mempengaruhi ketiga indikator ini saling berkaitan. Luas panen dan produktivitas yang belum mencapai target disebabkan oleh kurangnya aplikasi teknologi budidaya dan penggunaan varietas yang kurang sesuai dan ancaman OPT. Selain itu, masih besarnya kehilangan hasil setelah panen menyebabkan angka produksi secara keseluruhan.

Keberhasilan capaian kinerja tanaman pangan juga didukung dengan bergabungnya tenaga-tenaga penyuluh dalam upaya peningkatan produksi. Pada tahun 2017 jumlah penyuluh sebanyak 1.099 orang. Jumlah kelembagaan BP3K sebanyak 145 unit dan sebanyak 20 unit diantaranya telah masuk kriteria kelas utama. Jumlah kelompok tani sebanyak 15.155. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh sangat penting dilakukan agar ke depan lebih mampu berperan dalam pencapaian kinerja terutama produksi tanaman pangan dan hortikultura.



c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2015, 2016 dan 2017 dan target jangka menengah

Tabel 3.39 Perbandingan Kinerja Tahun 2015-2017 dan Target 2018 Sasaran Strategis 11

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET RPJMD 2018
			2015	2016	2017	
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1) Jumlah Produksi Pertanian				
		• Tanaman Pangan				
		a) Padi	1.275.707 ton	1.364.524 ton	1.501.548 ton	1.696.000 ton
		b) Jagung	103.742 ton	113.625 ton	138.497 ton	120.700 ton
		c) Kedelai	2.637 ton	2.102 ton	837 ton	2360 ton
		d) Kacang Tanah	945 ton	947 ton	644 ton	1.080 ton
		e) Kacang Hijau	1.102 ton	1.442 ton	1.375 ton	1.300 ton
		f) Ubi Kayu	173.448 ton	163.023 ton	137.190 ton	177.400 ton
		g) Ubi Jalar	14.863 ton	10.346 ton	10.380 ton	11.700 ton
		• Tanaman Hortikultura				
		a) Buah-Buahan	415.585 ton	292.300 ton	263.070 ton	230.100 ton
		b) Sayur-Sayuran	64.595 ton	55.416 ton	58.187 ton	56.800 ton
		c) Biofarmaka	15.838 ton	13.941 ton	12.547 ton	10.550 ton
		d) Tanaman Hias	784.265 kg/tangkai/pohon	578.176 kg/tangkai/pohon	530.230 kg/tangkai/pohon	475.900 kg/tangkai/pohon
		2) Nilai Tukar Petani	96,73	95,58	97,89	102,95

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka panjang (tahun 2018) khususnya terkait produksi komoditi utama masih memerlukan upaya cukup besar untuk mencapai target tersebut. Sejalan dengan rencana perubahan dokumen RPJMD, maka target kinerja (indikator kinerja utama) juga mengalami perubahan dan penyesuaian sampai akhir target jangka menengah (2018). Untuk capaian kinerja produksi tanaman pangan tahun 2017 secara keseluruhan baru mencapai 89,05% dibandingkan dengan target sampai pada tahun 2018. Adapun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2015 dan 2016) untuk komoditi padi dan jagung, produksinya pada tahun 2017 cenderung naik, sedangkan untuk komoditi lainnya, produksi tahun 2017 cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, hasil pengukuran ini dapat ditafsirkan bahwa upaya OPD dalam meningkatkan produksi tanaman pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif sampai dengan tahun 2017 masih sangat relevan apabila dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2018. Adapun untuk masing-masing komoditi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian kinerja produksi komoditi padi tahun 2017 mencapai 1.501.548 ton atau sebesar 88,53% dari target 2018 sebesar 1.696.000 ton. Hasil ini dapat ditafsirkan bahwa upaya OPD dalam meningkatkan produksi padi secara kualitatif maupun kuantitatif sampai dengan tahun 2017 masih sangat relevan apabila dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2018.
- Capaian kinerja produksi tahun 2017 paling tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2018) yaitu Jagung sebesar 114,74% dan Kacang hijau sebesar 105,77%. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa upaya OPD dalam rangka meningkatkan produksi jagung dan kacang hijau telah maksimal dan sangat relevan untuk dapat dilanjutkan pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2018.
- Capaian kinerja produksi yang masih sangat jauh dari target jangka menengah tahun 2018 (nilai kurang dari <80%) yaitu komoditi kedelai (35,47%), kacang tanah (59,63%)



dan ubi kayu sebesar hanya sebesar 77,33%. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa masih perlu upaya yang kuat dan maksimal dari OPD dalam peningkatan produksi kedelai, kacang tanah dan ubi kayu, dan masih relevan untuk pencapaian target renstra tahun 2018.

- Untuk komoditi ubi jalar, capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2018) hanya sebesar 88,72%.

Sementara itu capaian kinerja produksi komoditi tanaman hortikultura pada tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2018) rata-rata telah mencapai nilai kinerja sangat baik (> 100%). Untuk komoditas hortikultura, capaian produksi tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya cukup fluktuatif, ada naik ada juga turun sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa upaya OPD dalam peningkatan produksi tanaman hortikultura (buah-buahan, sayuran, biofarmaka dan tanaman hias) telah maksimal, dan masih relevan untuk mencapai target sampai dengan tahun 2018. Selain itu, target produksi hortikultura dalam dokumen perencanaan telah dilakukan penyesuaian seiring dengan kemampuan lahan dan kinerja OPD dalam pencapaian target-target produksi tahun sebelumnya.

Tabel 3.40
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2013-2017

Uraian	Indeks				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Nilai Tukar Petani Palawija (NTPP)	95.28	98.92	98.70	97.34	94.40
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	103.08	104.64	103.31	103.04	101.09
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	106.58	92.83	93.38	91.46	97.89
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	79.19	95.07	95.49	95.38	93.95
Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN)	103.14	98.65	100.01	102.59	102.03
NTP	98.01	96.63	96.73	95.58	96.67

Sumber : BPS Prov. Kalbar, 2017

Nilai tukar Petani 2017 Provinsi Kalimantan Barat sebesar 96,67 poin naik 1,09 poin dibandingkan tahun 2016.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target dan kinerja secara nasional

Tabel 3.41 Perbandingan kinerja tahun 2017 dengan target nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL	REALISASI	%
12.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1) Jumlah Produksi Pertanian			
		• Tanaman Pangan			
		a) Padi	2.437.500 ton	1.501.548 ton	61,60
		b) Jagung	380.000 ton	138.497 ton	36,45
		c) Kedelai	6.750 ton	837 ton	12,40
		d) Kacang Tanah	2.565 ton	644 ton	37,40
		e) Kacang Hijau	3.677 ton	1.375 ton	36,37
		f) Ubi Kayu	377.246 ton	137.190 ton	40,46
		g) Ubi Jalar	25.656 ton	10.380 ton	40,45
	2) Nilai Tukar Petani		97,89		

Berdasarkan tabel di atas, Capaian kinerja produksi tanaman pangan rata-rata produksi mencapai 55,37%. Capaian kinerja produksi paling mendekati target nasional yaitu tanaman padi sebesar 1.501.548 ton atau 61,60% dari target nasional sebesar 2.437.500 ton, sedangkan komoditas lain masih di bawah 50% dari target nasional. Capaian kinerja produksi terendah pada komoditi kedelai yaitu sebesar 837 ton atau 12,40% dari target nasional sebesar 6.750 ton. Berdasarkan LPPD/LKPJ tahun 2017, Kalbar berada pada urutan ke-2 provinsi penghasil padi se-Kalimantan, sedangkan secara nasional kontribusinya masih berada di urutan 13.

Sementara itu untuk komoditas tanaman hortikultura secara nasional tidak memberikan target secara detail pada tiap provinsi. Target nasional untuk tanaman hortikultura dibuat dalam bentuk global tiap komoditi sehingga capaian kinerja produksi tanaman hortikultura 2017 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi wilayah

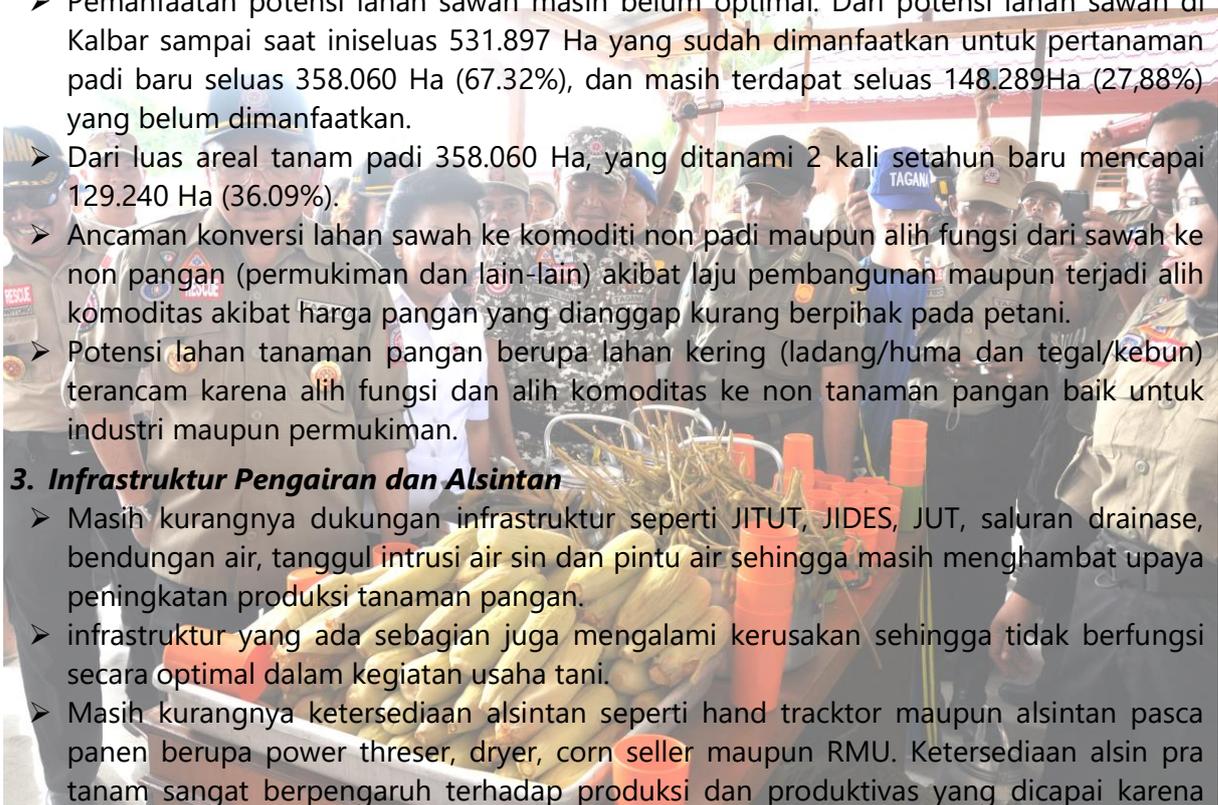
- Kondisi dan Potensi lahan yang tersebar dan sulitnya akses wilayah menyebabkan distribusi sarana dan prasarana produksi, pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan terhambat

2. Pemanfaatan Sumberdaya Lahan

- Pemanfaatan potensi lahan sawah masih belum optimal. Dari potensi lahan sawah di Kalbar sampai saat ini seluas 531.897 Ha yang sudah dimanfaatkan untuk pertanaman padi baru seluas 358.060 Ha (67,32%), dan masih terdapat seluas 148.289Ha (27,88%) yang belum dimanfaatkan.
- Dari luas areal tanam padi 358.060 Ha, yang ditanami 2 kali setahun baru mencapai 129.240 Ha (36,09%).
- Ancaman konversi lahan sawah ke komoditi non padi maupun alih fungsi dari sawah ke non pangan (permukiman dan lain-lain) akibat laju pembangunan maupun terjadi alih komoditas akibat harga pangan yang dianggap kurang berpihak pada petani.
- Potensi lahan tanaman pangan berupa lahan kering (ladang/huma dan tegal/kebun) terancam karena alih fungsi dan alih komoditas ke non tanaman pangan baik untuk industri maupun permukiman.

3. Infrastruktur Pengairan dan Alsintan

- Masih kurangnya dukungan infrastruktur seperti JIUT, JIDES, JUT, saluran drainase, bendungan air, tanggul intrusi air sin dan pintu air sehingga masih menghambat upaya peningkatan produksi tanaman pangan.
- infrastruktur yang ada sebagian juga mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi secara optimal dalam kegiatan usaha tani.
- Masih kurangnya ketersediaan alsintan seperti hand tracktor maupun alsintan pasca panen berupa power thresher, dryer, corn seller maupun RMU. Ketersediaan alsin pra tanam sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktivas yang dicapai karena





pengolahan tanah yang tepat berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Keterbatasan alsin pasca panen seperti power thresher menyebabkan petani harus antri dalam melaksanakan panen, terkadang terlambat sehingga kualitas produksi yang dihasilkan menurun. Alsin pasca panen berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas melalui penekanan kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil tanaman yang berpengaruh pada harga jual produk.

4. Penerapan Teknologi Usaha Tani

- Sebagian besar sistem pengolahan tanah belum menerapkan mekanisasi bahkan masih ada ditemukan petani yang menerapkan sistem tanpa olah tanah (Notillage). Penyebabnya karena terbatasnya jumlah hand traktor, keterbatasan biaya pengolahan dan keterbatasan tenaga kerja.
- Masih sedikit sekali areal tanam yang menerapkan sistem tanam legowo atau sistem tanam metode hazton.
- Sebagian besar petani masih belum menerapkan sistem pemupukan berimbang baik jenis maupun jumlah, serta belum menerapkan azas 6 tepat.
- Masih ditemukan petani menggunakan benih padi lokal atau dari pertanaman sebelumnya. Penggunaan benih berlabel terbatas pada kelompok tani yang memperoleh bantuan baik dari sumber dana APBN maupun APBD.
- Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Kebiasaan petani mengendalikan OPT setelah terjadi serangan, dan belum menerapkan sistem "Early Warning System"

5. Mentalitas Petani

- Sebagian besar petani padi masih bersifat subsisten, berorientasi jangka pendek, belum tercipta wawasan bisnis jangka panjang karena hanya berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.
- Minat pemuda di pedesaan untuk membantu atau meneruskan profesi orang tuanya sebagai petani cenderung semakin berkurang karena tersedianya alternatif kerja di luar sektor pertanian yang lebih cepat menghasilkan uang.
- Masih tingginya konsumsi beras penduduk Kalbar maupun nasional yang sampai saat ini sebesar 124.89 kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan dengan konsumsi negara di Asia, konsumsi beras nasional termasuk Kalbar masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan Thailand yang hanya sebesar 90 kg, Malaysia dan Vietnam 80 kg, Jepang 50 kg, dan Korea yang hanya sebesar 40 kg/kapita/tahun.

6. Organisasi Tani

- Sebagian besar kelompok tani di Kalbar masih belum berkembang
- Pemberdayaan alsintan melalui pola UPJA masih belum optimal.
- Kelembagaan petani pada umumnya lemah, tidak mampu berperan dalam meningkatkan posisi tawar petani.

7. Kebijakan

- Kurangnya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga masih ditemukan kelangkaan pupuk bersubsidi padahal alokasi pupuk sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati/ Walikota.



- Masih ditemukan beberapa penyimpangan dalam penyediaan dan pemanfaatan pupuk bersubsidi antara lain alokasi pupuk yang digunakan oleh subsektor lain, dan penjualan pupuk bersubsidi oleh kios tanpa menggunakan RDKK
- Adanya kebijakan terkait revisi anggaran sehingga secara langsung berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan
- Pelaksanaan administrasi kegiatan yang terkendala, seperti proses pelelangan, pengadaan barang dan jasa serta bantuan sosial (banpem) baik berupa transfer barang maupun transfer uang menyebabkan distribusi sarana produksi menjadi terlambat sampai ke petani penerima. Adanya kasus tidak mampunya pihak ke-3 dalam penyediaan dan distribusi benih maupun pupuk sangat berpengaruh pada rencana tanam dan kegiatan budidaya petani sehingga pencapaian produksi juga menjadi terhambat.

8. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

- Tingkat kehilangan hasil (losses) relatif masih tinggi akibat masih kurangnya ketersediaan aslin pasca panen.
- Masih rendahnya kualitas SDM petani dalam penganekaragaman hasil melalui pengolahan hasil.
- Pemasaran hasil pertanian masih bersifat domestik, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal.
- Kegiatan pemasaran sebagian besar masih dilakukan secara perorangan, tidak melalui kelompok atau suatu badan usaha.
- Agroindustri yang ada di Kalbar sebagian besar masih bersifat home industri sehingga sangat diperlukan investor untuk pengembangan dalam skala luas.
- Terjadinya inefisiensi pemasaran dan tingginya margin harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh rantai tata niaga yang panjang, pembentukan harga yang tidak adil yang biasanya tidak menguntungkan petani.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi wilayah

- Pelaksanaan pembangunan yang lebih merata dalam hal ini infrastruktur jalan dan jembatan yang memudahkan distribusi barang dan manusia sehingga pembinaan dan lalu lintas produksi meningkat baik kuantitas maupun kualitas.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan

- Mengoptimalkan potensi lahan sawah untuk pertanaman padi melalui kegiatan cetak sawah baru terutama pada potensi sawah yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan areal tanam seluas 4.999 ha (APBN) di 8 kabupaten serta optimalisasi lahan baik dari sumber dan APBN maupun APBD.
- Memotivasi petani untuk meningkatkan penanaman padi pada musim tanam gadu (April – September) melalui penyediaan benih unggul dengan pola subsidi benih maupun penanaman padi varietas unggul secara swadaya.



3. **Infrastruktur dan Alsintan**

- Kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait untuk meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana terutama jaringan pengairan makro seperti saluran, pintu air maupun bendungan.
- Melakukan inventarisasi terhadap ketersediaan jaringan pengairan baik dari jumlah maupun kondisi di lapangan. Hasil inventarisasi ini sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi
- Pembangunan dan rehabilitasi jaringan mikro dan infrastruktur usaha tani lainnya melalui anggaran APBN maupun APBD Dinas Pertanian seperti TAM, JUT, JITUT maupun JIDES
- Pada tahun 2017 upaya mengoptimalkan potensi lahan sawah dilakukan melalui kegiatan pengelolaan air di tingkat usaha tani berupa diantaranya normalisasi jaringan air, saluran irigasi pertanian, JIDES, dan saluran cacing dengan total rencana luas mencapai 150 ha serta jalan usaha tani sepanjang total mencapai 25 km.
- Penyediaan alsintan berupa handtraktor baik melalui dana APBN maupun APBD, serta meningkatkan pemberdayaan UPJA di kelompok tani.
- Pengembangan alsin pasca panen yang diprioritaskan pada wilayah sentra produksi padi dan jagung berupa *power thresher, corn seller, dryer dan RMU*.

4. **Penerapan Teknologi Usaha Tani**

- Pelaksanaan UPSUS Pajale bersumber dari APBN 2017.
- Upaya peningkatan produktivitas ditempuh melalui penerapan teknologi usaha tani padi dengan pengembangan padi inbrida, padi metode hazton, padi hibrida dan padi organik seluas 34.610 ha di 8 Kabupaten/kota melalui dana APBN. Selain itu dilaksanakan fasilitasi saprodi kedelai untuk 4 kabupaten seluas 500 ha, jagung hibrida dan jagung komposit masing-masing seluas 22.500 ha dan 8000 ha.
- Sosialisasi penggunaan benih bermutu varietas unggul melalui demplot benih unggul) serta penyediaan benih unggul dengan pola subsidi benih.
- Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-I).
- Pelaksanaan Denfarm budidaya padi hazton

5. **Mentalitas Petani**

- Pelatihan agribisnis dan pemberian modal usaha yang diharapkan mampu merubah paradigma petani dari subsisten ke agribisnis
- Meningkatkan nilai tukar petani (NTP) sehingga usaha tani menjadi profesi yang sangat menguntungkan, sehingga akan memotivasi para pemuda tani untuk melanjutkan profesi orang tuanya sebagai petani
- Sosialisasi konsumsi pangan non beras melalui pengenalan olahan pangan berasal dari bahan baku non beras.

6. **Organisasi Tani**

- Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan petani di masing-masing kabupaten/Kota sehingga meningkatkan kualitas, keterampilan dan dinamika kelompok tani



- Pembinaan yang intensif terhadap kelompok-kelompok UPJA yang telah dibentuk agar dapat meningkatkan kemampuan / kinerja kelompok dalam pendayagunaan dan pengembangan alsintan.
- Memberikan pengarahan kepada kelompok tani untuk tidak bekerja secara sendiri-sendiri dan segera membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

7. Kebijakan

- Meningkatkan peran KP-3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di masing-masing Kabupaten/Kota dalam mengawasi distribusi serta mengantisipasi agar penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi masing-masing sub sektor.
- Kebijakan Makro parsial yang kondusif, baik kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan perdagangan maupun prioritas pengembangan ekonomi nasional seharusnya lebih berpihak kepada petani, seperti pembatasan import beberapa komoditas agar dapat membangkitkan produksi petani lokal
- Perlu ada kebijakan harga untuk komoditas non padi sehingga petani mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil terutama untuk komoditas umbi-umbian.

8. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

- Penyediaan alsin pasca panen berupa power thresher (padi) corn seller (jagung) untuk mengurangi kehilangan hasil (losses) saat perontokkan.
- Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan yang intensif bagi petani sehingga trampil dalam penguasaan teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani melalui produk olahan.
- Melakukan kegiatan pemasaran melalui kelompok/ suatu badan usaha, sehingga pemasaran tidak hanya bersifat domestik tetapi memiliki akses ke luar daerah.
- Memfasilitasi pertemuan petani dengan pengusaha/stake holders sehingga terjalin kemitraan yang saling menguntungkan terutama dalam penyediaan modal usaha maupun pemasaran hasil.

12. Sasaran Strategis 12 Peraturan yang mendukung iklim investasi

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	Peningkatan Nilai Investasi	18,61 T	19,96 T	107,25%

Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong perekonomian daerah. Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan investasi melalui regulasi, diantaranya kemudahan serta efisiensi waktu dalam mengajukan perijinan tanpa mengurangi aturan yang berlaku. Apabila dilihat dari target indikator di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2013-2018, indikator Peningkatan Nilai Investasi telah mencapai target yang ditetapkan.

Nilai realisasi investasi Kalimantan Barat pada tahun 2017 adalah tercatat sebesar Rp. 19,96 Triliun dengan pembagian PMDN sebesar Rp.12,38 Triliun dan PMA sebesar Rp. 7,58 Triliun, jumlah serapan tenaga kerja 55.396 orang dan jumlah proyek sebanyak 552 proyek.



Perbandingan realisasi kinerja hingga tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah nilai realisasi investasi sampai tahun 2017 adalah sebesar Rp.90,66 Trilyun atau sebesar 111,39 % dari target akhir RPJMD sebesar Rp. 81,39 Trilyun.
2. Jumlah laporan proyek realisasi investasi adalah sebanyak 798 proyek, capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD sebanyak 450 proyek.
3. Capaian jumlah serapan tenaga kerja sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 98.826 tenaga kerja. Capaian tersebut telah melampaui target kinerja akhir tahun RPJMD Perubahan 2013 -2018 sebanyak 41.971 orang.

Dengan capaian tersebut maka nilai kumulatif PMDN dan PMA sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**REALISASI KUMULATIF PERKEMBANGAN PMDN dan PMA
DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 – 2017**

NO	TAHUN	REALISASI INVESTASI					
		PMDN			PMA		
		PROYEK	INVESTASI (RP Triliun)	Tenaga Kerja	PROYEK	INVESTASI (\$US Juta)	Tenaga Kerja
1	2013	144	17,26	150.484	91	2.697,82	82.256
2	2014	158	25,23	158.352	98	3.663	86.351
3	2015	175	31,37	166.604	110	4.998,72	104.734
4	2016	187	40,38	170.736	121	5.629,44	105.434
5	2017	428	52,76	204.718	432	6.197,88	126.848

Keterangan : Data sampai dengan Desember 2017 DPMPSTSP Prov. Kalbar

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran yang ingin dicapai dengan persentase rata-rata 3 indikator sebesar 476,18 % dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 377,85 dan pencapaian sasaran bisa dikatakan berhasil. Semua target indikator tercapai dan bahkan jauh melampaui target yang ditetapkan.

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.43 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	872.391.000	857.831.355	98,33	107,25	8,92

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,33% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 107,25%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 8,92.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Kebijakan dalam rangka penguatan perencanaan dan pengembangan penanaman modal, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Kerjasama Penanaman Modal serta Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN, Koordinasi Penyelesaian Penanaman Modal, Bimbingan

Teknis dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal serta Instalasi Server Data dan Informasi Investasi.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan target 2018

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	Peningkatan Nilai Investasi	22,84 T	17,78 T	19,96 T	19,50 T	102,35

Realisasi investasi tahun 2016 sebesar Rp. 17,78 Triliun, dengan realisasi PMDN sebesar Rp. 9,01 Triliun dan PMA sebesar Rp. 8,77 Triliun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar Rp 19,96 Triliun dengan pembagian PMDN sebesar Rp.12,38 Triliun dan PMA sebesar Rp.7,58 Triliun, terjadi peningkatan sebesar Rp. 2,18 Triliun.

Dari laporan proyek investasi pada tahun 2016, laporan proyek investasi terealisasi sebesar 217 laporan proyek dan serapan tenaga kerja sebanyak 5.532 orang, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, terjadi peningkatan yang signifikan pada laporan proyek realisasi investasi dimana realisasi sebanyak 552 laporan proyek atau bertambah sebanyak 245 proyek dan serapan tenaga kerja sebanyak 55.396 orang.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan Target Nasional

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017 dan Target Nasional Sasaran Strategis 12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	TARGET NASIONAL
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	Peningkatan Nilai Investasi	19,96 Triliun	17,1 Triliun

Realisasi kinerja tahun 2017 dengan indikator jumlah nilai realisasi investasi belum mencapai target yang ditetapkan oleh BKPM RI, dengan target Rp. 17,1 Triliun, capaian pada realisasi investasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 19,96 Triliun atau sebesar 116,73%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan investasi secara makro;
2. Belum optimalnya penyediaan faktor-faktor penunjang dalam merangsang dan mempercepat masuknya investasi
3. Kabupaten/Kota belum seluruhnya memiliki data dan informasi Penanaman Modal di wilayahnya

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

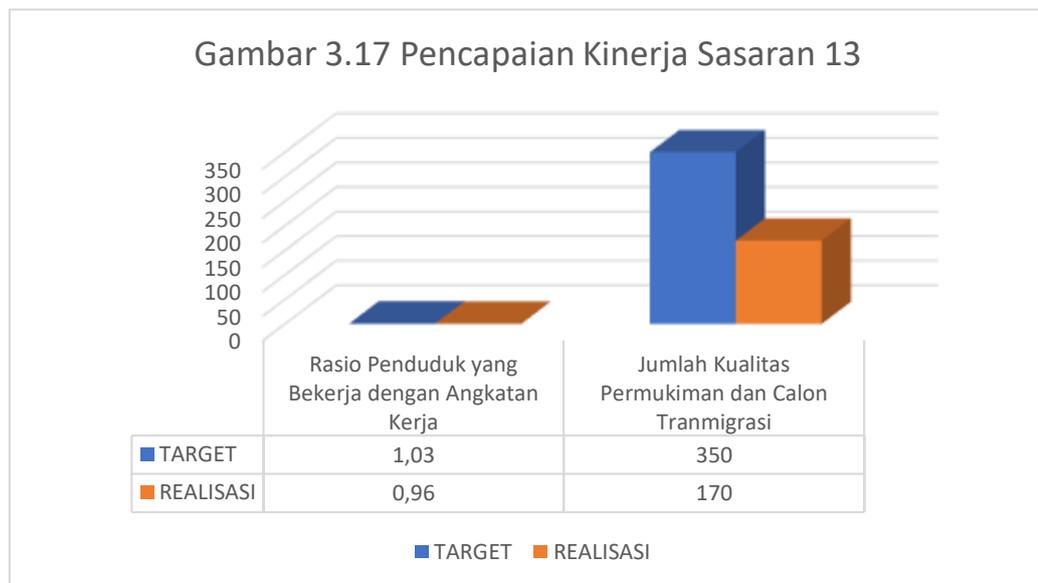
1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan investasi makro yang berorientasi pada unggulan daerah.
2. Mengintegrasikan program antar sektor dan antar Instansi/Institusi
3. Perlu disediakan informasi bulanan tentang pendaftaran penanaman modal dan izin prinsip serta realisasi investasi dari BKPM secara rutin yang terinci datanya;
4. Mempersiapkan regulasi yang terkait dengan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat sehingga kedepan semua kegiatan penanaman modal yang nilai investasinya Rp. 500 jt ke atas wajib menyampaikan LKPM.
5. Terus memperbaiki faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim investasi

13. Sasaran Strategis 13 Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 13

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	1) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,03	0,96	93,20%
		2) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	350 KK	170 KK	48,75%
Capaian Kinerja					70,97%



Pada sasaran tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Target rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja 1,03 tercapai sebesar 0,96 (capaian 93,20 persen). Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.303.198 orang jika dibandingkan dengan Agustus 2016, penduduk yang bekerja naik sebanyak 15.375



orang, sedangkan jumlah angkatan kerja sebanyak 2.410.000 orang jika dibandingkan dengan Agustus 2016, angkatan kerja naik sebanyak 21.242 orang.

Struktur penduduk yang bekerja memperlihatkan penduduk yang bekerja menurut sektor/lapangan pada sektor pertanian masih merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 51,76 persen (1.192.196 orang), hal tersebut seiring dengan kondisi pertumbuhan lapangan kerja pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 20,55 persen, Konstruksi sebesar 15,10 persen dan Pertanian sebesar 7,22 persen.

- 2) Target jumlah kualitas permukiman dan calon transmigrasi sebesar 350 KK, tercapai sebanyak 170 KK (capaiannya sebesar 48,57 persen).

Untuk kawasan permukiman, yang menentukan adalah daerah penerima transmigrasi yang ada di kabupaten karena dipengaruhi oleh usulan kabupaten yang bersangkutan dan ketersediaan lahan atau fisik bangunan. Hingga Tahun 2017 masih terbina 9 (sembilan) Unit Permukiman Transmigrasi (16 lokasi Unit Permukiman Transmigrasi). 9 (sembilan) Unit Permukiman Transmigrasi tersebut berada di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang.

Permukiman transmigrasi yang dapat terealisasi yaitu 170 KK/625 jiwa sebagai berikut:

- ✓ Lokasi Semuning Kecamatan Jagoibabang Kabupaten Bengkayang sebanyak 70 KK, pada tahap 1 sebanyak 50 KK/185 jiwa dan tahap 2 sebanyak 20 KK/66 jiwa.
- ✓ Lokasi Sei. Beruang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau sebanyak 25 KK/100 jiwa.
- ✓ Lokasi Sebetung Paluk Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang sebanyak 75 KK/301 jiwa.

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.47 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.510.433.100	1.415.544.340	93,72	70,97%	n/a
		Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	85.824.000	83.484.000	97,27		
Rata – Rata					95,49	70,97%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,49% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 70,97%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%.



- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini memuat 6 (enam) jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- ✓ **Pelaksanaan Akreditasi Bagi Lembaga Pelatihan**

Kegiatan ini bertujuan sebagai proses pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga pelatihan kerja telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja berbasis kualifikasi KKNi dan/atau SKKNi dan/atau Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

- ✓ **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja**

Mewujudkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki dan menguasai bidang profesi tertentu dan berkualitas, memiliki berbagai keahlian dan keterampilan, memiliki kecepatan dalam menyesuaikan diri pada pekerjaan dan lingkungan baru. Program/kegiatan pelatihan berbasis kompetensi telah dituangkan kedalam langkah operasional, yang diselenggarakan oleh Unit Latihan Kerja Industri Provinsi, BLK/LLK Kabupaten dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, berdampak positif dalam meningkatkan tenaga kerja yang memiliki daya saing tinggi dalam memasuki dunia kerja yang semakin ketat persaingannya.

- ✓ **Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna dan Pemagangan**

Kegiatan Pemagangan yang diselenggarakan bagi masyarakat umum, pencari kerja, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan, maupun para pekerja/TKI yang dideportasi, mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan bidang kejuruan, yang berorientasi kepada penyerapan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri.

- ✓ **Identifikasi Kebutuhan Latihan**

Identifikasi ini dilaksanakan dengan tahapan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi pencari kerja yang akan dilaksanakan, sehingga berujung pada kesesuaian antara kebutuhan jenis pelatihan dengan kebutuhan perusahaan/dunia usaha.

- ✓ **Pemasaran Lulusan**

Kegiatan ini sebagai langkah mengantarkan pencari kerja yang telah dilatih, untuk diperkenalkan ke perusahaan, dengan maksud agar diikutsertakan dalam program pemagangan ataupun seleksi penerimaan karyawan.

b) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Program ini memuat 2 (dua) jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- ✓ **Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Penempatan Transmigrasi**

Dengan kegiatan ini dapat memperoleh sinkronisasi dan kesepakatan, yang berisi kesanggupan pemerintah Kabupaten/Kota daerah penempatan dan daerah asal dalam melaksanakan program perpindahan dan penempatan transmigran untuk dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama antar daerah (KSAD).

✓ **Penyusunan Rencana Program Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi**

Dengan kegiatan ini perencanaan masing-masing bangunan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi sesuai kebutuhan, kondisi areal calon permukiman transmigrasi, terbangunnya seluruh bangunan dilokasi permukiman transmigrasi yang tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat biaya sesuai dengan rekomendasi perencanaan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2015, 2017 dan target jangka menengah

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja 2015-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 13

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	1) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	0,96	0,96	0,96	1,08	88,89
		2) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	235	371	170	350	48,57



1. Indikator Rasio Penduduk Bekerja dengan angkatan kerja ditargetkan 1,03 dan tercapai 0,96, kondisi tersebut sama dengan kondisi pada Tahun 2015 dan 2016. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018 sebesar 1,08, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 88,88 persen.
2. Indikator Jumlah kualitas permukiman dan calon transmigran ditargetkan 350 KK dan tercapai 170 KK, sedangkan di tahun 2016 paianya sebesar 371 KK dan di tahun 2015 capaian sebesar 235 KK. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA di Tahun 2018 sebesar 350 KK maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 48,57 persen.



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja masih belum bisa dilakukan sampai ke seluruh kabupaten dikarenakan kurang tersedianya anggaran. Saat ini alokasi anggaran hanya di provinsi atau kota dan kabupaten terdekat dengan Unit Latihan Kerja Industri.
2. Kurangnya instruktur latihan kerja yang berada di Unit Latihan Kerja Industri.
3. Keterbatasan alat/mesin untuk pelatihan kerja dan kondisi workshop yang memerlukan perbaikan.
4. Terdapat perusahaan yang tidak menerima dan menyelenggarakan pemagangan karena beranggapan dapat merugikan perusahaan.
5. Penempatan transmigrasi rencananya 250 KK di Kabupaten Bengkayang tetapi terealisasi sebanyak 150 KK ditambah luncuran tahap kedua sebanyak 20 KK, permasalahannya jadwal pembangunan rumah untuk trans tidak sesuai dengan target.
6. Masih banyak lahan transmigrasi yang belum bersertifikat.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan BLK/LLK dan Lembaga Pelatihan Swasta yang berada di Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam rangka penyerapan tenaga kerja yang telah dilatih, maka diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 702/DISNAKERTRANS/2017 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Dengan Industri Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mengusulkan calon instruktur untuk dapat mengikuti diklat dasar Instruktur ke Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
3. Mengusulkan anggaran APBD/APBN untuk perbaikan workshop dan penambahan sarana prasarana pelatihan.
4. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemagangan Dalam Negeri kepada perusahaan-perusahaan.
5. Berkoordinasi dengan kabupaten dan pusat untuk konsisten dalam penyelesaian pembangunan untuk penempatan transmigrasi sesuai dengan jadwal.
6. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah persertifikasian ke BPN Pusat/ATR, sehingga nantinya BPN Provinsi dapat memberikan kemudahan dalam persertifikatan lahan transmigrasi yang belum bersertifikat di Kalimantan Barat.

14. Sasaran Strategis 14 Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 15

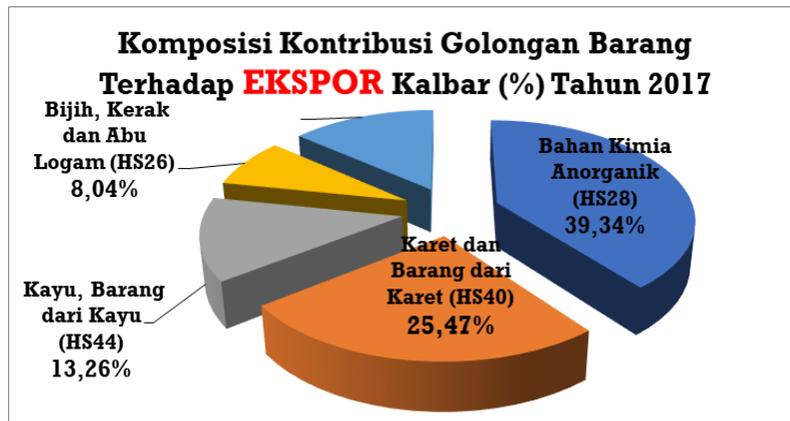
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	1) Nilai ekspor	2.075 juta US \$	827,3 juta US \$	39,86%
		2) Neraca Perdagangan	400 US \$	558,23 US \$	139,55%
		3) Angka Inflasi	4,75	3,86	118,74%
Capaian Kinerja					99,38%

NERACA PERDAGANGAN & EKSPOR

Sektor perdagangan saat ini semakin memberikan peranan yang penting dalam perekonomian daerah dengan menggeserkan peranan industri. Namun demikian secara umum perdagangan Kalbar masih dihadapkan berbagai masalah seperti Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh produk-produk hulu dengan dominasi beberapa komoditi seperti karet, bauksit dan hasil tambang lainnya serta kayu. Total nilai dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktuatif dan tergantung pada Negara tujuan ekspor tradisional seperti US, China, Korea, Jepang, dan Singapura. Dan permasalahan penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan ekse negatif terhadap perdagangan dalam negeri (masuknya bahan pangan illegal dari negara tetangga ke Kalbar seperti gula) dan industri dalam negeri (keluarnya bokar ke negara tetangga).

Kebijakan terkait ekspor mineral tambang pada tahun 2017 (PP Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan keluar negeri dalam jumlah tertentu) memberikan dorongan bagi peningkatan nilai ekspor Kalbar pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016. Diprediksikan bahwa peningkatan nilai ekspor Kalbar pada 2018 tidak akan berbeda jauh dengan nilai ekspor pada tahun 2017 karena kebijakan ekspor terkait bahan tambang pada 2018 dianggap masih mengacu pada kebijakan ekspor pada Tahun 2017. Selain kebijakan dalam negeri yang mendorong peningkatan ekspor Kalbar, harga komoditi dunia pada 2017 yang cenderung naik bila dibandingkan dengan tahun 2016 seperti harga CPO, Karet, Aluminium serta minyak kelapa juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai ekspor Kalbar. Bahkan harga aluminium dunia berdasarkan data dari World Bank meningkat hampir 130% yang pada 2017 berada di atas US\$ 2000 /mt. Walaupun harga komoditi dunia cenderung naik pada 2017, terdapat komoditi ekspor unggulan Kalbar yang mengalami penurunan nilai ekspor karena adanya penurunan volume ekspor komoditi tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2016.

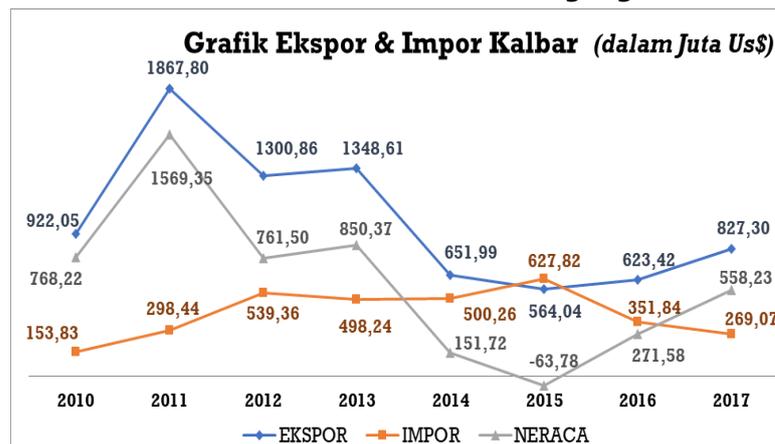
Gambar 3.20 Komposisi Kontribusi Ekspor Kalbar 2017



Sumber : BPS Kalbar, 2018. (Data Diolah)

Neraca perdagangan daerah sampai dengan tahun 2011 menunjukkan trend yang meningkat tajam, namun sejak tahun 2012 menurun akibat pembatasan ekspor bahan tambang sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mulai mengalami kontraksi yang cukup kuat hingga puncaknya pada tahun 2015 pertama kali dalam sejarah terjadi defisit neraca perdagangan Kalbar. Namun demikian, hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena peningkatan impor Kalimantan Barat lebih disebabkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang investasi.

Gambar 3.11 Grafik Eksim & Neraca Perdagangan 2012-2017



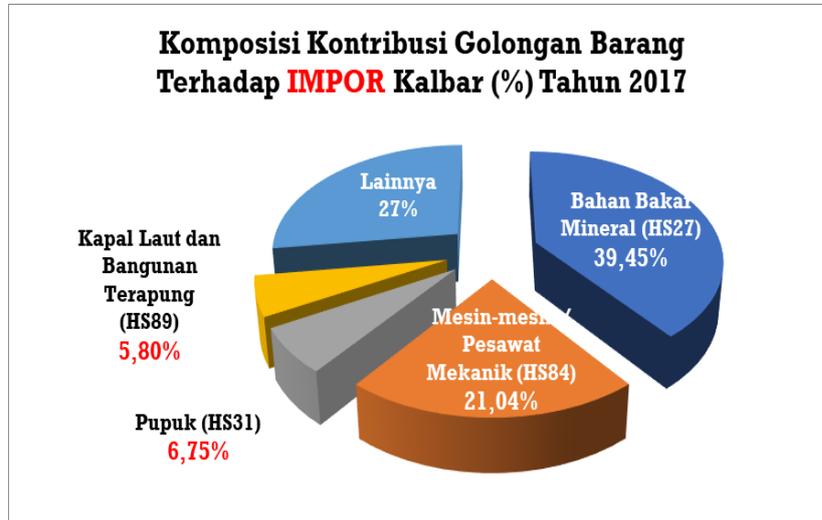
Ket : *) s/d November 2017.

Sumber : BPS Kalbar, 2018. (Data Diolah)

Walaupun Kinerja ekspor yang menunjukkan tren positif mulai 2016 sampai dengan 2017, nilai impor Kalbar pada Tahun 2017 menurun bila dibandingkan dengan tahun Tahun 2016 (BPS Kalbar, 2018) terutama pada HS 84 impor mesin-mesin/pesawat mekanik yang turun. Penurunan impor barang modal atau mesin-mesin menunjukkan bahwa industri yang menggunakan barang modal tersebut telah mempunyai mesin yang memadai untuk melakukan produksi. Kenaikan impor mesin ini mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2016 yang merupakan dampak dari investasi pada smelter bauksit di kabupaten Ketapang dan Sanggau. Hasil dari belanja mesin tersebut berpengaruh pada nilai ekspor Kalbar pada tahun 2017 yang meningkat terutama dari ekspor bahan kimia anorganik

(HS 28). Walaupun terjadi penurunan pada nilai impor mesin-mesin/pesawat mekanik, kontribusinya masih tetap tinggi pada seluruh nilai impor Kalbar sedangkan kontribusi tertinggi yaitu pada impor bahan bakar mineral (HS 27). Tingginya konsumsi bahan bakar mineral di Kalbar yang terlihat dari meningkatnya impor bahan bakar mineral salah satunya mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan konsumsi bahan bakar untuk permesinan produksi.

Gambar 2.22 Komposisi Kontribusi Impor KALBAR 2017



Sumber : BPS Kalbar, 2018. (Data Diolah)

Untuk lebih jelasnya, Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kalbar disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.23. Perkembangan Neraca Perdagangan Kalbar 2010 s/d 2017

Tahun	EKSPOR		IMPOR		NERACA PERDAGANGAN	
	(US\$) F.O.B	Pertumb yoy (%)	(US\$) C.I.F	Pertumb yoy (%)	(US\$)	Pertumb yoy (%)
2010	922.052.102	71,88	153.833.298	-2,62	768.218.804	102,97
2011	1.867.796.771	102,57	298.443.471	94,00	1.569.353.300	104,28
2012	1.300.863.351	-30,35	539.364.364	80,73	761.498.987	-51,48
2013	1.348.607.972	3,67	498.236.319	-7,63	850.371.653	11,67
2014	651.986.280	-51,65	500.262.690	0,41	151.723.590	-82,16
2015	564.043.389	-13,49	627.820.186	25,50	-63.776.797	-142,03
2016	623.420.000	10,53	351.840.000	-43,96	271.580.000	525,83
2017	827.300.000	32,70	269.070.000	-23,52	558.230.000	105,55



INFLASI (c-to-c)

Inflasi Kalbar pada Tahun kalender Desember 2017 sebesar 3,86 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2017 terhadap Desember 2016). Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada tiga kelompok pengeluaran, penurunan indeks pada dua kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 1,46 persen, kelompok kesehatan 0,29 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,91 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau -0,01 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar -0,01 persen. Sedangkan kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok sandang dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga.

Tabel 3.51 Inflasi berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahun 2017 (%)
[1]	[2]
Umum	3,86
1. Bahan Makanan	0,77
2. Makanan Jadi, Minuman, rokok dan Tembakau	3,59
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	6,64
4. Sandang	4,48
5. Kesehatan	5,20
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	8,14
7. Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	2,68

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.52 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	Program Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH)	1.688.550.000	1.649.667.999	97,70	99,38%	n/a
		Program Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA)	703.969.000	671.003.722	95,32		
		Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	1.047.481.000	1.040.298.544	99,31		
		<i>Dukungan UPIKM</i>	<i>1.480.000.000</i>	<i>1.418.974.160</i>	<i>95,88</i>		
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	811.789.500	711.124.350	87,60		
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	468.894.000	443.425.000	94,57		
		Program Pengembangan Ekspor	451.656.000	429.663.800	95,13		
		Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri	288.344.000	276.921.434	96,04		
		<i>Dukungan UPSMB</i>	<i>1.280.000.000</i>	<i>1.247.887.166</i>	<i>97,49</i>		
		Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	2.985.260.000	2.797.156.727	93,70		
Rata-Rata			11.205.943.500	10.686.122.902	95,36	99,38%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,36% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,38%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat diukur karena capaian kerjanya belum mencapai 100%.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- ✓ Peningkatan neraca perdagangan & ekspor Kalbar pada dasarnya tidak dicapai hanya satu instansi saja, namun hal tersebut perlu dukungan oleh instansi lainnya baik oleh instansi pemerintah maupun pengusaha. Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh kegiatan Partisipasi Pada PPE dan Promosi Dagang Luar Negeri Yaitu ikut serta dalam promosi ekspor dalam rangka memperkenalkan produk-produk unggulan Kalbar kepada masyarakat internasional sehingga diharapkan dapat meningkatkan skala penjualan produk unggulan Kalbar.
- ✓ Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengendalikan impor pada tahun 2017 yaitu melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan sebagai upaya untuk menekan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Selain itu, dengan penyelenggaraan pasar murah dapat menjaga lonjakan inflasi di daerah Kalimantan Barat. Selain itu dengan kegiatan Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang sehingga stabilitas harga barang-barang tersebut dapat terjaga.

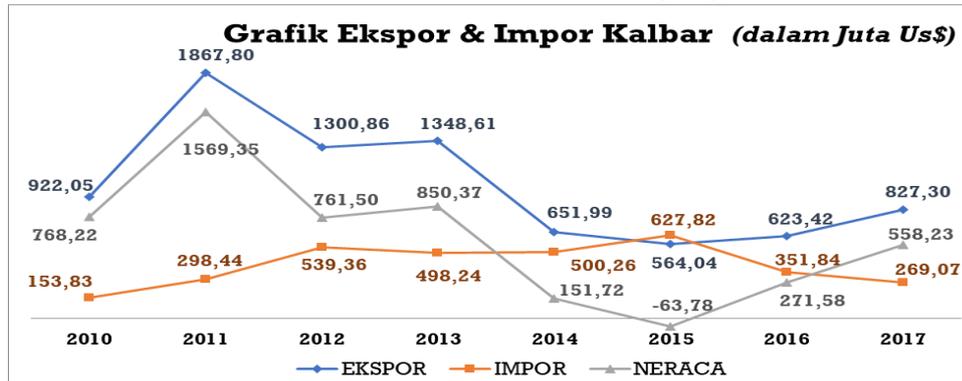
b. **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan target jangka menengah**

Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 14

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	1) Nilai ekspor	565,97	623,42	827,3	2.220,32	37,26
		2) Neraca Perdagangan	68,45	271,58	558,23	450	124,05
		3) Angka Inflasi	6,17	3,88	3,86	4,5	85,78

- Nilai ekspor Kalimantan Barat tahun 2017 mencapai **USD 827,30 Juta**, jauh di bawah target RPJMD sebesar **USD 2.075,07Juta** atau hanya terealisasi sebesar **36,59 %**.
- Neraca perdagangan daerah sampai dengan tahun 2011 menunjukkan trend yang meningkat tajam, namun sejak tahun 2012 menurun akibat pembatasan ekspor bahan tambang sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mulai mengalami kontraksi yang cukup kuat hingga puncaknya pada tahun 2015 pertama kali dalam sejarah terjadi defisit neraca perdagangan Kalbar. Namun demikian, hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena peningkatan impor Kalimantan Barat lebih disebabkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang investasi.

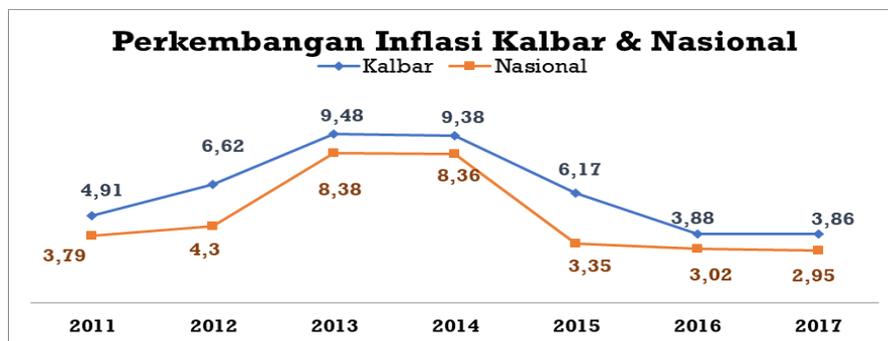
Gambar 3.24 Grafik Eksim & Neraca Perdagangan 2012-2017



Ket : *) s/d November 2017.

Sumber : BPS Kalbar, 2018. (Data Diolah)

Gambar 3.25 Perkembangan Inflasi Kalbar & Nasional 2011 s/d 2017 (c-to-c)



Sumber : BPS Kalbar, 2018. (Data Diolah)

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Penyebab turunnya ekspor ini disebabkan penurunan nilai ekspor komoditi utama Kalbar seperti karet, kayu dan CPO, yaitu sebagai akibat dari **lesunya perekonomian dunia**. Namun disisi lain nilai ekspor membaik dengan peningkatan kontribusi golongan barang Bahan Kimia Anorganik (HS28) dan Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26).

Peningkatan signifikan terjadi pada golongan **barang Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26)** dimana perubahan Tahun 2017 terhadap periode yang sama Tahun 2016 mencapai lebih dari **3.000%**. Hal tersebut merupakan Keuntungan sekaligus Ancaman bagi struktur ekspor Kalbar secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kontribusi golongan barang Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26) dapat mendongkrak nilai ekspor kalbar secara signifikan. Namun hal tersebut juga merupakan ancaman bagi industri hilirisasi Kalbar yang disebabkan kecenderungan Eksportir lebih mudah untuk mengekspor bahan mentah tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Disisi lain dengan meningkatnya volume ekspor akan mengurangi ketersediaan bahan baku tambang di Kalbar secara signifikan.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Selanjutnya, sebagai langkah untuk lebih meningkatkan kinerja ekspor daerah, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya intervensi harga pasar produk pertanian atau perkebunan sejak beberapa tahun terakhir, antara lain melalui Pelayanan peningkatan daya saing komoditi, pameran/promosi dagang dan peningkatan informasi ekspor, dan Hilirisasi komoditi utama daerah.

- **Intervensi pertama melalui pelayanan peningkatan daya saing komoditi**, terutama dilakukan dengan meningkatkan pelayanan ekspor-impor melalui e-SKA (surat keterangan asal / certificate of origin) dan API online (angka pengenal impor).memfasilitasi pengujian standar mutu komoditi utama Kalbar terutama karet dan sawit oleh laboratorium yang telah terakreditasi pada Unit Pegawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Prov. Kalbar.
- **Intervensi selanjutnya melalui pameran/promosi dagang baik di tingkat regional, nasional dan internasional** dimaksudkan menjadi sarana upaya daerah untuk memperluas tujuan pasar (diversifikasi pasar) dan memperluas jenis komoditi yang dipasarkan (diversifikasi komoditi) sehingga diharapkan Kalbar tidak hanya tergantung pada pasar Negara-negara tertentu atau daerah tertentu. Beberapa kegiatan promosi tetap yang diikuti tingkat dunia adalah Pameran Produk Ekspor atau yang dikenal dengan Trade Expo Indonesia (TEI). Diharapkan perluasan tujuan pasar ini akan mendongkrak demand komoditi daerah sehingga meningkatkan harga komoditi tersebut di tingkat petani. Dan juga dilakukan **upaya-upaya peningkatan informasi ekspor** dimana diharapkan para pelaku bisnis daerah termasuk para pengusaha komoditi utama Kalbar dapat mengetahui peluang pasar dan informasi pasar komoditi dunia yang didukung pelayanan surat keterangan asal (SKA/COO) untuk preferensi pajak bagi Negara-negara yang telah terikat kerjasama perdagangan dengan Indonesia.
- **Intervensi terakhir adalah melalui Hilirisasi Komoditi Utama**, yang dilakukan dengan mengupayakan a) penumbuhan dan pengembangan IKM yang mengolah komoditi daerah seperti IKM lidah buaya, IKM karet, dan IKM Kelapa; dan b) fasilitasi penumbuhan kawasan industri untuk pengolahan komoditi utama kalbar seperti karet di Kawasan Industri Mandor, Kabupaten Landak; kelapa sawit di Kawasan Industri Tayan, Kabupaten Sanggau dan Aneka Industri Agro di Kawasan Industri Semparuk. Hilirisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi sehingga diharapkan komoditi primer petani juga akan meningkat. Intervensi ini juga didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2017-2037 yang diharapkan menjadi roda penggerak pertumbuhan Industri Hilirisasi di Kalbar.



15. Sasaran Strategis 15 Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 15

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM	1) Persentase Koperasi Aktif	75 %	68,54 %	91,38 %
		2) Persentase Koperasi Berkualitas	20 %	17,46 %	87,3 %
CAPAIAN KINERJA					89,34%

1. Target Prosentase Koperasi Aktif 2017 adalah 75 %, realisasi tahun 2017 adalah 68,54 % atau sebanyak 2.578 unit, realisasi tidak tercapai karena adanya kekeliruan Kabupaten/kota dalam mengklasifikasi data seharusnya masuk ke koperasi tidak aktif, tapi masuk ke koperasi aktif dan adanya pembubaran koperasi tidak aktif di 12 kabupaten/kota yaitu Mempawah, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, Ketapang, Pontianak, Singkawang, Kabupaten Kayong Utara Dan Kabupaten Kubu Raya.
2. Target Prosentase Koperasi Berkualitas tahun 2017 adalah 20 %, realisasi tahun 2017 adalah 17,46 % atau sebanyak 657 unit, realisasi tidak tercapai karena masih kurangnya sinergitas dan dukungan untuk meningkatkan koperasi yang berkualitas pada OPD yang menyelenggarakan urusan koperasi di Kabupaten/Kota, sedangkan sebagian besar jumlah koperasi keberadaan dan pembinaannya ada pada wilayah Kabupaten/Kota.

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.55 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM	1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	765.784.000	764.893.811	99,88	89,34	n/a
		2. Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	4.619.202.600	4.572.273.000	98,98		
		3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM	1.670.017.700	1.658.089.407	99,28		
		4. Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM					
RATA-RATA					99,38	89,34	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,38% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 89,34%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat terukur dikarenakan capaian kinerja belum mencapai 100%.



• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Peningkatan Koperasi, usaha kecil dan menengah dipengaruhi oleh pembinaan, pelatihan dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus. Upaya-upaya untuk merealisasikan sasaran tersebut melalui pelaksanaan 4 (empat) Program yaitu 3 (tiga) Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan 1 (satu) Program Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM yang meliputi 7 (tujuh) kegiatan, untuk melaksanakan program dan kegiatan ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran dalam APBD Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 898.328.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 896.541.411,- atau (99,80%). Keegiatannya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Revitalisasi Kelembagaan Koperasi
 - ✓ Penilaian Koperasi Berprestasi di Tingkat Provinsi
 - ✓ Pemetaan Keragaan Koperasi Berbadan Hukum Provinsi
 - ✓ Penguatan dan Penumbuhan Kader Koperasi di Kalimantan Barat
 - ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data Koperasi
 - ✓ Wokshop Aktifasi Koperasi Tidak Aktif
 - ✓ Penyuluhan/Sosialisasi Koperasi Perkebunan
2. Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang meliputi 4 (empat) kegiatan, untuk melaksanakan program dan kegiatan ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran dalam APBD Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 648.890.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 633.536.800,- atau (97,63%). Keegiatannya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Penyelenggaraan Pameran /Promosi Produk UKM
 - ✓ Workshop Pengembangan Sentra Usaha UKM
 - ✓ Monev Pemberdayaan UKM
 - ✓ Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM yang meliputi 6 (enam) kegiatan, untuk melaksanakan program dan kegiatan ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran dalam APBD Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 899.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 896.601.707,- atau (99,66%). Keegiatannya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Bimtek Petugas Penilai Kesehatan KSP/KJKS
 - ✓ Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Koperasi Jasa Keuangan Syariah
 - ✓ Workshop Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Berbadan Hukum provinsi
 - ✓ Bimtek Penyusunan Proposal Usaha Koperasi
 - ✓ Workshop Pembiayaan Koperasi
 - ✓ Monev Pemberdayaan Koperasi



4. Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM yang meliputi 4 (empat) kegiatan, untuk melaksanakan program dan kegiatan ini Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran dalam APBD Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.608.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.591.010.086,- atau (98,94%). Kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Diklat Perkoperasian
 - ✓ Diklat Kewirausahaan
 - ✓ Diklat Penunjang Lanjutan
 - ✓ Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan
5. Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM yang meliputi 11 (sebelas) kegiatan, untuk melaksanakan program dan kegiatan ini Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran dalam APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.470.270.000,- atau (99,15%). Kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Pelatihan Perkoperasian Tentang Manajemen Laporan Keuangan dan Akuntansi Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di Daerah Perbatasan
 - ✓ Pelatihan Perkoperasian Tentang Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di Daerah Perbatasan
 - ✓ Pelatihan Perkoperasian Tentang Manajemen Laporan Keuangan dan Akuntansi Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
 - ✓ Pelatihan Kewirausahaan Tentang Manajemen Kemasan Produk Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di Daerah Perbatasan
 - ✓ Pelatihan Membangkitkan Jiwa Kewirausahaan Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di Daerah Perbatasan
 - ✓ Pelatihan Membangkitkan Jiwa Kewirausahaan Bagi Wirausaha Pemula di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
 - ✓ Pelatihan Manajemen Kemasan Produk Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
 - ✓ Pelatihan Kewirausahaan Bidang Produk Hasil Laut Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
 - ✓ Pelatihan Kewirausahaan Bidang Pemasaran Berbasis Teknologi Informatika Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
 - ✓ Pelatihan Pengelola Koperasi Sekolah Bagi Pengurus Koperasi Sekolah di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
 - ✓ Peningkatan Kapasitas SDM UMKM

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan target 2018

Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 15

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017		
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM	1) Persentase Koperasi Aktif	68,88 %	68,54 %	90 %	76,16
		2) Persentase Koperasi Berkualitas	13,44 %	17,46 %	23 %	75,91

1. Realisasi Prosentase Koperasi Aktif 2016 adalah 68,88 % atau sebanyak 3.024 unit, realisasi tahun 2017 adalah 68,54 % atau sebanyak 2.578 unit, menurun sebanyak 446 unit, realisasi menurun karena adanya kekeliruan Kabupaten/kota dalam mengklasifikasi data seharusnya masuk ke koperasi tidak aktif, tapi masuk ke koperasi aktif dan adanya pembubaran koperasi tidak aktif di 12 kabupaten/kota yaitu Mempawah, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, Ketapang, Pontianak, Singkawang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya.
2. Realisasi Prosentase Koperasi Berkualitas tahun 2016 adalah 13,44 % atau sebanyak 590 unit, realisasi tahun 2017 adalah 17,46 % atau sebanyak 657 unit, meningkat sebanyak 67 unit atau (11,35%).

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Sulitnya membangun sinergitas dan mendapat dukungan untuk meningkatkan koperasi yang aktif dan berkualitas pada OPD yang menyelenggarakan urusan koperasi di kabupaten/kota, sedangkan sebagian besar jumlah koperasi keberadaan dan pembinaannya ada pada wilayah kabupaten/kota.
- Kurangnya dukungan dana, sarana dan personil dari OPD di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan koperasi terhadap kegiatan yang bertujuan menciptakan basis data yang terpadu, akurat, lengkap dan komprehensif.
- Para pelaku koperasi dan UMKM kurang menyadari kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi yang melakukan pembinaan.
- Data koperasi dan UMKM yang masih belum valid.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman kepada para pelaku koperasi dan UMKM akan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada instansi yang melakukan pembinaan.
- Agar memperoleh data yang valid baik Pembina maupun pelaku koperasi dan UMKM saling berkomunikasi secara intens.



16. Sasaran Strategis 16 Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	83,08%	83,54%	100,55%

Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua. Kondisi jalan Provinsi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dalam kondisi mantap terus mengalami perbaikan dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 83,54% melebihi target RPJMD tahun 2013-2018 yang menargetkan kondisi jalan mantap untuk tahun 2017 sebesar 83,08%.

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.58 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Penyelenggaraan Jalan	498.639.256.000	454.248.527.930	91,10	100,55%	9,45

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,10% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,55%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 9,54.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor bina marga yang didukung oleh UPJJ yang tersebar di lima wilayah terjadi peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 50,02 % dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dengan capaian kondisi mantap pada tahun 2017 sebesar 83,54% (baik 50,02% dan sedang 33,53%).



b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan target 2018

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 16

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	81,07	80,38	83,54	84,58%	98,77

Panjang jalan provinsi di Kalimantan Barat pada tahun 2017 sepanjang 1.534,76 km, dengan kondisi mantap 69,38% (1.064,76 km) dan kondisi tidak mantap 30,62% (470,00 km). Sedang Panjang jalan provinsi di Kalimantan Barat pada tahun 2016 sepanjang 1.562,30 km, dengan kondisi mantap 80,38% (1.255 km) dan kondisi tidak mantap 19,62 % (307,30 km). Bila melihat data kondisi jalan tersebut maka tahun 2017 kondisi jalan mantap justru mengalami penurunan sebesar 11,00%, dari target tahun 2017 sebesar 83,08% dan realisasi 69,38%. Hal disebabkan karena adanya pengalihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi tersebut diperlukan adanya peningkatan anggaran serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan yang melebihi tonase kapasitas jalan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai akibat dari terus bertambah jumlah kendaraan yang melintas, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 keatas, mengakibatkan harus adanya upaya yang dilakukan secara terus menerus (kontinyu) agar kondisi ruas jalan, khususnya jembatan yang ada jalan agar bias tetap memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna jalan.
- Sebagai besar ruas-ruas jalan provinsi sudah melampaui umur rencana dan penanganan terbatas pada pemeliharaan sementara keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk mencapainya kebutuhan jalan provinsi.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Menyediakan anggaran yang mencukupi serta mengoptimalkan dana tersedia untuk penanganan jalan.
- Sejak tahun 2015 secara bertahap ditangani dengan program peningkatan dan pemeliharaan berkala, namun sebagian besar masih ditangani dengan program pemeliharaan rutin.

17. Sasaran Strategis 17 Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	1) Rumah tangga pengguna air bersih	54,65 %	54,60%	99,9%
		2) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,32 %	47,34%	100,04%
		3) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	82,4 %	82,21 %	99,76%
Capaian Kinerja					99,9%

Kondisi pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dijelaskan melalui indikator kecepatan tempuh rata-rata, pengguna rumah tangga air bersih dan prosentase rumah yang bersanitasi. Capaian tahun 2017 menunjukkan kecepatan tempuh rata-rata kendaraan di jalan sebesar 45 km/jam lebih baik dibanding kondisi tahun sebelumnya sebesar 42 km/jam. Angka capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 45km/jam. Indikator pengguna rumah tangga air bersih tahun 2017 sebesar 54,60 persen. Angka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 54,65 persen. Sedangkan indikator prosentase rumah tangga yang bersanitasi capaian tahun 2017 adalah sebesar 47,34 persen dan telah mencapai target di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 47,32 persen.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan, rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 3,24 poin. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 82,21% naik dari tahun 2016 yang hanya sebesar 78,20% rumah tangga telah menggunakan listrik, meskipun persentase rumah tangga pengguna listrik tahun 2017 mengalami kenaikan tapi belum mencapai target RPJMD tahun 2013-2018 yang ditargetkan sebesar 82,4%. dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.26.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2016





• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.61 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	1. Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	16.266.938.000	16.105.977.000	99,01%	99,9%	-
		2. Rumah Tangga yang Bersanitasi	31.401.358.680	30.619.797.800	97,5%		
		3. Pengendalian Ketenagalistrikan	247.612.300,00	220.184.921	88,92%		
Rata-Rata					95,14%	99,9%	-

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,14% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,9%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat terukur karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran ini Program/kegiatan yang sangat menunjang yaitu Program Rumah tangga yang Terlayani Air Bersih dan Rumah Tangga yang bersanitasi, Program Peningkatan dan Pengembangan Permukiman, serta Program Pengendalian Ketenagalistrikan, karena dengan berbagai kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 dan Target Akhir Jangka Menengah

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja 2015-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	1) Rumah tangga pengguna air bersih	54,58	54,61	54,60	54,69	99,83
		2) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	46,82	47,29	47,34	47,52	99,62
		3) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	74,71%	78,20%	82,21%	86,4%	95,15

Realisasi rumah tangga pengguna air bersih di provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 yaitu 54,58% sedangkan pada tahun 2016 yaitu 54,61%. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan yang kecil yaitu hanya sebesar 0,03%. Sehingga pada tahun 2016, rumah tangga yang belum pengguna air bersih di provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016 adalah 45,39%. Pada tahun 2017, target capaian rumah tangga pengguna air bersih yaitu 54,65%. Untuk meningkatkan dan mencapai target program Nawacita 100 – 0 – 100 diperlukan upaya peningkatan anggaran yang relatif besar agar mencapai capaian air bersih 100%.



Realisasi Rumah Tangga yang Bersanitasi pada Tahun 2015 yaitu 46,82%, sedangkan pada Tahun 2016 yaitu 47,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Tangga yang Bersanitasi mengalami peningkatan sebesar 0,47%. Sehingga Pada Tahun 2016, Rumah Tangga yang Belum Bersanitasi di Provinsi Kalimantan Barat yaitu 52,71%. Pada Tahun 2017, target rumah tangga yang bersanitasi yaitu 47,32%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Dalam mendukung indikator kinerja utama dibidang cipta karya, sebagian kewenangan berada pada pemerintah kabupaten kota. Dalam melaksanakan perannya, pemerintah provinsi melakukan shering kegiatan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yangdimiliki, sehingga perlu ada anggaran yang diajukan melalui dana pusat.
- Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik masih belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata. Penduduk yang belum menikmati listrik kebanyakan di daerah terpencil.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya kerjasama dan koordinasi intensif antara pemprov dan pemda kab/kota dalam menyusun rancangan strategis dengan melakukan sinkronisasi program dan shering kegiatan. Membuat BA serah terima barang dengan pemerintah kabupaten/kota secara akurat dan terukur. Perlu adanya keterpaduan infrastruktur permukiman bidang cipta karya.
- Melakukan survei potensi energi di daerah terpencil untuk penyediaan energi listrik dan menginventarisasi rumah tangga belum berlistrik bagi seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Barat.
- Pengawasan terhadap pemanfaatan energi listrik di Kalimantan Barat dalam rangka konservasi energi listrik untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan energi listrik.

18. Sasaran Strategis 18 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni serta Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Sasaran Strategis 17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
18.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni serta Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan	1) Persentase Perumahan Sehat	39,77 %	44,31%	113,12%
		2) Persentase Rumah yang layak huni	85 %	89,59%	105,4%
Capaian Kinerja					109,26%



Kondisi perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dijelaskan melalui indikator rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat. Capaian tahun 2017 menunjukkan indikator rumah layak huni sebesar 89,59 persen telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 85 persen. Sementara, hal yang sama juga berlaku untuk indikator prosentase perumahan sehat. Capaian tahun 2017 sebesar 44,31 persen telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 39,77 persen.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.61 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
17.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni serta Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Permukiman	378.800.000,00	373.144.775	98,5%	109,26%	10,41
		2. Program Peningkatan dan Penataan PSU Kawasan Perumahan	195.000.000,00	185.572.300	99,2%		
Rata-Rata					98,85%	109,26%	10,41

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,85% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 109,26%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 10,41.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran ini Program/kegiatan yang sangat menunjang yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Permukiman, serta Program Peningkatan dan Penataan PSU Kawasan Perumahan, karena dengan berbagai kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 dan Target Akhir Jangka Menengah

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja 2015-2017 dan target 2018 Sasaran Strategis 17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2015	2016	2017		
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	1) Persentase Perumahan Sehat	15,94	17,03	44,31	47,73	92,83
		2) Persentase Rumah yang layak huni	89,83	90,56	89,59	87,11	102,84



Realisasi Persentase perumahan sehat di provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 yaitu 15,94% sedangkan pada tahun 2016 yaitu 17,03%. Hal ini menunjukkan bahwa perumahan sehat mengalami peningkatan yang kecil. Sedangkan pada tahun 2016, rumah yang layak huni di provinsi Kalimantan Barat adalah 90,56%. Pada tahun 2017, realisasi capaian rumah yang layak huni yaitu 89,59%. Untuk meningkatkan dan mencapai target program Nawacita 100 – 0 – 100 diperlukan upaya peningkatan anggaran yang relatif besar agar mencapai capaian air bersih 100%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Permasalahan yang terjadi adalah belum tersedianya data yang akurat mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di 14 Kab/Kota sehingga sangat menyulitkan didalam proses perencanaan maupun didalam pengambilan suatu kebijakan dikarenakan SKPD yang menangani bidang perumahan baik Provinsi maupun Kab/Kota semuanya baru terbentuk pada tahun 2017.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Perlu dilaksanakan pendataan yang maksimal atau komprehensif mengenai data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 14 Kab/Kota se Kalbar.
- Perlu adanya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) baik RP3KP Prov maupun Kab/Kota se Kalbar.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan anggaran belanja langsung sesuai sasaran strategis dalam APBD Tahun 2017 sebesar **Rp 2.102.434.930.753,00** dan terjadi perubahan anggaran menjadi **Rp. 2.480.131.882.334,00** terealisasi sebesar **Rp 2.156.066.521.968,00**. Realisasi capaian IKU Pemprov Kalbar pada umumnya meningkat, kemudian jika dilihat dari realisasi anggaran strategis terdapat **efisiensi anggaran sebesar Rp. 324.065.360.366,00**.

Untuk tahun anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai target yang sangat baik yaitu Opini BPK berupa **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini, masih menunggu keputusan dari BPK yang biasanya baru terbit pada bulan Juni atau Juli 2018 dengan target yang sama yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Tabel 3.63 REALISASI KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN					
		APBD	REALISASI	%	APBN	REALISASI	%
	URUSAN WAJIB	2.308.630.013.506,00	2.156.066.521.968,00	93,39	202.146.608.000,00	175.853.269.649,00	
1	Pendidikan	442.985.519.323,00	418.830.177.550,00	94,55	9.342.628.000,00	8.889.277.750,00	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR	442.985.519.323,00	418.830.177.550,00	94,55	9.342.628.000,00	8.889.277.750,00	95,15
2	Kesehatan	325.954.478.550,00	287.597.596.269,00	88,23	29.584.996.000,00	26.981.090.752,00	
	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR	28.755.004.550,00	26.664.824.054,00	92,73	29.584.996.000,00	26.981.090.752,00	91,20
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK	278.762.200.000,00	243.147.219.740,00	87,22			
	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR	11.499.035.000,00	11.150.442.987,00	96,97			
	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR	6.938.239.000,00	6.635.109.488,00	95,63			
3	Pekerjaan Umum	1.058.414.982.130,00	999.843.532.560,00		36.750.914.000,00	36.137.484.892,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALBAR	1.058.414.982.130,00	999.843.532.560,00	94,47	36.750.914.000,00	36.137.484.892,00	98,33
4	Perumahan	2.309.038.500,00	2.209.545.206,00		550.000.000,00	496.802.300,00	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR	2.309.038.500,00	2.209.545.206,00	95,69	550.000.000,00	496.802.300,00	90,33
5	Perencanaan Pembangunan	10.868.507.300,00	10.622.332.920,00		866.994.000,00	779.679.957,00	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR	9.628.850.300,00	9.391.092.463,00	97,53	866.994.000,00	779.679.957,00	89,93
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR	1.239.657.000,00	1.231.240.457,00	99,32			
6	Perhubungan	12.261.514.502,00	10.609.634.784,00				
	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALBAR	12.261.514.502,00	10.609.634.784,00	86,53			
7	Kependudukan dan Catatan Sipil	5.326.669.110,00	5.278.791.726,00				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR	5.326.669.110,00	5.278.791.726,00	99,10			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.168.000.000,00	2.084.269.200,00		2.080.845.000,00	1.965.133.500,00	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALBAR	2.168.000.000,00	2.084.269.200,00	96,14	2.080.845.000,00	1.965.133.500,00	94,44
9	Sosial	1.984.436.700,00	1.933.025.630,00		17.929.843.000,00	17.803.094.150,00	
	DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR	1.984.436.700,00	1.933.025.630,00	97,41	17.929.843.000,00	17.803.094.150,00	99,29



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017

10	Ketenagakerjaan	1.869.936.000,00	1.720.091.079,00		14.284.653.000,00	11.174.058.925,00	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR	1.869.936.000,00	1.720.091.079,00	91,99	14.284.653.000,00	11.174.058.925,00	78,22
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.055.044.300,00	6.995.256.218,00		2.518.214.000,00	2.505.471.260,00	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALBAR	7.055.044.300,00	6.995.256.218,00	99,15	2.518.214.000,00	2.505.471.260,00	99,49
12	Penanaman Modal	3.176.541.000,00	3.096.370.875,00		500.000.000,00	498.833.860,00	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALBAR	3.176.541.000,00	3.096.370.875,00	97,48	500.000.000,00	498.833.860,00	99,77
13	Pemudaan dan Olahraga	26.863.859.610,00	26.078.579.924,00		5.645.396.000,00	5.100.444.544,00	
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR	26.863.859.610,00	26.078.579.924,00	97,08	5.645.396.000,00	5.100.444.544,00	90,35
14	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9.623.043.800,00	9.141.497.976,00				
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR	3.398.274.200,00	3.201.205.444,00	94,20			
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR	3.129.085.300,00	2.971.178.790,00	94,95			
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR	3.095.684.300,00	2.969.113.742,00	95,91			
15	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	172.844.724.653,00	155.184.438.576,00		2.073.000.000,00	1.500.791.989,00	
	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	67.416.455.378,00	62.316.204.285,00	92,43	2.073.000.000,00	1.500.791.989,00	72,40
	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR	51.438.178.200,00	42.498.108.212,00	82,62			
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR	5.660.598.900,00	5.181.027.908,00	91,53			
	INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR	10.633.678.900,00	10.594.946.999,00	99,64			
	BADAN PENGEMBANGAN SUBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALBAR	15.307.335.965,00	13.644.644.879,00	89,14			
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR	20.916.142.310,00	19.527.628.099,00	93,36			
	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALBAR	1.472.335.000,00	1.421.878.194,00	96,57			
16	Ketahanan Pangan	17.908.412.650,00	17.565.398.500,00		17.416.087.000,00	14.078.946.788,00	
	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR	17.908.412.650,00	17.565.398.500,00	93,64	17.416.087.000,00	14.078.946.788,00	80,84
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.127.876.500,00	5.743.093.394,00	93,72	61.223.170.000,00	46.576.127.932,00	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR	6.127.876.500,00	5.743.093.394,00	93,72	61.223.170.000,00	46.576.127.932,00	76,08
18	Komunikasi dan Informatika	3.110.653.000,00	3.041.260.234,00				
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR	3.110.653.000,00	3.041.260.234,00	97,77			



19	Perpustakaan	28.602.357.900,00	28.428634.613,00		1.379.868.000,00	1.366.031.050,00	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALBAR	28.602.357.900,00	28.428634.613,00		1.379.868.000,00	1.366.031.050,00	99,00
	URUSAN PILIHAN	171.501.868.828,00	161.180.534.304,00		361.780.819.000,00	320.542.428.586,00	
1	Pertanian	124.685.652.628,00	118.065.108.103,00		355.009.315.000,00	314.485.276.415,00	
	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI KALBAR	107.957.074.628,00	102.909.354.180,00	95,32	344.554.384.000,00	306.110.222.865,00	88,84
	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR	16.728.578.000,00	15.155.753.923,00	90,60	10.454.931.000,00	8.375.053.550,00	80,11
2	Kehutanan	3.815.583.350,00	3.380.879.242,00		920.800.000,00	917.698.305,00	
	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR	3.815.583.350,00	3.380.879.242,00	88,61	920.800.000,00	917.698.305,00	99,66
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	13.834.691.950,00	12.882.367.202,00				
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALBAR	13.834.691.950,00	12.882.367.202,00	93,12			
4	Kelautan dan Perikanan	17.959.997.400,00	16.166.056.855,00		2.665.698.000,00	2.265.491.534,00	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR	17.959.997.400,00	16.166.056.855,00	90,01	2.665.698.000,00	2.265.491.534,00	84,99
5	Perdagangan	11.205.943.500,00	10.686.122.902,00		3.185.006.000,00	2.873.962.332,00	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR	11.205.943.500,00	10.686.122.902,00	95,36	3.185.006.000,00	2.873.962.332,00	90,23
	TOTAL ANGGARAN	2.480.131.882.334,00	2.156.066.521.968,00		563.927.427.000,00	496.395.698.235,00	



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 merupakan Laporan Kinerja pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan data yang disampaikan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2013-2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. LKj menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah sebagai bahan pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Selain itu LKj juga menjadi ukuran akan penilaian dan keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

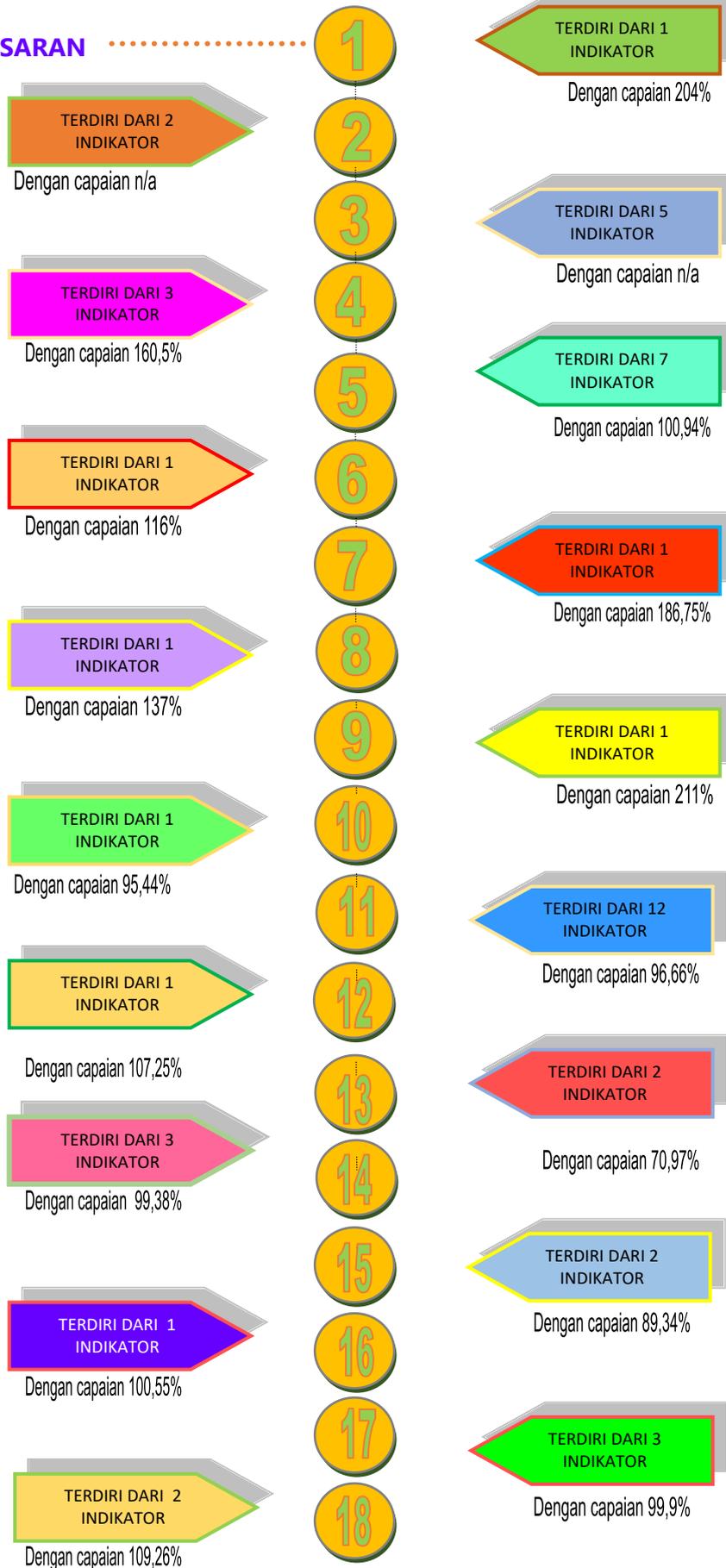
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017 sebagian besar dapat terpenuhi dan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 18 (delapan belas) sasaran strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2017, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:





SASARAN





Beberapa capaian keberhasilan indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2017 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dari 1.467 orang pada tahun 2016 menjadi 2.065 orang pada tahun 2017.
2. Meningkatnya Angka Putus Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dengan rata-rata capaian 120 % dari target yang telah ditetapkan.
3. Luas penurunan kerusakan hutan dan penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan dengan capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu mencapai 116% dan 186,75%.
4. Meningkatnya jumlah populasi ternak dari target 47.450.951 ekor dan realisasinya mencapai 62.217.285 ekor dengan capaian kinerja sebesar 131%.
5. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan dari target 1.659.000 ton dan realisasinya sebesar 2.604.326 ton dengan capaian kinerja sebesar 156,98%.
6. Meningkatnya nilai investasi dari target 18,61 T dan realisasinya 19,96 T sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,25%.
7. Capaian neraca perdagangan yang tinggi dari target 400 US \$ dengan realisasi sebesar 517,55 US \$ dan capain kinerjanya sebesar 139,55%.
8. Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih dengan capaian rata – rata sebesar 103,64%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat telah berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam target perencanaan kinerja namun masih belum tercapai secara optimal, yakni antara lain prevalensi balita gizi buruk, jumlah produksi perikanan, produksi tanaman pangan, nilai tukar petani, rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, jumlah kualitas permukiman dan calon transmigrasi, nilai ekspor, persentase koperasi aktif, persentase koperasi berkualitas, rumah tangga pengguna air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021). Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke depan.

Untuk meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke depan telah dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:



1. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj.
2. Melakukan penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja OPD/dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan khususnya dalam peningkatan Pembangunan Manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar siap pakai.
3. Konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan dalam rangka membuka daerah-daerah terisolir, perbatasan dan daerah tertinggal serta mendukung peningkatan produktivitas di berbagai sektor pembangunan termasuk upaya peningkatan ekspor-impor dan investasi di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Melanjutkan dan meningkatkan program-program dan kegiatan yang dapat menggerakkan ekonomi sektor riil terhadap sektor-sektor strategis antara lain; pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, dan pengembangan sektor perkoperasian/Credit Union dan pelaku usaha kecil dan menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran.
5. Secara terus-menerus melakukan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, manajemen pemerintahan, sistem AKIP dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Drs. DODI RIYADMADJI, MM

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.010 orang	2.065 orang	204%
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,5	n/a	n/a
		3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,5	n/a	n/a
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4) Angka usia harapan hidup	69	n/a	n/a
		5) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	240	240	100%
		6) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	22,2	22,2	100%
		7) Prevalensi balita gizi buruk	<5%	6,5%	70%
		8) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	<0,5%	0,22	156%
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	9) Angka Putus Sekolah			
		a. SD/MI	0,53	0,19	164 %
		b. SMP/MTs	0,72	0,36	150 %
		c. SMA/MA	0,96	0,31	167,7%
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	10) Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		a. SD/MI/Paket A	114,19%	112,67%	101,35%
		b. SMP/MTs/Paket B	97,56%	97,15%	100,42%
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	73,40%	72,33%	101,48%
		11) Angka rata-rata lama sekolah	7,35 tahun	7,35 tahun	100%
		12) AngkaPartisipasiMurni (APM)			
		a. SD/MI/Paket A	99,5%	99,66%	100,16%
		b. SMP/MTs/Paket B	72,05%	75,04%	104,15%
c. SMA/SMK/MA/Paket C	56,2%	57,88%	102,99%		
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	13) Luas penurunan kerusakan Hutan	1000 Ha	1.160 Ha	116%
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	14) Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	5.780	766	186,75%
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	15) Jumlah Populasi Ternak	47.450.951 ekor	65.165.304 ekor	137 %
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar	16) Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan	693.514 ton	1.464.246 ton	211%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	17) Jumlah Produksi Perikanan	251.750,84 ton	240.294,37 ton	95,44%
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	18) Jumlah Produksi Pertanian			
		• Tanaman Pangan			
		a) Padi	1.570.400 ton	1.501.548 ton	95,62%
		b) Jagung	114.900 ton	138.497 ton	120,54%
		c) Kedelai	2.250 ton	837 ton	37,20%
		d) Kacang Tanah	1.030 ton	644 ton	62,52%
		e) Kacang Hijau	1.200 ton	1.375 ton	114,58%
		f) Ubi Kayu	167.000 ton	137.190 ton	82,15%
		g) Ubi Jalar	11.100 ton	10.380 ton	93,51%
		• Tanaman Hortikultura			
		a) Buah-Buahan	225.600 ton	263.070 ton	116,61%
		b) Sayur-Sayuran	54.100 ton	58.187 ton	107,55%
		c) Biofarmaka	10.350 ton	12.547 ton	121,23%
		d) Tanaman Hias	466.600 kg/tangkai/pohon	530.230 kg/tangkai/pohon	113,64%
19) Nilai Tukar Petani	102,87	97,89	95,16%		
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	20) Peningkatan Nilai Investasi	18,61 T	19,96 T	107,25%
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	21) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,03	0,96	93,20%
		22) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	350 KK	170KK	48,75%
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	23) Nilai ekspor	2.075 juta US \$	827,3 juta US \$	39,86%
		24) Neraca Perdagangan	400 US \$	558,23 US \$	139,55%
		25) Angka Inflasi	4,75	3,86	118,74%
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM	26) Persentase Koperasi Aktif	75 %	68,54 %	91,38 %
		27) Persentase Koperasi Berkualitas	20 %	17,46 %	87,3 %
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	28) Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	83,08%	83,54%	100,55%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	29) Rumah tangga pengguna air bersih	54,65 %	54,60%	99,9%
		30) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,32 %	47,34%	100,04%
		31) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	82,4 %	82,21 %	99,76%
18.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni serta Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan	32) Persentase Perumahan Sehat	39,77 %	44,31%	113,12%
		33) Persentase Rumah yang layak huni	85 %	89,59%	105,4%

Jumlah Total Anggaran Strategis Tahun 2017 : **Rp 2.480.131.882.334,00**

Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2017 : **Rp 2.156.066.521.968,00**

Pontianak, 28 Maret 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Drs. DODI RIYADMADJI, MM



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. CORNELIS, MH

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pontianak, Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Drs. CORNELIS, MH



Jalan Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 Faks. (0561) 730062
PONTIANAK

Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
		a. SD/MI	99,8%
		b. SMP/MTs	75%
		2. Rasio guru terhadap murid SD	1:16
		3. Rasio guru terhadap murid SMP	1:16
		4. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98%
		5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,46
2.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK dan APM melalui penyelenggaraan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		a. SD/MI/Paket A	121%
		b. SMP/MTs/Paket B	94%
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	86%
		2. Angka Partisipasi Murni (APM)	
		a. SD/MI/Paket A	99,8%
		b. SMP/MTs/Paket B	75%
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	67%
		3. Angka Melek Huruf	98%
		4. Angka rata-rata lama sekolah	7,4 tahun
3.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian	
		a) Tanaman Pangan	3.138.000 ton
		b) Tanaman Hortikultura	573.000 ton
4.	Meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan besar (Sub sektor perkebunan)	Jumlah Produksi Perkebunan	1.659.000 ton
5.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak serta meningkatnya konsumsi produk peternakan (Sub sektor peternakan)	Jumlah Populasi Ternak (sapi/kerbau)	218.564 ekor
6.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat (Sektor perikanan)	Jumlah Produksi Perikanan	288.760 ton
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan (Sektor kehutanan)	Luas Hutan yang direhabilitasi	47.613 Ha
8.	Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi peningkatan ekonomi masyarakat (Sektor pertambangan)	Angka pertumbuhan sektor pertambangan	6,50
9.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM	1. Jumlah koperasi	5.533 unit
		2. Jumlah Usaha Mikro	90.307 unit

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing	3. Jumlah Usaha Kecil	16.480 unit
		4. Jumlah Usaha Menengah	1.604 unit
10.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri (Sektor perdagangan)	1. Nilai ekspor	1,939,32 US \$ juta
		2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.142
		3. Produktifitas total daerah	18,07
		4. Nilai tukar petani	102,87
		5. Jumlah Industri Pengolahan	150 IKM
11.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	1. Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,03
		2. Tingkat pengangguran	3,13%
		3. Jumlah transmigran program pemerintah (KK)	500 KK
12.	Terlayanan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Tingkat kemiskinan	4,92%
13.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,006756
		2. Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	83,08%
14.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan pemukiman yang mencakup sector sanitasi dan air bersih	1. Rumah tangga pengguna air bersih	54,65 %
		2. Rumah tangga yang bersanitasi	47,32 %
		3. Lingkungan perumahan sehat	39,77 %
		4. Rumah yang layak huni	85 %
		5. Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	82,4 %
		6. Rasio ketersediaan daya listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	600
		7. Luas wilayah produktif/Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20%
15.	Meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi inventasi baik sektor primer, sekunder dan tersier	1. Realisasi PMDN	
		a. Jumlah Proyek	150
		b. Nilai Investasi (Rp. Trilyun)	Rp. 27,3 T
		- Swasta	Rp. 14.245.460 jt
		Kontribusi	70,35%
		- Pemerintah	Rp. 6.002.556 jt
		Kontribusi	29,65 %
		c. Serapan tenaga kerja	147.388 orang
		2. Realisasi PMA	
		a. Jumlah Proyek	110
		b. Nilai Investasi (US \$ Milyar)	4.285
		c. Serapan tenaga kerja	86.033 orang
		3. Pertumbuhan ekonomi	6,14%
16.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka usia harapan hidup	69
		2. Angka kematian ibu melahirkan	128
		3. Angka kematian bayi	16

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		4. Prevalensi balita gizi buruk	<5%
		5. Rasio puskesmas per satuan penduduk	1:19.635
		6. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1:121.245
		a. Jumlah Rumah Sakit	40 buah
		b. Jumlah tempat tidur rumah sakit	4.850 buah
		c. Rasio tempat tidur per satuan penduduk	1:1000
		7. Rasio dokter per satuan penduduk	
		a. Rasio dokter umum per satuan penduduk	1:7.674
		b. Rasio dokter gigi per satuan penduduk	1:24.871
		c. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	1:22.876
		8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk	
		a. Rasio perawat per satuan penduduk	1:856
		b. Rasio bidan per satuan penduduk	1:1.714
		9. Cakupan puskesmas per kecamatan	1,4

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN	
		APBD	APBN
	URUSAN WAJIB	1.952.653.237.253,00	218.562.591.000,00
1	Pendidikan	434.243.529.323,00	7.586.568.000,00
	– DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR	434.243.529.323,00	7.586.568.000,00
2	Kesehatan	271.945.317.150,00	36.440.590.000,00
	– DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR	14.012.003.550,00	36.440.590.000,00
	– RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK	245.968.402.600,00	
	– RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR	5.331.922.000,00	
	– RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR	6.632.989.000,00	
3	Pekerjaan Umum	973.623.067.185,00	40.047.194.000,00
	– DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALBAR	973.623.067.185,00	40.047.194.000,00
4	Perumahan	2.295.199.500,00	400.000.000,00
	– DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR	2.295.199.500,00	400.000.000,00
5	Perencanaan Pembangunan	10.143.086.700,00	949.291.000,00
	– BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR	8.903.429.700,00	949.291.000,00
	– BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR	1.239.657.000,00	
6	Perhubungan	11.999.187.500,00	
	– DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALBAR	11.999.187.500,00	
7	Kependudukan dan Catatan Sipil	3.724.414.110,00	1.602.255.000,00
	– DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR	3.724.414.110,00	1.602.255.000,00
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.204.000.000,00	2.080.845.000,00
	– DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALBAR	2.204.000.000,00	2.080.845.000,00
9	Sosial	5.982.931.100,00	17.744.778.000,00
	– DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR	5.982.931.100,00	17.744.778.000,00
10	Ketenagakerjaan	1.911.000.000,00	16.108.891.000,00
	– DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR	1.911.000.000,00	16.108.891.000,00
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.055.004.300,00	1.755.785.000,00
	– DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALBAR	3.055.004.300,00	1.755.785.000,00
12	Penanaman Modal	3.100.492.000,00	771.644.000,00
	– DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALBAR	3.100.492.000,00	771.644.000,00
13	Pemudaan dan Olahraga	21.543.631.000,00	
	– DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR	21.543.631.000,00	
14	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.907.926.350,00	
	– BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR	3.398.274.200,00	

	– BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR	1.517.325.300,00	
	– SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR	2.992.326.850,00	
15	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	143.249.800.885,00	986.380.000,00
	– SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	49.464.721.450,00	986.380.000,00
	– SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR	28.375.481.600,00	
	– BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR	5.524.582.000,00	
	– INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR	18.050.000.000,00	
	– BADAN PENGEMBANGAN SUBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALBAR	16.150.359.150,00	
	– BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR	24.193.201.685,00	
	– BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALBAR	1.491.455.000,00	
16	Ketahanan Pangan	17.908.412.650,00	30.615.068.000,00
	– DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR	17.908.412.650,00	30.615.068.000,00
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.225.754.500,00	60.093.434.000,00
	– DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR	6.225.754.500,00	60.093.434.000,00
18	Komunikasi dan Informatika	2.656.250.000,00	
	– DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR	2.656.250.000,00	
19	Perpustakaan	28.934.233.000,00	1.379.868.000,00
	– DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALBAR	28.934.233.000,00	1.379.868.000,00
	URUSAN PILIHAN	149.781.693.500,00	364.039.552.000,00
1	Pertanian	116.375.905.000,00	345.842.282.000,00
	– DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR	96.835.905.000,00	337.979.508.000,00
	– DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR	19.540.000.000,00	7.862.774.000,00
2	Kehutanan	3.790.707.000,00	721.162.000,00
	– DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR	3.790.707.000,00	721.162.000,00
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	573.210.950,00	13.607.067.900,00
	– DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALBAR	573.210.950,00	13.607.067.900,00
4	Kelautan dan Perikanan	17.835.927.050,00	195.690.100,00
	– DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR	17.835.927.050,00	195.690.100,00
5	Perdagangan	11.205.943.500,00	3.673.350.000,00
	– DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR	11.205.943.500,00	3.673.350.000,00
	TOTAL ANGGARAN	2.102.434.930.753,00	582.602.143.000,00

Lampiran II

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(SETELAH PERUBAHAN)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.010 orang
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,5
		3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,5
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4) Angka usia harapan hidup	69
		5) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	240
		6) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	22,2
		7) Prevalensi balita gizi buruk	<5%
		8) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	0,5%
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	9) Angka Putus Sekolah	
		a. SD/MI	0,53
		b. SMP/MTs	0,72
		c. SMA/MA	0,96
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	10) Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		a. SD/MI/Paket A	114,19%
		b. SMP/MTs/Paket B	97,56%
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	73,40%
		11) Angka rata-rata lama sekolah	7,35 tahun
		12) Angka Partisipasi Murni (APM)	
		a. SD/MI/Paket A	99,5%
		b. SMP/MTs/Paket B	72,05%
c. SMA/SMK/MA/Paket C	56,2%		
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	13) Luas penurunan kerusakan Hutan	1000 Ha
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	14) Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	5.780
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	15) Jumlah Populasi Ternak	47.450.951 ekor
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar	16) Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	693.514 ton

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	17) Peningkatan Produksi Perikanan (ton) hasil kelautan dan perikanan	251.750,84 ton
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	18) Jumlah Produksi Pertanian	
		• Tanaman Pangan	
		a) Padi	1.570.400 ton
		b) Jagung	114.900 ton
		c) Kedelai	2.250 ton
		d) Kacang Tanah	1.030 ton
		e) Kacang Hijau	1.200 ton
		f) Ubi Kayu	167.000 ton
		g) Ubi Jalar	11.100 ton
		• Tanaman Hortikultura	
		a) Buah-Buahan	225.600 ton
		b) Sayur-Sayuran	54.100 ton
		c) Biofarmaka	10.350 ton
		d) Tanaman Hias	466.600 kg/tangkai/pohon
	19) Nilai Tukar Petani	102,87	
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	20) Peningkatan Nilai Investasi	18,61 T
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	21) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,03
		22) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	350 KK
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	23) Nilai ekspor	2.075 juta US \$
		24) Neraca Perdagangan	400 US \$
		25) Angka Inflasi	4,75
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya omzet KUMKM	26) Persentase Koperasi Aktif	75 %
		27) Persentase Koperasi Berkualitas	20 %
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	28) Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	83,08%
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	29) Rumah tangga pengguna air bersih	54,65 %
		30) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,32 %
		31) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	82,4 %
18.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni serta Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan	32) Persentase Perumahan Sehat	39,77 %
		33) Persentase Rumah yang layak huni	85 %

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN	
		APBD	APBN
	URUSAN WAJIB	2.308.630.013.506,00	202.146.608.000,00
1	Pendidikan	442.985.519.323,00	9.342.628.000,00
	– DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR	442.985.519.323,00	9.342.628.000,00
2	Kesehatan	325.954.478.550,00	29.584.996.000,00
	– DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR	28.755.004.550,00	29.584.996.000,00
	– RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK	278.762.200.000,00	
	– RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR	11.499.035.000,00	
	– RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR	6.938.239.000,00	
3	Pekerjaan Umum	1.058.414.982.130,00	36.750.914.000,00
	– DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALBAR	1.058.414.982.130,00	36.750.914.000,00
4	Perumahan	2.309.038.500,00	550.000.000,00
	– DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR	2.309.038.500,00	550.000.000,00
5	Perencanaan Pembangunan	10.868.507.300,00	866.994.000,00
	– BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR	9.628.850.300,00	866.994.000,00
	– BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR	1.239.657.000,00	
6	Perhubungan	12.261.514.502,00	
	– DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALBAR	12.261.514.502,00	
7	Kependudukan dan Catatan Sipil	5.326.669.110,00	
	– DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR	5.326.669.110,00	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.168.000.000,00	2.080.845.000,00
	– DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALBAR	2.168.000.000,00	2.080.845.000,00
9	Sosial	1.984.436.700,00	17.929.843.000,00
	– DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR	1.984.436.700,00	17.929.843.000,00
10	Ketenagakerjaan	1.869.936.000,00	14.284.653.000,00
	– DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR	1.869.936.000,00	14.284.653.000,00
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.055.044.300,00	2.518.214.000,00
	– DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALBAR	7.055.044.300,00	2.518.214.000,00
12	Penanaman Modal	3.176.541.000,00	500.000.000,00
	– DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALBAR	3.176.541.000,00	500.000.000,00
13	Pemudaan dan Olahraga	26.863.859.610,00	5.645.396.000,00
	– DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR	26.863.859.610,00	5.645.396.000,00

14	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9.623.043.800,00	
	– BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR	3.398.274.200,00	
	– BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR	3.129.085.300,00	
	– SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR	3.095.684.300,00	
15	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	172.844.724.653,00	2.073.000.000,00
	– SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	67.416.455.378,00	2.073.000.000,00
	– SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR	51.438.178.200,00	
	– BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR	5.660.598.900,00	
	– INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR	10.633.678.900,00	
	– BADAN PENGEMBANGAN SUBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALBAR	15.307.335.965,00	
	– BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR	20.916.142.310,00	
	– BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALBAR	1.472.335.000,00	
16	Ketahanan Pangan	17.565.398.500,00	17.416.087.000,00
	– DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR	17.565.398.500,00	17.416.087.000,00
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.127.876.500,00	61.223.170.000,00
	– DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR	6.127.876.500,00	61.223.170.000,00
18	Komunikasi dan Informatika	3.110.653.000,00	
	– DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR	3.110.653.000,00	
19	Perpustakaan	28.602.357.900,00	1.379.868.000,00
	– DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALBAR	28.602.357.900,00	1.379.868.000,00
	URUSAN PILIHAN	171.501.868.828,00	361.780.819.000,00
1	Pertanian	124.685.652.628,00	355.009.315.000,00
	– DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI KALBAR	107.957.074.628,00	344.554.384.000,00
	– DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR	16.728.578.000,00	10.454.931.000,00
2	Kehutanan	3.815.583.350,00	920.800.000,00
	– DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR	3.815.583.350,00	920.800.000,00
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	13.834.691.950,00	
	– DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALBAR	13.834.691.950,00	

4	Kelautan dan Perikanan	17.959.997.400,00	2.665.698.000,00
	– DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR	17.959.997.400,00	2.665.698.000,00
5	Perdagangan	11.205.943.500,00	3.185.006.000,00
	– DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR	11.205.943.500,00	3.185.006.000,00
	TOTAL ANGGARAN	2.480.131.882.334,00	563.927.427.000,00

Pontianak, Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



Drs. CORNELIS MH

